



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA BIMA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TULANG BAWANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
SUNGAI PENUH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BELITUNG TIMUR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
ROTE NDAO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
TARAKAN
TAHUN 2024**

ACARA

**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK)**

J A K A R T A

SENIN, 21 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Bima Tahun 2024
- Pemohon: Mohammad Rum dan Mutmainnah

PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024
- Pemohon: Hendriwansyahn dan Danial Anwar

PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Sungai Penuh Tahun 2024
- Pemohon: Ahmadi Zubir dan Ferry Satria

PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024
- Pemohon: Burhanudin dan Ali Reza Mahendra

PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024
- Pemohon: Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Theodorianus Fanggalda

PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali kota Kota Tarakan Tahun 2024
- Pemohon: Lembaga Analisis HAM Indonesia

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak)

Senin, 21 Januari 2025, Pukul 07.57 – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dian Chusnul Chatimah
2. Jefri Porkonanta Tarigan
3. Bisariyadi
4. Titis Anindyajati

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Pangeran
2. Ardany Zulfiqar

B. Pemohon Perkara Nomor 48/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendrik Eddy Purnomo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Putra

D. Pemohon Perkara Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Deka Putra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Kurniadi Aris

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Satria Adhitama Sukma
2. Burhanudin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Birri At Tamami Effendi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Angga Busra Lesmana
2. Muklis

I. Termohon:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Mochammad Afifuddin | (KPU RI) |
| 2. Muhaemin | (KPU Kota Bima) |
| 3. Perwira | (KPU Kab. Tulang Bawang) |
| 4. Even Satria | (KPU Kota Sungai Penuh) |
| 5. Leny Septriani | (KPU Kab. Belitung Timur) |
| 6. Ruhermansyah | (KPU Kab. Rote Ndao) |

7. Agabus Lau (KPU Kab. Rote Ndao)
8. Mawardi (KPU Kota Tarakan)

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ahmad
2. Rozali
3. Mohamad Ulin Nuha
4. Aulia Nugraha Sutra Ashary
5. Muh. Taufan Tri Utama

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Sutrisno
2. Jufrin

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ampria Bukhori
2. Sultan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Adithiya Diar
2. Pahrendi Ahmad

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adetia Sulus Putra
2. Erdian

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yafet Yosafet Wilben Rissy
2. Daniel Henukh

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Anwar
2. Munirahayu

Q. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Suhardi | (Bawaslu Prov. NTT) |
| 2. Idhar | (Bawaslu Kota Bima) |
| 3. Inda Fiska Mahendro | (Bawaslu Kota Tulang Bawang) |
| 4. Desi Triyana | (Bawaslu Kota Tulang Bawang) |
| 5. Dianda Kurniawan | (Bawaslu Kota Sungai Penuh) |
| 6. Muhammad Hapis | (Bawaslu Prov. Jambi) |
| 7. Ihsan Jaya | (Bawaslu Kab. Belitung Timur) |
| 8. Danny Sugara | (Bawaslu Kab. Belitung Timur) |
| 9. Sulaiman | (Bawaslu Prov. Kalimantan Utara) |
| 10.A. Muh. Saifullah | (Bawaslu Kota Tarakan) |
| 11.Patje Jonsens Bernard Tari | |
| 12.Hasan Suwari Selolong | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang untuk Perkara Nomor 41, 98, 111, 48, 71, dan 146 PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025, dibuka.

Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang lagi di ruangan ini, bagi yang pernah datang sebelumnya di ruangan ini.

Pak Ketua. Nah ini, Beliau ini adil, ada di Panel 1, ada di Panel 2. Ini giliran Panel 2 kayaknya, sekarang. Nah, gitu. Kalau jadi pemimpin yang adil, memang begitu lho, Pak Ketua, gitu. Berbagi rata, begitu.

Sebagaimana layaknya, biasa, kita tidak memperkenalkan lagi karena dianggap sudah hadir semua dan kami mengingatkan untuk sidang hari ini dengan agenda Mendengarkan Keterangan ... apa ... Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, bahwa masing-masing Pihak diberi waktu maksimal 15 menit, untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja dan yang disampaikan itu tidak boleh berbeda dengan apa yang dituliskan dalam jawaban atau keterangan. Soalnya kalau ada perbedaan, yang digunakan adalah yang ada dalam naskah tertulis. Itu pertama, jadi waktunya 15 menit.

Yang kedua. Karena ini sekarang adalah hak konstitusionalnya Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, mohon Pemohon untuk sabar kalau ada yang mau diklarifikasi ke Majelis. Itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau ada yang mau menyampaikan bukti, tambahan bukti, dan segala macamnya, silakan sekarang. Nanti kalau sudah dekat sidang mau selesai, tidak bisa diverifikasi, sehingga tidak bisa disahkan. Itu saja poin-poinnya.

Kita mulai sekarang dari Perkara Nomor 41, Kota Bima.

Silakan, Termohon.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [02:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Walaikumsalam wr.wb.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [02:23]

Yang kami hormati Ketua Majelis Panel, para hadirin semuanya. Yang kami hormati Ketua KPU RI yang hadir bersama kami.

Adapun pokok-pokok yang dapat kami sampaikan dalam jawaban Termohon terkait dengan Perkara Nomor 41 sebagai berikut.

Dalam jawaban yang telah kami serahkan, itu terdiri dari halaman 1 sampai halaman 43. Adapun bukti yang kami ajukan adalah Bukti T-1 sampai T-166.

Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk merespons atau membacakan pokok-pokok atau isu-isu penting terkait dengan dalil Pemohon.

Yang pertama, terkait dengan dalil Pemohon soal adanya pelanggaran TSM (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Jadi Kewenangan dilewati, ya? Kewenangan. Tenggat Waktu, bagaimana? Ada Eksepsi, enggak?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [03:26]

Kewenangan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Ada Eksepsi?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [03:29]

Eksepsi ada, terkait dengan (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Oke.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [03:32]

Jangka waktu, kami serahkan kepada, Yang Mulia, untuk menyerah ... menilai.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Kalau Legal Standing?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [03:39]

Dengan Legal Standing, ambang batas, tentu tidak memenuhi syarat.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Oke. Melewati ambang batas, ya?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [03:46]

Melewati ambang batas. Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Oke.

Kalau permohonan kabur, ada enggak yang harus disampaikan?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [03:52]

Permohonan kabur kami uraikan juga, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [03:55]

Terkait dengan adanya kesalahan dalam menjumlahkan total suara sah (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Oke.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [04:01]

Di dalam Dalil Permohonan. Itu poinnya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Itu yang menyebabkan permohonan kabur, yang lain?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [04:05]

Betul. Yang lainnya terkait dengan dalil TSM.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Oke.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [04:11]

Tapi di Petitemnya meminta soal perselisihan hasil suara.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Oke.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [04:18]

Itu poin pentingnya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:20]

Lanjut.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [04:21]

Lanjut, izin ke Pokok Perkara. Hal penting yang (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [04:23]

Ya. Pokok Permohonan ... Pokok Perkara, silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [04:25]

Pokok Perkara atau Pokok Permohonan terkait dengan dalil pelanggaran TSM. Tentu ini tidak ada rekomendasi yang kami terima dari Bawaslu.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Oke.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [04:37]

Sehingga dalil tersebut bersifat asumptif.

Poin selanjutnya terkait dengan penyusunan DPT yang serampangan. Ini juga kami nyatakan tidak benar karena Termohon telah melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih secara transparan dan partisipasif ... partisipatif. Termohon juga telah melaksanakan tahapan, mulai dari (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [05:01]

Ketika di PT ... DPT disusun, enggak ada keberatan, ya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [05:04]

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Oke, lanjut.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [05:06]

Jadi rangkaian tahapan itu telah kami tempuh, lalui.

Selanjutnya terkait dengan dalil tidak ... pemilih tidak dikenal. Ini juga kami di sini kami membantah. Yang menurut kami adalah dalil pemilih yang tabat ... tidak dapat ditemui pada saat melaksanakan coklit. Itulah fakta yang terjadi.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Oke.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [05:32]

Angka yang dimunculkan oleh Pemohon adalah 1.608.

Selanjutnya, poin terkait dengan DPT ganda sebanyak 38.224 dengan 4.833 pemilih ganda identik di berbagai TPS, ini juga kami lengkapi dengan bukti foto analisis data ganda, kronologis data ganda, dan hasil inzage atas bukti Pemohon yang diajukan di MK. Adapun dalil kami adalah tahapan ini telah kami lalui melalui pemutakhiran data pemilih. Hasil analisis gandaan melalui sidalih ditemukan memang ada 1.140 pemilih potensi ganda.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Berapa? 1.000?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [06:22]

1.140.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Potensi ganda, ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [06:25]

Potensi ganda. Data tersebut dilakukan verifikasi faktual dan pengecekan melalui SIAK ada 818 pemilih merupakan Warga Kota Bima.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:38]

Oke.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [06:39]

322 pemilih tidak beralamat Kota Bima, sehingga tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih Kota Bima, sehingga Kota Bima menurut Termohon 0 pemilih ganda atau potensi pemilih ganda.

Hasil analisis ini juga telah dilakukan sinkronisasi dengan kelurahan dalam satu kecamatan, antarkecamatan dalam satu Kota Bima, termasuk juga Kota Bima dengan Kabupaten Bima di luar Nusa Tenggara Barat.

Jadi, menurut Termohon dalam hal ini Pemohon salah membaca elemen data pemilih karena tidak disandingkan dengan NIK-nya.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Oke.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [07:25]

Sehingga menyibub ... menyebabkan kesalahan dalam penyajian data.

Selanjutnya poin yang kami bantah juga terkait dengan dalil Pemilih ganda memberikan suara di 21 TPS di kecamatan. Ini juga kami lampirkan, Bukti T-122 tabel hasil pencermatan daftar nama KTP sebanyak 70 nama di 21 TPS. Termasuk juga Form Model ... Model A

daftar pemilih di 21 TPS tersebut, juga Form C.Daftar Hadir, dan Form Model C.Hasil. Itu yang kami lampirkan sebagai bukti untuk membantah dalil Pemohon.

Adapun dalil jawaban adalah dalam konteks ini memang Pemohon lagi-lagi salah membaca elemen data pemilih karena tidak disandingkan dengan NIK.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:19]

Oke.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [08:21]

Alat bukti yang digunakan Pemohon berupa dokumen, misalnya di dalam hasil inzage kami, Bukti P-9 dan P-10 yang dibuat sendiri ... dibuat ... dibuat secara mandiri, bukan dikeluarkan oleh Termohon atau pihak atau instansi yang berwenang. Jadi, sehingga menurut Pemohon, bukti tersebut tidak valid.

Terkait dengan dalil huruf c halaman 35 sampai 43 peristiwa kampanye di Kelurahan Tanjung, kami juga membantah dalil ini karena memang tidak ada laporan yang kami terima, sehingga tidak dapat kami tindak lanjut, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:07]

Oke.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [09:08]

Selanjutnya, dalil terkait dengan peristiwa kampanye melibatkan anak di bawah umur juga, dalil ini juga tidak dapat kami tindak lanjut karena kami tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Oke.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [09:19]

Lebih lanjut, kami sampaikan juga terkait dengan dalil atas nama Mahfud, TPS 1 Kelurahan Paruga, diberikan Formulir Model C.Pemberitahuan, tetapi tidak diizinkan untuk memberikan suara. Adapun jawaban kami adalah pada TPS Para ... TPS 1 Desa Para ... Kelurahan Paruga, tidak ada pemilih dalam DPT yang bernama Mahfud.

53. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Mungkin yang dimaksud ini Mahfud MD, mungkin enggak?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [09:52]

Mungkin, Pak.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Enggak ketemulah kalau di Bima Mahfud MD, kan.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [09:55]

Juga tidak ada dalam DPTb.

57. KETUA: SALDI ISRA [09:57]

Nah itu, silakan. Enggak apa-apa.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [09:59]

Jadi, pada hari pemungutan suara, persoalan ini pun tidak muncul. Ini, Yang Mulia.

Lanjut, poin terkait dengan dalil Pemohon. Ada pemilih dari luar negeri yang menggunakan hak pilih di TPS 1 dan TPS 5 Dodu.

Jawaban Termohon adalah tidak menyebutkan nama pemilih yang dimaksud di dalam dalil Pemohon. di Kelurahan Dodu, sesuai dengan Berita Acara Nomor 127 dan seterusnya tentang penetapan hasil pemetaan TPS, hanya terdapat 4 TPS. Jadi, tidak ada TPS 5 yang dimaksud. Itu fakta yang terjadi. Kami lengkapi juga dengan Bukti T-20, T-129, T-130, T-131.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Oke.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [10:48]

Yang terkait dengan penetapan hasil, terkait dengan Model A, terus terkait juga juga Surat Pernyataan Ketua KPPS, terkait juga Form Model C. Kejadian Khusus, kami lampirkan juga sebagai bukti.

Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon di 5 pemilih TPS 4 Monggonao yang tidak diberikan Formulir Model C. Pemberitahuan. Ini juga kami bantah karena tidak dijelaskan siapa pemilih yang dimaksud,

tidak ada persoalan yang muncul pada hari pemungutan suara. Ini kami juga buktikan dengan melampirkan bukti atau mengajukan Bukti T-132, Form Model A.Kabupaten, daftar pemilih TPS 04 di Monggonao, T-133 Form C. Daftar Hadir juga kami lampirkan. T-134 berupa surat pernyataan Ketua KPPS juga kami lampirkan sebagai bukti.

Selanjutnya, dalil Pemohon terkait dengan 15 mahasiswa yang berada di luar Kota Bima, tetapi Formulir C.Pemberitahuan digunakan oleh orang lain, ini juga kami bantah. Karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas nama 15 mahasiswa yang dimaksud dan Formulir Model C.Pemberitahuan digunakan untuk apa oleh orang lain, tidak ada persoalan yang muncul pada saat pemungutan suara.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Oke.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [12:13]

Selanjutnya, dalil yang menyatakan KPPS pada TPS 2 Monggonao, pemilih tidak disuruh tanda tangan daftar hadir. Atas Dalil Pemohon tersebut kami bantah karena semua pemilih pada TPS yang dimaksud menandatangani Formulir C. Daftar Hadir dan kami lampirkan Bukti di T-135 dan T-136, Form C. Daftar Hadir dan Form C.Kejadian Khusus sebagai jawaban atas Dalil Pemohon.

Selanjutnya, pemilih atas nama Eka Susilawati di TPS 4 Kelurahan Dara, ya diberi hak pilih padahal orang Jakarta. Adapun jawaban kami, pemilih atas nama Eka ya, merupakan warga Kota Bima dan memiliki e-KTP.

63. KETUA: SALDI ISRA [13:09]

Oke.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [12:09]

Pemilih tersebut memberikan hak suaranya pada TPS sesuai dengan alamat KTP-nya.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Itu vide berapa?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [13:13]

Vide T-137.

67. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Oke.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [13:16]

Itu surat dinas KPU dan T-138 surat pernyataan Ketua KPPS.

69. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Oke.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [13:23]

Juga, T-13 ... 139, e-KTP yang bersangkutan, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Oke.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [13:29]

Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon atas nama Nafsah, TPS 04 Kelurahan Dara diberikan hak pilih, padahal yang bersangkutan terdaftar di TPS 03 Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Atas dalil tersebut kami jawab dengan pemilih atas nama Nafisah merupakan warga Kota Bima dan telah memiliki KTP E ... e-KTP Kota Bima. Pemilih tersebut memberikan hak suaranya pada TPS sesuai dengan e-KTP. Ini kami ajukan Bukti di T-139 berupa e-KTP pemilih yang dimaksud.

73. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Oke, ini soal yang itu bisa kita ... kami baca, ya?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [14:13]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [14:14]

Nanti kita akan mempersandingkan.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [14:15]

Baik.

77. KETUA: SALDI ISRA [14:15]

Kan nih perbedaannya emang relatif tipis, makanya basis penjelasan peka ... per-TPS itu menjadi penting, tapi itu tidak usah dibacakan semua karena sudah diuraikan (...)

78. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [14:25]

Baik.

79. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Ada lagi poin penting yang harus disampaikan?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [14:28]

Poin penting yang terakhir mungkin, Yang Mulia (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Ya.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [14:29]

Terkait dengan 70 pemilih ganda.

83. KETUA: SALDI ISRA [14:31]

Oke. Ya, silakan.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [14:35]

Ini penting. Pemilih ganda hasil pencermatan kami ditemukan yang dimaksud oleh Pemohon adalah ada kesamaan nama. Memang di Kota Bima itu banyak kesamaan nama, termasuk 70 itu, kesamaan nama, tapi bukanlah orang yang sama, tapi orang yang berbeda, itu kami buktikan dengan NIK.

85. KETUA: SALDI ISRA [14:59]

NIK dan itu ada buktinya semua, ya?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [15:02]

Ada buktinya semua.

87. KETUA: SALDI ISRA [15:01]

Di-vid-e-kan semua? Oke, nanti kita cek.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [15:04]

Jadi, kesamaan nama tempat ... tempat lahir itu sangat mungkin, tapi sesungguhnya secara nomor NIK adalah orang-orang yang berbeda.

89. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Yang kotak suara tersimpan di kelurahan itu bagaimana ceritanya itu?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [15:20]

Ya, kotak suara tersimpan itu, Yang Mulia (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [15:23]

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [15:23]

Memang pada saat ... apa namanya ... distri ... pengumpulan, itu dilakukan memang masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan, sehingga memang tertinggal ya, tapi jangka waktunya masih rentang waktu yang diperbolehkan untuk (...)

93. KETUA: SALDI ISRA [15:40]

Oke.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [15:41]

Disusulkan kembali dan itu kami buktikan bahwa hasil yang ada di kotak, dengan hasil ... apa namanya ... suara yang terekam, itu juga tidak ada perbedaan.

95. KETUA: SALDI ISRA [15:53]

Oke, sebelum Petitum, berapa jumlah TPS di Bima?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [15:57]

Seratus ... seratus ... 218, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [16:02]

218. Dari 218 ini, berapa banyak yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon? Ada enggak, KPU? Silakan. Ada enggak, yang tidak ditandatangani di tingkat TPS?

98. TERMOHON: MUHAEMIN [16:25]

Izin, Yang Mulia. Kita tidak melakukan rekapitulasi berapa yang tidak tanda tangan di (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [16:29]

Tapi semuanya bisa dicek, ya?

100. TERMOHON: MUHAEMIN [16:31]

Semuanya bisa dicek melalui (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [16:33]

Bukan. Di bukti yang disampaikan, semua TPS yang dipersoalkan dibuktikan, enggak?

102. TERMOHON: MUHAEMIN [16:38]

Kita hanya (...)

103. KETUA: SALDI ISRA [16:39]

Ada yang disampaikan?

104. TERMOHON: MUHAEMIN [16:40]

Izin, Yang Mulia. Kita hanya mengajukan C.Hasil di 21 TPS yang di (...)

105. KETUA: SALDI ISRA [16:45]

Yang dipersoalkan?

106. TERMOHON: MUHAEMIN [16:46]

Persoalkan.

107. KETUA: SALDI ISRA [16:47]

Dari 21 TPS itu, semua tanda tangan atau tidak? Saksi apa ... Pihak Pemohon?

108. TERMOHON: MUHAEMIN [16:53]

Kita ... itu yang belum kita cek, tanda tangan atau tidak.

109. KETUA: SALDI ISRA [16:55]

Nah. Nah itu ... itu hal-hal yang standar, yang harus, ya.

110. TERMOHON: MUHAEMIN [16:58]

Ya.

111. KETUA: SALDI ISRA [16:58]

Karena itu termasuk poin yang penting bagi kami, makanya ditanyakan, nanti biar kita cek.

112. TERMOHON: MUHAEMIN [17:02]

Siap, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [17:03]

Oke. Di tingkat kecamatan, berapa kecamatan di sini, di Bima?

114. TERMOHON: MUHAEMIN [17:08]

Ada 5 kecamatan, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [17:09]

Dari 5 kecamatan itu, berapa kecamatan yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon? Kalau 5 ini ndak bisa kejawab, kebangatan itu namanya.

116. TERMOHON: MUHAEMIN [17:22]

Kecamatan ... kecuali Kecamatan Asakota yang tidak ditandatangani, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [17:26]

Kecamatan apa?

118. TERMOHON: MUHAEMIN [17:27]

Kecamatan Asakota.

119. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Oke. Selebihnya tanda tangan, ya?

120. TERMOHON: MUHAEMIN [17:29]

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [17:31]

Oke. Ada 1 yang tidak tanda tangan, nanti kita cek. Silakan, lanjut ke Petitum.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [17:36]

Baik.

123. KETUA: SALDI ISRA [17:37]

Kuasa Hukum.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [17:37]

Izin, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [17:38]

Ya.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [17:40]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menga ... mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor empat puluh ... 45 dan seterusnya, tanggal 3 ... 3 Desember 2024, pukul 17.27 WITA.
3. Selanjutnya, menetapkan suara perolehan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tabel terlampir, Yang Mulia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Ditandatangani oleh Kuasa Hukum, Ahmad dan kawan-kawan.

127. KETUA: SALDI ISRA [18:35]

Oke.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [18:36]

Demikian, Yang Mulia.

Terima kasih. Nasurumu minallahi wa fathun kareeb.
Assalamualaikum wr. wb.

129. KETUA: SALDI ISRA [18:41]

Walaikumsalam. wr. wb.

Itu kalau penutupnya itu ... apa ... ciri Muhammadiyah atau NU yang sebenarnya?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [18:50]

Muhammadinu.

131. KETUA: SALDI ISRA [18:51]

Muhammadinu, ya. Ya, ini kalau ... apa ... anggota KPU Bima itu, tiru Pak Ketua ini. Sehari itu, tetap harus olahraga 5 kilo. Tanya Beliau, nih. Jadi kelihatan segar terus.

Pihak Terkait, silakan. Dari (...)

132. TERMOHON: MUHAEMIN [19:08]

Izin.

133. KETUA: SALDI ISRA [19:09]

Perkara Nomor 41, Bima.

134. TERMOHON: MUHAEMIN [19:11]

Izin, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [19:13]

Dari mana?

136. TERMOHON: MUHAEMIN [19:13]

Izin, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [19:14]

Ya.

138. TERMOHON: MUHAEMIN [19:14]

Ingin tambahkan, terkait dengan pertanyaan, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Ya.

140. TERMOHON: MUHAEMIN [19:19]

Di seluruh TPS, itu sudah menandatangani.

141. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Seluruh TPS tanda tangan, ya?

142. TERMOHON: MUHAEMIN [19:24]

Ya, di C.Hasilnya.

143. KETUA: SALDI ISRA [19:24]

Oke. Oke, paling tidak, nanti kami akan cek yang 21 itu.

144. TERMOHON: MUHAEMIN [19:28]

Siap, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Oke.

146. TERMOHON: MUHAEMIN [19:29]

Terima kasih.

147. KETUA: SALDI ISRA [19:30]

Terima kasih.

Silakan, Pihak Terkait untuk 41 Kota Bima. Poin-poinnya saja, ya. Ini panjang juga, ini.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [19:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin untuk menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait. Dalam Eksepsi.

Mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [19:58]

Ya. Eksepsi apa? Kalo Kewenangan dianggap dibacakan. Apa lagi? Tenggat Waktu?

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:03]

Mengenai Eksepsi Kewenangan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [20:06]

Oke.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:07]

Terus mengenai Kedudukan Hukum. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

153. KETUA: SALDI ISRA [20:15]

Karena melebihi ... apa, ya?

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:17]

Karena melebihi ambang batas, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [20:18]

Oke.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:19]

2%[sic!], sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2).

157. KETUA: SALDI ISRA [20:22]

Tenggat Waktu?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:24]

Tenggang Waktu juga sama, Yang Mulia. Bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan melebihi tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 3 hari. Jadi Permohonan Pemohon awalnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu pada tanggal 5 Desember 2024.

159. KETUA: SALDI ISRA [20:46]

Ya.

**160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:46]**

Pukul 21.53 WIB.

161. KETUA: SALDI ISRA [20:49]

5 Desember itu hari Rabu, ya?

**162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:53]**

Siap.

163. KETUA: SALDI ISRA [20:54]

5 Desember itu hari apa? Tanggal 2 itu hari.

**164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [20:57]**

Hari.

165. KETUA: SALDI ISRA [20:57]

Hari ... 5 Desember hari apa? Hari Kamis.

**166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [21:02]**

Ya.

167. KETUA: SALDI ISRA [21:02]

Jadi Kamis, Jumat, Senin. Nah gitu, jadi hari Sabtu, Mingguya tidak dihitung.

Lanjut.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [21:09]

Ya.

169. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Kalau soal permohonan tidak jelas, ada yang mau disampaikan?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [21:13]

Ada, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [21:14]

Apanya?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [21:15]

Jadi ada beberapa apa namanya ... setelah kami cermati Permohonan Pemohon ini, banyak sekali yang kabur, antara lain.

1. Bahwa dalam Posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan permohonannya, khususnya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tanpa disertai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [21:49]

Oke.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [21:50]

2. Bahwa dalam Petitem Permohonan Pemohon, mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, tanpa disertai permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan seterusnya, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [22:16]

Oke. Lanjut.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [22:17]

Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya memaparkan secara kualitatif contoh peristiwa yang kemudian digeneralisasi sebagai pelanggaran yang bersifat TSM tanpa adanya uraian atau penggambaran tentang adanya unsur-unsur subjektif maupun objektif dari dalil adanya pelanggaran TSM, baik mengenai apa, kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran TSM tersebut terjadi.

Bahwa uraian Permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas antara yang didalilkan dalam permohonan dengan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana yang diisyaratkan dalam perkara perselisihan hasil.

Bahwa Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada dalil-dalil asumptif tanpa memberikan gambaran tentang kejadian yang konkret, di mana kejadiannya, siapa pelakunya, kapan terjadinya, modusnya seperti apa, dan keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut serta bagaimana keterkaitannya dengan Termohon.

177. KETUA: SALDI ISRA [23:27]

Oke, kalau soal kabur kita anggap selesai. Pokoknya menurut Pihak Terkait permohonan ini kaburlah begitu.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [23:34]

Kabur, siap.

179. KETUA: SALDI ISRA [23:35]

Soal, kalau dikatakan ... apa ... jelas permohonannya, nanti kan ndak mendukung ... apa ... Prinsipalnya Pihak Terkait. Lanjut ke Pokok Permohonan.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [23:47]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dalam Pokok Permohonan Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Bahwa mohon agar alasan-alasan diuraikan Dalam Eksepsi dianggap terulang dan terurai kembali dalam bagian tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait pada bagian Pokok Perkara.

Bahwa setelah kami menyimak susunan Permohonan Pemohon, itu telah menyalahi atau tidak mempedomani Lampiran 1, PMK Nomor 3 Tahun 2024, sehingga dalam keterangan Pihak Terkait ini kami hanya akan menanggapi yang perlu saja, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [24:30]

Ya, yang tidak perlu, enggak usah, Pak.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [24:32]

Siap. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai prosedur.

183. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Oke, itunya enggak usah, Pak.

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [24:42]

Ya, siap.

185. KETUA: SALDI ISRA [24:43]

Nanti, Bapak kalau puji-puji KPU, nanti jadi anggota KPU Bapak nanti.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [24:47]

Siap, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [24:48]

Biar kami saja yang puji KPU, yang lain enggak boleh. Lanjut!

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [24:53]

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan yang secara langsung atau tidak langsung diarahkan atau ditujukan kepada Pihak Terkait, maka Pihak Terkait dapat memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa semua dalil-dalil Permohonan tidak ada satu Posita pun yang menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagai pokok perkara. Bahkan Pemohon sama sekali tidak membantah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sehingga menurut Pihak Terkait, tidak ada perselisihan hasil pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa secara keseluruhan, dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran di tingkat proses pelaksanaan pemilihan, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diselesaikan Termohon sebelum Termohon menetapkan hasil pemilihan melalui institusi-institusi di luar Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang.

189. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Saya tanya satu, Pak. Ini ada salah satu dalil yang perlu Bapak jelaskan. Ini katanya dalam masa kampanye terdapat peristiwa penghadangan dan menghalang-halangi kegiatan kampanye Pemohon yang dilakukan oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Nah, di mana Bapak jelaskan ini?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [26:22]

Izin, Yang Mulia. Kami (...)

191. KETUA: SALDI ISRA [26:23]

Di halaman berapa?

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [26:25]

Halaman 34, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [26:30]

Oke, halaman 34.

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [26:32]

Halaman 34 poin 17.

195. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Ya.

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [26:34]

Bahwa kami membantah dengan tegas dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pelibatan anak-anak dalam kampanye yang dilakukan oleh (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [26:45]

Yang ini menghalangi dulu, kalau anak-anak lain lagi ceritanya.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [26:47]

Ya, jadi sebelum kampanye dilakukan, kami sebagai Pihak Terkait telah mengajukan atau telah mengadakan imbauan, Yang Mulia, baik melalui medsos maupun grup WA. Jadi dalam imbauan tersebut, itu sama sekali dilarang untuk melibatkan anak-anak, termasuk melakukan hal-hal yang lain.

199. KETUA: SALDI ISRA [27:09]

Bapak mengimbau ke siapa, Pak?

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:12]

Siap. Izin, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [27:13]

Pihak Terkait, mengimbau ke siapa?

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:15]

Mengimbau kepada masyarakat peserta kampanye, Yang Mulia, yang mengikuti kampanye.

203. KETUA: SALDI ISRA [27:19]

Dalam kapasitas sebagai calon, ya?

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:21]

Siap.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:22]

Berarti, Bapak sudah bantu anggota Bawaslu, itu.

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:24]

Siap.

207. KETUA: SALDI ISRA [27:25]

Itu kan mestinya kerjaan Bawaslu itu.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:27]

Izin, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [27:27]

Ya. Jadi bagaimana cerita penghadangan ini, Pak?

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:35]

Nah, itu penghadangan yang dilakukan di Kelurahan Tanjung, barangkali maksudnya itu ada di poin 16, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [27:42]

Ya.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [27:42]

Di halaman 41. Kami juga membantah dengan tegas bahwa ada penghadangan seperti itu. Karena dalil Pemohon juga itu kami anggap kabur, Yang Mulia, karena tidak menyebutkan secara jelas waktu dan tempat kejadian yang dimaksud, hari apa, tanggal berapa, sama sekali tidak diuraikan di dalam permohonannya.

Bahwa yang kedua, atas dugaan tersebut juga telah diproses oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, ya. Kemudian, penanganannya juga tidak ... apa ... dihentikan karena dianggap tidak memenuhi ... tidak memenuhi unsur pelanggaran, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [28:19]

Oke. Apa lagi poin penting yang harus disampaikan?

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [28:26]

Kaitan dengan 21 TPS yang dimohonkan PSU, Yang Mulia.

215. KETUA: SALDI ISRA [28:29]

Oke. Apa yang mau disampaikan ini, 21 TPS?

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [28:31]

Jadi, sama sekali pihak Pemohon di sini tidak menggambarkan secara utuh apa sesungguhnya yang terjadi pada 21 TPS itu. Pelanggaran apa saja, itu tidak disebutkan secara spesifik. Yang kami pahami bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan Pemohon ... apa namanya ... pemilih ganda, itu merujuk pada Bukti P-11. Pada persidangan pendahuluan pertama sudah diklarifikasi, ternyata Bukti P-11 itu dianggap oleh Majelis tidak jelas, sehingga tidak ikut disahkan pada saat itu.

217. KETUA: SALDI ISRA [29:10]

Nanti sekarang ditambahkan itu, Pak!

**218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [29:13]**

Siap. Izin, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [29:13]

Lanjut!

**220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [29:14]**

Ya. Demikian juga masalah pemilih yang tidak dikenal.

221. KETUA: SALDI ISRA [29:19]

Ya.

**222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [29:20]**

Itu juga dia merujuk pada Bukti P-34 yang pada saat sidang tanggal 9 Januari lalu, itu juga tidak ada, sehingga tidak ikut disahkan sebagai alat bukti.

Nah, kemudian dari 21 TPS yang dimohonkan PSU, selain tidak tergambar secara utuh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, juga ... apa ... di 21 TPS itu sudah ditandatangani oleh saksi paslon, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [29:56]

Oke. Tadi (...)

**224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [29:57]**

Termasuk saksi dari (...)

225. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Tadi sudah saya tanya, Pak, tidak bisa diulangi itu.

**226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [29:59]**

Siap.

227. KETUA: SALDI ISRA [30:01]

Apa lagi? Cukup, ya? Bapak langsung ke Petitem!

**228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [30:03]**

Ya.

229. KETUA: SALDI ISRA [30:10]

Petitem halaman 41.

**230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [30:14]**

Izin, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Ya.

**232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [30:15]**

Petitem.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Kuasa Hukum Pihak Terkait, Sutrisno, Jufrin, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [30:46]

Terima kasih. Mengaburkan atau mengabulkan tadi?

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [30:50]

Menga ... mengabulkan, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [30:52]

Sedikit saja bedanya itu, Pak. Kabur dengan kabul itu sedikit bedanya.

Silakan, Bawaslu! Saya senang sekali kalau melihat ... apa ... Bawaslu provinsi ini hadir.

236. BAWASLU: IDHAR [31:05]

Siap.

237. KETUA: SALDI ISRA [31:05]

Silakan, Bawaslu.

238. BAWASLU: IDHAR [31:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

239. KETUA: SALDI ISRA [31:11]

Walaikumsalam wr.wb.

240. BAWASLU: IDHAR [31:12]

Untuk keterangan kami dari Bawaslu, untuk keterangan kami ini sejumlah 91 halaman.

241. KETUA: SALDI ISRA [31:20]

Ya.

242. BAWASLU: IDHAR [31:21]

Namun kami akan membacakan beberapa pokok-pokok saja di ... yang berkaitan dalil permohonan.

243. KETUA: SALDI ISRA [31:27]

Ya. Poin-poinnya saja, Pak.

244. BAWASLU: IDHAR [31:29]

Siap.

245. KETUA: SALDI ISRA [31:29]

Kalau Bapak bacakan, tidak selesai-selesai sidang ini.

246. BAWASLU: IDHAR [31:34]

Kemudian yang berkaitan dengan yang pertama yaitu berkaitan dengan dalil perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

247. KETUA: SALDI ISRA [31:42]

Pak, yang perlu dijelaskan oleh Bapak itu, pertama soal DPT Ganda. Yang kedua, penghadangan kampanye. Kampanye melibatkan anak-anak, itu poin penting yang harus Bapak jelaskan. Kemudian soal pengambilan sejumlah surat suara yang kurang di Kelurahan Jati Barat[sic!], itu beberapa poin yang perlu kami dalam dari Bapak. Lebih ... selebihnya kami anggap dibacakan. Silakan.

248. BAWASLU: IDHAR [32:11]

Siap.

249. KETUA: SALDI ISRA [32:12]

Silakan.

250. BAWASLU: IDHAR [32:15]

Yang berkaitan dengan data pemilih. Data pemilih ganda, ya.

251. KETUA: SALDI ISRA [32:20]

Ya.

252. BAWASLU: IDHAR [32:22]

Terhadap data pemilih ganda tidak ada lapo ... laporan maupun temuan dari kami maupun permohonan sengketa.

253. KETUA: SALDI ISRA [32:29]

Ya.

254. BAWASLU: IDHAR [32:29]

Kemudian hasil pengawasan kami di Bawaslu Kota Bima bahwa Bawaslu Kota Bima melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Bima.

Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami pada penetapan daftar pemilih sementara, pada tanggal 10 Agustus Tahun 2024 bahwa kami meminta kepada KPU Kota Bima untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima terhadap beberapa pemilih yang belum melak ... melakukan perekaman KTP elektronik.

255. KETUA: SALDI ISRA [33:04]

Ya.

256. BAWASLU: IDHAR [33:04]

Kemudian yang kedua, kami meminta kepada KPU Kota Bima untuk segera melakukan koordinasi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi terhadap pemilih tidak dikenal, 1.608.

257. KETUA: SALDI ISRA [33:18]

Oke. Jadi enggak ada, ya? Keberatan dari Pemohon, ya? Berkaitan dengan DPS dan DPT itu, ada enggak?

258. BAWASLU: IDHAR [33:30]

Untuk pemilih ganda di Kota Bima yang berkaitan dengan keberatan Pemohon tidak ada, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [33:35]

Tidak ada, ya.

260. BAWASLU: IDHAR [33:36]

Tidak ada.

261. KETUA: SALDI ISRA [33:36]

Memang Kota Bima, Pak. Kota lain Bapak enggak usah pikirkan. Lalu yang berikutnya soal penghadangan, itu bagaimana ceritanya, Pak? Bapak ... ada enggak dalam wilayah pengawasan Bapak?

262. BAWASLU: IDHAR [33:50]

Ada, yang ... kemudian yang berkaitan dengan laporan yang berkaitan dengan dugaan penghadangan kegiatan kampanye, tidak ada laporan ini, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [33:58]

Ya.

264. BAWASLU: IDHAR [33:59]

Kemudian Bawaslu Kota Bima melalui Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat itu, telah menemukan dugaan pelanggaran pemilihan terlapor atas nama Asrawati[sic!].

265. KETUA: SALDI ISRA [34:11]

Ya.

266. BAWASLU: IDHAR [34:12]

Itu dengan Nomor Registrasi Temuan 01 dan seterusnya, pada tanggal 25 Oktober Tahun 2024, yang pokok ... yang pada pokoknya dugaan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan surat dari Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat, tertanggal 24 Oktober Tahun 2024, Bawaslu Kota Bima mengambil alih dan meregistrasi temuan Nomor 01 dan seterusnya, tertanggal 25 Oktober Tahun 2024.

Kemudian Bawaslu Kota Bima bersama Sentra ga ... Penegakan Hukum Terpadu Kota Bima melakukan pembahasan pertama terha ... yang pada pokoknya dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Bima dan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian.

267. KETUA: SALDI ISRA [35:03]

Hasilnya?

268. BAWASLU: IDHAR [35:05]

Kemudian ... hasilnya, kemudian Bawaslu Kota Bima melak ... bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua pada tanggal 29 Oktober Tahun 2024 yang pada pokoknya menurut Bawaslu Kota Bima temuan tersebut memenuhi unsur Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan.

269. KETUA: SALDI ISRA [35:28]

Oke.

270. BAWASLU: IDHAR [35:28]

Sedangkan menurut Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota dan Kepala Saksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Raba[sic!] Bima, temuan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan dengan ... berbunyi "Dengan sengaja mengacau atau menghalangi atau mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan kampanye".

271. KETUA: SALDI ISRA [35:52]

Oke. Tapi menurut Bawaslu ada, ya.

272. BAWASLU: IDHAR [35:55]

Ya.

273. KETUA: SALDI ISRA [35:56]

Tapi, setelah prosesnya lanjut ke Gakkumdu sampai di kejaksaan itu kemudian dianulir, ya?

274. BAWASLU: IDHAR [36:02]

Ya, siap.

275. KETUA: SALDI ISRA [36:04]

Karena tidak memenuhi unsur. Oke, nanti biar kami nilai.

Apa lagi, Pak, yang mau disampaikan? Nah, pertanyaannya begini, Pak. Ini selama proses, berapa laporan yang Bapak terima, Bawaslu Bima? Jumlah laporan.

276. BAWASLU: IDHAR [36:26]

Kalau jumlah laporan yang kami terima di Bawaslu Kota Bima, itu adalah sebanyak 23 laporan.

277. KETUA: SALDI ISRA [36:29]

Oke, dari 23 laporan itu, berapa laporan yang datang dari Pemohon?

278. BAWASLU: IDHAR [36:32]

Yang dari Pemohon setelah selesai rekap, itu ada 8 laporan, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [36:48]

8, ya?

280. BAWASLU: IDHAR [36:51]

Ya, setelah rekap.

281. KETUA: SALDI ISRA [36:56]

Setelah selesai rekap?

282. BAWASLU: IDHAR [36:56]

Ya.

283. KETUA: SALDI ISRA [36:57]

Apa saja yang dilaporkan itu, Pak, di antaranya? Enggak usah disebut semua.

284. BAWASLU: IDHAR [37:02]

Laporan yang berkaitan dengan pertama yaitu adalah dugaan pemilih ganda dan (...)

285. KETUA: SALDI ISRA [37:09]

Oke.

286. BAWASLU: IDHAR [37:11]

Mau mencoblos lebih dari satu kali.

287. KETUA: SALDI ISRA [37:11]

Oke, pilih yang ganda. Oke, coblos lebih dari satu kali. Oke, apa lagi?

288. BAWASLU: IDHAR [37:19]

Kemudian, laporan yang berkaitan dengan (...)

289. KETUA: SALDI ISRA [37:22]

Oke, dari 8 itu berapa yang Bapak nyatakan memenuhi unsur, sehingga ditindaklanjuti?

290. BAWASLU: IDHAR [37:30]

Tidak ada satu pun laporan yang memenuhi unsur.

291. KETUA: SALDI ISRA [37:34]

Oke. Tidak satu pun, ya?

292. BAWASLU: IDHAR [37:37]

Ya.

293. KETUA: SALDI ISRA [37:40]

Oke, ada yang lain yang mau disampaikan? Cukup?

294. BAWASLU: IDHAR [37:43]

Untuk sementara cukup.

295. KETUA: SALDI ISRA [37:46]

Nah, terima kasih, Bawaslu.

Bawaslu ini memang suka panjang-panjang ini dan kami senang dengan laporan seperti ini. Pertama, lebih komprehensif. Yang kedua, bikin kami capek begitu. Tapi yang namanya semua bahan kan harus

dibaca oleh Mahkamah, supaya nanti putusannya komprehensif, terutama untuk semua dalil dan fakta yang muncul. Cukup, ya?

296. BAWASLU: IDHAR [38:13]

Cukup.

297. KETUA: SALDI ISRA [38:14]

Oke, terima kasih.

298. BAWASLU: IDHAR [38:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr.wb.

299. KETUA: SALDI ISRA [38:19]

Walaikumsalam wr.wb.
Kita lanjut sekarang ke Belitung Timur Nomor 98, silakan.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [38:53]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

301. KETUA: SALDI ISRA [38:53]

Walaikumsalam.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [39:00]

Izin memperkenalkan, Yang Mulia. Hadir dalam sidang hari ini, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Belitung Timur, atas nama Aulia Nugraha.

303. KETUA: SALDI ISRA [39:04]

Ya.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [39:06]

Dari Kantor Hukum Saleh and Partners, hadir Prinsipal kami Ibu Leny, Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur, Divisi Hukum, Yang Mulia.

Izin membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [39:26]

Silakan.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [39:29]

Jawaban Termohon KPU Kabupaten Belitung Timur terhadap Perkara Nomor 98 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Burhanudin dan Ali Reza Mahendra, Yang Mulia.

Dalam eksepsi.

Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [39:45]

Ya.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [39:46]

Lanjut terhadap Legal Standing, Yang Mulia.

Dalam hal ini, Pemohon tidak memiliki legal standing karena selisih yang disyaratkan dalam undang-undang 2%, namun pada kenyataannya di lapangan 31,7%, Yang Mulia, selisihnya, sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [40:10]

Karena tidak memenuhi 158, ya?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [40:12]

Betul, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [40:13]

Kalau Permohonan tidak jelas atau kabur, ada enggak?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [40:14]

Ada, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [40:15]

Apa yang tidak jelas?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [40:16]

Intinya terkait dengan Pemohon tidak rinci dalam mendeskripsikan pemilih sebagai pihak yang terlibat dugaan money politics, Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [40:24]

Ya.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [40:25]

Kemudian terkait dengan narasi locus, Yang Mulia, terkait 5 kecamatan yang tidak jelas.

317. KETUA: SALDI ISRA [40:31]

Ini di Belitung Timur, berapa kecamatan semua?

318. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [40:35]

Belitung Timur ada 7 kecamatan, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [40:40]

Oke, sebentar. 7 kecamatan. Kemudian TPS-nya berapa?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [40:40]

192, Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [40:48]

192 TPS. Nah pertanyaan saya, dari 192 TPS ini, berapa yang tidak ditandatangani oleh TPS ... saksi TPS, ada enggak, Bu?

322. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [40:57]

Bismillah. Izin menjawab, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [40:59]

Ya.

324. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [41:01]

Untuk TPS yang ada di 5 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon (...)

325. KETUA: SALDI ISRA [41:06]

Bukan, ini kan ... semua TPS kan 192, kan?

326. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [41:06]

Ya, itu ditandatangani semua, di TPS, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [41:12]

Di TPS tanda tangan semua, ya?

328. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [41:13]

Ya.

329. KETUA: SALDI ISRA [41:15]

TT semua. Di kecamatan dari 7 kecamatan yang tidak ditandatangani berapa?

330. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [41:20]

7 kecamatan ditandatangani semua, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [41:22]

Tanda tangan semua?

332. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [41:23]

Ya.

333. KETUA: SALDI ISRA [41:23]

Nah, sampai tidak tanda tangan itu, baru di tingkat kabupaten?

334. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [41:27]

Di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [41:27]

Oke, oke, terima kasih, Bu.
Silakan, lanjut.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [41:30]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

337. KETUA: SALDI ISRA [41:31]

Ya.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [41:31]

Langsung ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [41:36]

Ya.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [41:33]

Terkait Pokok Perkara, gambaran umum terkait dengan wawasan umum di Pemilihan Bupati Kabupaten Belitung Timur, mulai dari jumlah

penduduk sampai dengan partisipasi pemilih, Yang Mulia, ada di halaman (...)

341. KETUA: SALDI ISRA [41:43]

Yang itu enggak usah.

342. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [41:45]

Siap.

343. KETUA: SALDI ISRA [41:47]

Ya, gambaran umum enggak usah.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [41:50]

Betul.

345. KETUA: SALDI ISRA [41:52]

Ini yang dijelaskan yang istilahnya Pemohon di sini suara yang tercemar. Nah (...)

346. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [41:59]

Betul, Yang Mulia.

347. KETUA: SALDI ISRA [42:00]

Ini suara yang kena polusi nih, Pak.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [42:00]

Betul, Yang Mulia.

349. KETUA: SALDI ISRA [42:03]

Coba Bapak jelaskan.

350. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [42:04]

Izin, Yang Mulia, terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam dalil Permohonan. Saya sampaikan dari halaman 27 dulu, Yang Mulia, terkait dengan relawan kampanye, Yang Mulia, terkait dengan relawan kampanye. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, relawan an ... relawan antipolitik SARA dan politik uang, dan seluruh anggota di dalamnya tidak pernah terdaftar atau melakukan pendaftaran kepada KPU Kabupaten Belitung Timur sebagai relawan dari salah satu paslon, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA [42:30]

Oke.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [42:31]

Nah, kemudian terkait dengan bazar murah, Yang Mulia, izin kami (...)

353. KETUA: SALDI ISRA [42:33]

Ya.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [42:31]

Menyampaikan bahwa Termohon telah menerima tembusan surat tanda pemberitahuan dari Kepolisian Resor Belitung Timur, terkait dengan adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti T-15), yang menggunakan metode kampanye kegiatan lain dalam bentuk bakti sosial, dalam hal ini bazar beras murah, tanggal 22 November, tanggal 23 November, dan tanggal 23 November ada dua tempat, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [43:00]

Ya.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [43:01]

Bahwa Pemohon sampaikan juga ... Termohon sampaikan juga bahwa Pemohon juga mendaftarkan kampanye serupa sebagaimana yang dikeluarkan oleh kepolisian di tanggal 22 November dengan metode jual minyak murah, 23 November juga metodenya jual minyak murah, dan 23 November jual minyak murah. Artinya, dalam tembusan STTP tersebut diketahui bahwasannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kegiatan yang serupa, Yang Mulia, yaitu metode kampanye dalam bentuk kegiatan lain berupa bakti sosial, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [43:32]

Oke, apa lagi yang mau dijelaskan?

358. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [43:34]

Kemudian tentang keberatan saksi tadi sudah disampaikan, Yang Mulia, tidak ada keberatan saksi pada seluruh tingkatan, kecuali di kabupaten, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [43:42]

Nah, apa catatan Pemohon tidak tanda tangan di kabupaten itu? Bu, silakan, Bu.

360. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [43:49]

Izin, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [43:51]

Ya.

362. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [43:52]

Pada keberatan atau D.Keberatan saksi, itu Saksi Paslon 01 tidak melakukan tanda tangan di D.Hasil dikarenakan pada saat itu mereka menyampaikan masih ada proses di Bawaslu terhadap laporan di Bawaslu, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [44:09]

Oke, jadi alasannya karena (...)

364. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:11]

Bukan mengenai hasil (...)

365. KETUA: SALDI ISRA [44:12]

Ada proses di Bawaslu, sehingga kemudian mereka tidak tanda tangani hasil, ya?

366. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:16]

Ya.

367. KETUA: SALDI ISRA [44:16]

Nanti kita (...)

368. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:17]

Bukan mengenai hasil.

369. KETUA: SALDI ISRA [44:18]

Bukan mengenai hasil.
Ibu kalau tahu proses apa yang ada di Bawaslu itu?

370. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:22]

Sejauh yang kami ketahui, Yang Mulia, izin menjawab.

371. KETUA: SALDI ISRA [44:25]

Ya.

372. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:25]

Pada saat itu berdasarkan hasil komunikasi kami dengan Bawaslu, dari Pihak 01 relawan ataupun tim kampanye 01 ada melaporkan beberapa laporan terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap proses, Yang Mulia.

373. KETUA: SALDI ISRA [44:42]

Oke, karena itu masih ada di Bawaslu, lalu kemudian mereka tidak tanda tangan, ya?

374. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:45]

Ya, Yang Mulia.

375. KETUA: SALDI ISRA [44:48]

Ada enggak, alasan lain? Misalnya selisih suara dan segala macam? Enggak ada, ya?

376. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:53]

Tidak ada, Yang Mulia.

377. KETUA: SALDI ISRA [44:55]

Sehingga mereka tanda tangan mulai dari TPS sampai ke tingkat kecamatan?

378. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [44:58]

Ya, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [44:59]

Oke, terima kasih.
Apa lagi? Silakan, Kuasa Hukum.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [45:02]

Izin, Yang Mulia (...)

381. KETUA: SALDI ISRA [45:02]

Nanti kalau banyak Prinsipal yang bicara nanti dipotong 50%.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [45:06]

Siap, Yang Mulia.

Terkait dengan dugaan pelanggaran money politics, Yang Mulia, kami (...)

383. KETUA: SALDI ISRA [45:11]

Ya.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [45:11]

Sudah sampaikan di halaman 33, 34 (...)

385. KETUA: SALDI ISRA [45:13]

Ya.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [45:13]

Terkait dengan adanya laporan Bawaslu. Ada 3 laporan, Yang Mulia, dihentikan, dihentikan, dan tidak diregistrasi, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan lembaga survei, Yang Mulia. Bahwa sampai dengan pemilihan penyelenggara Kepala Daerah Belitung Timur (...)

387. KETUA: SALDI ISRA [45:29]

Ya.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [45:29]

Tidak ada lembaga survei yang mendaftar ke KPU Kabupaten Belitung Timur, Yang Mulia, sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan KPU 328 Tahun 2024, Yang Mulia.

389. KETUA: SALDI ISRA [45:38]

Oke.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [44:00]

Kemudian, izin, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Pemohon yang ... terakhir, Yang Mulia, di halaman 39 (...)

391. KETUA: SALDI ISRA [45:44]

Ya.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [44:00]

Perihal keterlibatan Bawaslu dalam mempengaruhi penyelenggara, kami bukan ... bukan menjadi kewenangan kami untuk menanggapi, Yang Mulia, dalam permohonan.

Kemudian, kami akan menyampaikan terkait dengan perolehan hasil yang menurut kami berdasarkan Surat Keputusan Nomor 37 yang benar, pasangan (...)

393. KETUA: SALDI ISRA [46:05]

Kalau begitu langsung Petitem, Pak.

394. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [46:06]

Betul. Izin, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [46:07]

Ya.

396. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [44:00]

Nah, karena ini ada Prinsipal kami, biar Petitem yang membacakan Prinsipal kami, Yang Mulia.

397. KETUA: SALDI ISRA [46:13]

Silakan!

398. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [46:13]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

399. KETUA: SALDI ISRA [46:14]

Ya.

400. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [46:14]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon Memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.57 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara tetap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tetap dan benar adalah sebagai berikut.
 1. Pasangan Calon Drs. Burhanudin, S.H. (...)

401. KETUA: SALDI ISRA [47:13]

Dianggap dibacakan.

402. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [47:13]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [47:15]

Oke. Besok kalau sudah dinyatakan benar putusan yang sebelumnya, Bu, yang ini enggak usah lagi.

404. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [47:22]

Siap.

405. KETUA: SALDI ISRA [44:23]

Itu kan, sama. Redundant, gitu.

406. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [47:23]

Siap, Yang Mulia.

407. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Tapi tidak salah. Ada lagi?

408. TERMOHON: LENY SEPTRIANI [47:27]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, ditandatangani.

409. KETUA: SALDI ISRA [47:40]

Terima kasih, Ibu.

Berikut Pihak Terkait, Kuasa Pihak Terkait. Silakan!

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [47:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [47:49]

Ya.

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [47:49]

Perkenalkan saya, Adetia Sulus Putra, hari ini didampingi rekan saya Erdian, kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 98, Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [47:57]

Ya.

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [47:59]

Dalam hal ini, kami akan menyampaikan terkait keterangan Pihak Terkait pada Perkara 98 tersebut.

Kami langsung saja pada pokok-pokoknya, selanjutnya selain dan selebihnya yang tertulis di dalam keterangan Pihak Terkait, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

415. KETUA: SALDI ISRA [48:16]

Ya.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [48:17]

Dalam Eksepsi.

Tentang kewenangan Mahkamah. Kami memohon kepada Mahkamah agar memaknai dirinya sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memeriksa terhadap perkara a quo.

417. KETUA: SALDI ISRA [48:29]

Kalau begitu, kita tutup persidangan.

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [48:32]

Itu permohonan, Yang Mulia.

419. KETUA: SALDI ISRA [48:33]

Ya. Kalau Anda mengatakan kami tidak berwenang. Ya, ndak perlu kita sidang ini.

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [48:38]

Ya. Kami memohon, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [48:39]

Nanti Anda belajar lagi, ya.

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [48:41]

Siap, Yang Mulia.

423. KETUA: SALDI ISRA [48:42]

Dari zaman baheula sejak tahun 2020 ... 2004, itu Mahkamah itu, tidak hanya mendasarkan kepada angka semata.

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [48:52]

Ya.

425. KETUA: SALDI ISRA [48:52]

Tapi juga non angka, ya?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [48:54]

Permohonan kami, meminta seperti itu, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [48:56]

Kalau begitu, Anda langsung ke Petikum saja, yang lain enggak usah dibacakan.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [48:59]

Siap. Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

429. KETUA: SALDI ISRA [49:01]

Ya.

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:02]

Tentang Tenggang Waktu Permohonan, tidak akan kami bacakan.

431. KETUA: SALDI ISRA [49:04]

Tetapi kan ndak berwenang tadi, kata Anda. Ya, enggak usah dilanjutkan. Berhenti saja.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:09]

Mohon maaf, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [49:10]

Silakan.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:12]

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon.

435. KETUA: SALDI ISRA [49:14]

Makanya kalau lawyer itu, baca. Jadi yurisprudensi-yurisprudensi itu, dibaca.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:20]

Ya.

437. KETUA: SALDI ISRA [49:20]

Berkali-kali kami memutuskan. Mengatakan bahwa Mahkamah itu tidak hanya ini kewenangannya.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:26]

Siap, Yang Mulia.

Mohon maaf, Yang Mulia. Izin saya meneruskan. Untuk Kedudukan Hukum Pemohon, tidak hanya apa yang disebutkan oleh Pemohon pada angka 8 permohonannya, yakni tentang Pasal 4 Peraturan MK itu, Yang Mulia, dimana di sini pe ... Pemohon memaknai dirinya telah berkedudukan hukum.

439. KETUA: SALDI ISRA [49:51]

Oke. Kedudukan hukum dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, ya?

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:53]

Ya. Dianggap tidak memiliki Kedudukan Hukum.

441. KETUA: SALDI ISRA [49:55]

Karena melewati ambang batas.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:56]

Ya.

443. KETUA: SALDI ISRA [49:56]

Apa lagi?

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:57]

Siap, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [49:57]

Permohonan kabur, bagaimana?

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [49:59]

Kalau permohonan kabur, Yang Mulia, senyatanya terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Pilkada, dengan selisih 31,71%, maka Pemohon selayaknya dimaknai untuk tidak berkedudukan hukum.

447. KETUA: SALDI ISRA [50:16]

Ya, kalau Kedudukan Hukum kan, sudah saya simpulkan tadi.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [50:18]

Ya, siap. Tidak (...)

448. KETUA: SALDI ISRA [50:19]

Tidak memiliki. Kan yang ke ... ke-4 Eksepsi Anda kan, permohonan kabur.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [50:22]

Ya. (ucapan tidak terdengar jelas)

450. KETUA: SALDI ISRA [50:23]

Apanya? Yang menyebabkan permohonan kabur itu?

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [50:25]

Di sini pada angka 19 Permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan tentang 3 (tiga) hal fundamental sehingga dibentuknya permohonan oleh Pemohon.

452. KETUA: SALDI ISRA [50:38]

Apa itu?

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [50:39]

Pemohon menguraikan ... menyebutkan bahwa adanya kecurangan dengan money politics terencana yang terjadi di setiap kecamatan. Kemudian ditemukan kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pilkada. Yang ketiga, adanya pelanggaran netralitas dari pejabat lembaga negara, Yang Mulia.

Pada Pokok Permohonan.

Mulai dari angka 24 sampai dengan 56, terkait dengan adanya pelanggaran netralitas dari Pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa, sama sekali tidak diuraikan oleh Pemohon.

Kemudian apa yang diatur oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b butir 3 PMK Nomor 3 Tahun 2024, berikut lampiran-lampirannya, tidak juga disebutkan oleh Pemohon, berapa suara yang benar menurut hitungan Pemohon.

454. KETUA: SALDI ISRA [51:25]

Terus, apa lagi?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [51:34]

Kemudian kami langsung masuk kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil-dalil nomor 3, angka 9[sic!] nomor 3 itu tidak akan kami tanggapi karena memang tidak diuraikan.

Kami akan menanggapi tentang money politics terencana berupa bazar beras murah di 5 kecamatan.

456. KETUA: SALDI ISRA [52:02]

Silakan.

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [52:03]

Izin, untuk mengklarifikasi sedikit, Yang Mulia. Berdasarkan alat bukti yang kami telah lampirkan, bazar beras murah yang dinyatakan oleh Pemohon ataupun Termohon tadi adalah sebuah kampanye metode lainnya, itu bukanlah Pihak Terkait selaku penyelenggara. Di dalam alat bukti itu menyebutkan bahwa bazar murah itu penyelenggaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia, Demo ... Dewan Pimpinan Cabang, Yang Mulia. Jadi ada perbedaan di antara Fezzi Uktolseja selaku Ketua DPC dengan Fezzi Uktolseja selaku Ketua Tim Pemenangan.

458. KETUA: SALDI ISRA [52:40]

Bahwa peristiwa Bazar Murah itu ada, kan?

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [52:43]

Bazar mera ... Beras Murah itu ada, namun izin menambahkan, Yang Mulia.

460. KETUA: SALDI ISRA [52:47]

Ndak, pertanyaan saya Anda jawab. Bazar Murah itu ada?

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [52:49]

Bazar Beras Murah ada.

462. KETUA: SALDI ISRA [52:51]

Oke, berhenti di situ

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [52:52]

Siap.

464. KETUA: SALDI ISRA [52:53]

PDIP itu salah satu pendukung pasangan calon atau tidak?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [52:55]

Ya.

466. KETUA: SALDI ISRA [52:56]

Oke, lanjut.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [52:57]

Kemudian di sini Pemohon pada halaman 16 sampai dengan 20 menampilkan foto-foto seolah-olah Pihak Terkait ada pada acara bazar dimaksud.

Kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa foto-foto yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon ini bisa diakses sampai dengan hari ini di Facebook, akun Facebook, Afa Menyapa. Kami lampirkan pula itu sebagai alat bukti, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [53:26]

Ya.

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [53:28]

Berikut video ... video tangkapan layar ... video rekaman layar juga kami tampilkan.

470. KETUA: SALDI ISRA [53:36]

Lanjut, apa lagi?

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [53:44]

Nah, pada waktu itu saya tambahkan sedikit, Yang Mulia, pada saat pengambilan video atau foto yang dijadikan barang bukti itu, Bapak Kamarudin Mutan atau Pak Afa[sic!] ini belum kedudukan ... belum berkedudukan selaku peserta pemilihan.

472. KETUA: SALDI ISRA [53:58]

Ini kapan kejadiannya?

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [53:59]

Ini, kejadian kalau menurut video yang di-upload itu 22 Juli dan 14 Agustus ... sampai 14 Agustus 2024.

474. KETUA: SALDI ISRA [54:08]

Oke, lanjut. Apa lagi? Ada lagi?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [54:20]

Untuk b, Yang Mulia. Izin, untuk b.

476. KETUA: SALDI ISRA [54:21]

Ya.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [54:21]

Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa menjanjikan materi dan pemberian uang dalam ... atau bentuk lain, di sini menjanjikannya mere ... Pemohon menguraikan bahwa ada program-program. Untuk itu, saya telah membaca juga Putusan Mahkamah dan tidak perlu saya ulangi itu, Yang Mulia. Bahwa itu adalah program.

478. KETUA: SALDI ISRA [54:43]

Kalau yang menguntungkan Anda diambil putusan MK-nya, tapi kalau yang tidak Anda tinggalkan.

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [54:47]

Siap, Yang Mulia. Kemudian, Terkait dengan memberikan-memberikan sejumlah uang atau bentuk lainnya ini Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah membentuk relawan untuk isu anti SARA ataupun isu anti money politics.

480. KETUA: SALDI ISRA [55:04]

Oke.

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [55:06]

Sebagaimana susunan tim kampanye telah juga kami lampirkan sebagai bukti.

482. KETUA: SALDI ISRA [55:11]

Oke, apa lagi? Lanjut, Petitem saja, ya?

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [55:15]

Ya.

484. KETUA: SALDI ISRA [55:15]

Silakan.

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [55:17]

Sedikit, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [55:17]

Ya.

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [55:18]

Untuk kecurangan dari pelanggaran dari penyelenggara pilkada ini Saudara Marliani yang dituliskan di sini, kami tidak juga merekrut beliau untuk melakukan tugas apapun, intinya kami tidak mengenal yang bersangkutan, Yang Mulia.

488. KETUA: SALDI ISRA [55:32]

Yang nama Mariani itu?

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [55:33]

Karena kami pun tidak pula pernah memerintahkan siapapun penyelenggara pemilihan Untuk melakukan tindakan-tindakan yang diluar dari ketentuan. Selanjutnya, Petikum. Izin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

490. KETUA: SALDI ISRA [55:48]

Silakan.

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERDIAN [55:49]

Mohon, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dan mengadili perkara a quo.
4. Menyatakan Permohonan tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam Permohonan a quo.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon telah kabur atau tidak jelas, obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak beralasan menurut hukum segala dalil yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya.

3. Menyatakan sah, benar, dan berkekuatan hukum, serta tetap berlaku isi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan seterusnya.
4. Menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk segera menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2, dalam hal ini Kamarudin Muten dan Khairil Anwar menjadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur.
5. Menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan dan menaati isi dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

492. KETUA: SALDI ISRA [57:48]

Cukup, ya?

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERDIAN [57:49]

Ditandatangani oleh Kuasa Hukum, Suhirman dkk. Akhir kata kami ucapkan, wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

494. KETUA: SALDI ISRA [57:48]

Walaikumsalam wr. wb.
Silakan, Bawaslu.

495. BAWASLU: DANNY SUGARA [58:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

496. KETUA: SALDI ISRA [58:10]

Walaikumsalam wr. wb

497. BAWASLU: DANNY SUGARA [58:12]

Izin, Yang Mulia, Saya Danny Sugara, Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur untuk menyampaikan Keterangan Bawaslu terkait dalil apa yang disampaikan oleh Pihak Pemohon, ya.

498. KETUA: SALDI ISRA [58:22]

Silakan.

499. BAWASLU: DANNY SUGARA [58:22]

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur ada 19 halaman terkait keterangan, namun izin kami membacakan langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Yang pertama, itu terkait penetapan perolehan suara dalam Permohonan Pemohon itu di angka 24 halaman 12.

Berdasarkan Keterangan Bawaslu, itu kami tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [58:49]

Oke.

501. BAWASLU: DANNY SUGARA [58:49]

Terkait dalil itu, Bawaslu melampirkan vide bukti, Yang Mulia, yaitu surat imbauan (vide Bukti PK-11-6-1), kemudian kami melampirkan bukti laporan hasil pengawasan, Yang Mulia.

502. KETUA: SALDI ISRA [59:03]

Oke.

503. BAWASLU: DANNY SUGARA [59:04]

Ya. Kemudian untuk Pokok Permohonan dalam dalil Permohonan yang kedua, yaitu adanya dugaan money politics terencana berupa bazar beras murah itu di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit, Yang Mulia. Itu Bawaslu tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait hal itu, Yang Mulia.

504. KETUA: SALDI ISRA [59:29]

Jadi tidak ada laporan ke Bawaslu, ya?

505. BAWASLU: DANNY SUGARA [59:31]

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

506. KETUA: SALDI ISRA [59:32]

Oke.

507. BAWASLU: DANNY SUGARA [59:34]

Terkait hal itu, Bawaslu telah melampirkan vide bukti sebanyak 6 surat imbauan (...)

508. KETUA: SALDI ISRA [59:40]

Itu bazar murah itu memang tanggal 22 Juli?

509. BAWASLU: DANNY SUGARA [59:44]

Ya, Yang Mulia.

510. KETUA: SALDI ISRA [59:44]

22 Juli, ya?

511. BAWASLU: DANNY SUGARA [59:47]

Ya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Belitung Timur melalui Panwaslu Kecamatan, yakni Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit itu juga tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan, Yang Mulia. Itu kami lampirkan vide bukti berupa laporan hasil pengawasan, Yang Mulia.

512. KETUA: SALDI ISRA [01:00:06]

Oke.

513. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:00:07]

Ya. Seperti yang kami terangkan itu di halaman 5, poin 7.1 sampai 7.6, Yang Mulia. Yang pada intinya dari 5 kecamatan yang terdapat dalam dalil Permohonan Pemohon itu kami sampaikan, Yang Mulia, ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Simpang Renggang, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:00:34]

Oke.

515. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:00:35]

Di kecamatan tersebut sepanjang tahapan kampanye maupun pada jadwal yang disampaikan oleh dalil Pemohon itu tidak terdapat kegiatan bazar beras murah, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran kami di Panwaslu tingkat kecamatan maupun tingkat desa, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [01:00:55]

Tidak ada bazar murah itu?

517. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:00:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

Kemudian untuk yang di Kecamatan Kelapa Kampit, di Kelapa Kampit itu bukan di alamat yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

518. KETUA: SALDI ISRA [01:01:07]

Oke.

519. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:01:08]

Itu adanya di rumah Ibu Nurbaya, Kelapa Kampit. Namun, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran, Yang Mulia.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:01:18]

Oke.

521. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:01:19]

Untuk di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Damar, itu berdasarkan laporan hasil pengawasan, jajaran kami di Panwaslu kecamatan dan tingkat desa itu juga tidak ditemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait kegiatan hal tersebut, Yang Mulia.

522. KETUA: SALDI ISRA [01:01:37]

Oke. Berapa laporan semua yang masuk ke Bapak selama ini?

523. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:01:40]

Semua laporan yang masuk ke Bawaslu ada 12 laporan, Yang Mulia.

524. KETUA: SALDI ISRA [01:01:45]

12 laporan.

525. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:01:46]

Ya.

526. KETUA: SALDI ISRA [01:01:47]

Laporan dari Pemohon ada?

527. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:01:48]

Laporan dari Pemohon ada tujuh, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:01:50]

Tujuh.

529. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:01:51]

Tujuh.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:01:52]

Berkenaan apa saja, Pak?

531. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:01:53]

Berkenaan dengan money politics, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:01:57]

Money politics, apa lagi?

533. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:00]

Dan administrasi, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [01:02:02]

Oke, dari tujuh laporan itu ada yang terbukti, enggak?

535. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:05]

Tidak ada yang memenuhi unsur, Yang Mulia.

536. KETUA: SALDI ISRA [01:02:07]

Tidak memenuhi unsur, ini jawaban paling ... apa nih, paling umum.

537. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:11]

Ya.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:02:12]

Pokoknya kalau dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, tapi syarat formilnya ndak dijelaskan. Tidak memenuhi unsur, unsur yang mana itu tidak juga dijelaskan.

539. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:22]

Itu izin, Yang Mulia, di vide bukti kami lampirkan semua bukti langkah-langkah laporan yang telah kami tindaklanjuti.

540. KETUA: SALDI ISRA [01:02:31]

Ini ada kecurangan yang didalilkan itu dan penyelenggara pilkada, Ketua Badan Pengawas Pemilu Belitung Timur yang memberikan uang

untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dalam rangka kemenangan Pasangan Calon 02.

541. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:47]

Ya, itu (...)

542. KETUA: SALDI ISRA [01:02:48]

Bapak yang dimaksud, enggak?

543. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:49]

Tidak ada itu, Ketua.

544. KETUA: SALDI ISRA [01:02:49]

Tidak ada gimana ini?

545. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:51]

Maksudnya tidak ada hal yang seperti itu saya lakukan.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:02:54]

Tidak ada, ya?

547. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:02:57]

Yang benarnya, Pak.

549. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:02:58]

Benar, Pak. Bahkan saya berani sumpah, di wilayah yang didalilkan itu ada 43 Panwaslu ... pengawas tingkat TPS.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]

Ya.

551. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:06]

Dan ada 7 tingkat desa itu kan sangat gampang dicek satu persatu (...)

552. KETUA: SALDI ISRA [01:03:10]

Katanya Bapak membagikan uang itu Rp300.000,00 katanya.

553. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:13]

Ya. Enggak ada itu, Pak.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:03:15]

Enggak ada, ya?

555. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:16]

Enggak ada, Pak.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:03:17]

Oke.

557. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:18]

Itu bisa di ... di Belitung Timur itu ada 192 pengawas TPS. Itu bisa dicek.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:03:21]

Ada enggak, Bapak dilaporkan oleh mereka?

559. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:24]

Tidak ada dilaporkan oleh ini, Pak.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:03:25]

Oke. Enggak ada laporan, ya?

561. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:26]

Enggak ada.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:03:29]

Ke Gakkumdu juga enggak ada?

563. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:30]

Enggak ada.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:03:33]

Oke, terus? Apa lagi?

565. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:37]

Baik, Yang Mulia, mungkin ada dilanjut dari rekan kami.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:03:40]

Ini ada Pasangan Calon Nomor 2 menjanjikan materi pada spanduk.

567. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:03:43]

Ya.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:03:44]

Orasi pada saat kampanye berupa bantuan kebutuhan hidup sejumlah Rp2.000.000,00 per kartu keluarga, gratis umroh, bantuan modal hingga Rp50.000.000,00. Benar itu ada?

Silakan!

569. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:04:00]

Izin, Yang Mulia, menambahkan.

Mungkin sebelum ke pertanyaan, Yang Mulia, sedikit saya menambahkan terkait dengan laporan yang berjumlah 12 laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Yang Mulia.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:04:13]

Ya.

571. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:04:14]

Yang pertama, laporan 03 kami lakukan registrasi. 03 dan 05, itu kami lakukan registrasi terkait dengan dugaan money politics, Yang Mulia.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:04:25]

Oke.

573. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:04:26]

Dari hasil registrasi, kami lakukan kajian awal, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:04:29]

Ya.

575. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:04:30]

Kemudian bersama dengan Gakkumdu, kami lakukan pembahasan dan memanggil dalam rangka melakukan klarifikasi, Yang Mulia. Setelah selesai, Yang Mulia, kami lakukan pembahasan kedua. Di[sic!] hasil pembahasan kedua bersama dengan rekan-rekan Sentra Gakkumdu, Yang Mulia, dapat kami sampaikan kesimpulan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Pihak 01, Yang Mulia, tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:04:57]

Karena?

577. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:04:58]

Karena tidak terbukti sebagai tindak pidana ataupun pelanggaran daripada pemilihan.

578. KETUA: SALDI ISRA [01:05:03]

Itu hasilnya disampaikan ke mereka, enggak?

579. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:05:04]

Kami sampaikan dan kami umumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Yang Mulia.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:05:09]

Ada dijadikan bukti, enggak?

581. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:05:11]

Ada, Yang Mulia.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:05:12]

Oke, lanjut.

Pertanyaan saya yang tadi. Kalau yang laporan-laporan itu kan, bisa kita cek.

583. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:05:20]

Siap.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:05:20]

Pertanyaan saya tadi. Yang menjanjikan bikin spanduk Rp2.000.000,00 per kartu keluarga, gratis umroh, begitu. Ada enggak peristiwa itu?

585. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:05:28]

Baik, Yang Mulia. Kalau terkait itu, spanduk sepanjang hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, kami tidak menemukan ataupun tidak mendapatkan (...)

586. KETUA: SALDI ISRA [01:05:39]

Laporan.

587. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:05:39]

Laporan yang berkaitan dengan itu.

588. KETUA: SALDI ISRA [01:05:42]

Oke.

589. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:05:43]

Hasil pengawasan juga, kami tidak mendapatkan hasil pengawasan yang ada spanduk terkait dengan itu.

590. KETUA: SALDI ISRA [01:05:49]

Oke.

591. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:05:50]

Tetapi di visi misi dan program daripada Pasangan Calon 02, itu memang tertera, Yang Mulia.

592. KETUA: SALDI ISRA [01:05:59]

Oh. Itu tertera, ya?

593. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:06:00]

Siap, Yang Mulia.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:06:01]

Soal bantuan Rp2.000.000,00 per kartu keluarga tertera di (...)

595. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:06:03]

Rp2.000.000,00 sampai dengan 50.000.000,00.

596. KETUA: SALDI ISRA [01:06:05]

Oke.

597. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:06:06]

Di program visi-misi, program mereka.

598. KETUA: SALDI ISRA [01:06:08]

Pelunasan penunggakan BPJS, juga ada di programnya? Tapi yang Rp2.000.000.00 ada, ya?

599. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:06:16]

Ada. Ada, Yang Mulia.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:06:17]

Oke. Rp2.000.000.00 sehingga[sic!] Rp50.000.000,00 ya?

601. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:06:19]

Sampai dengan Rp50.000.000.00, Yang Mulia. Betul.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:06:20]

Oke. Yang umroh gratis? Yang umroh-umroh gratis kayak gini, dalam event politik, ini enggak diterima Tuhan itu. Doakan saja begitu, kalau ada. Masa pergi beribadah di event politik kayak begitu? Kalau ada. Ya, kan?

603. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:06:41]

Sepanjang hasil pengawasan kami, kami baca di permohonan daripada Pemohon itu, Yang Mulia. Dan (...)

604. KETUA: SALDI ISRA [01:07:25]

Tapi laporan ke Bawaslu tidak ada, ya?

605. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:07:26]

Tidak ada laporan ke Bawaslu, Yang Mulia.

606. KETUA: SALDI ISRA [01:07:28]

Ya, oke.

607. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:07:29]

Dan di dalam rapat resmi kami, Yang Mulia, bersama dengan Ketua Bawaslu, kemudian ada anggota juga, kami satu, Pak Chandra Ardila[sic!] Putra.

608. KETUA: SALDI ISRA [01:07:37]

Ya.

609. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:07:38]

Saya secara terbuka di depan kawan-kawan staff, menanyakan kepada saudara Danny Sugara Ketua Bawaslu Belitung Timur, Yang Mulia.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:07:43]

Ya.

611. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:07:44]

Kurang lebih pertanyaan saya seperti ini, Yang Mulia.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:07:46]

Ya. Sua ... coba diulangi, Pak, pertanyaannya.

613. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:07:50]

"Mohon izin, Pak Ketua, saya bil ... mohon izin, Pak Ketua, selama ini saya belum pernah menanyakan secara langsung maupun WA atau melalui telepon." Saya bilang. Dan Pak Ketua pun belum pernah menceritakan ataupun membahas persoalan yang ada menyangkut nama Pak Ketua dan nama Ibu Marliani Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung.

614. KETUA: SALDI ISRA [01:08:12]

Oke.

615. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:13]

Nah, mumpung ini forum resmi, saya sebut, Yang Mulia, mohon Pak Ketua ceritakan yang sebenarnya. Apakah ini terjadi atau tidak, Yang Mulia. Nah, jawaban yang bersangkutan pada saat itu. "Tidak ada, Bang. Nggak ada, bang."

616. KETUA: SALDI ISRA [01:08:27]

Nah, gitu (...)

617. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:28]

Itu yang ... yang disampaikan pada saat itu, Yang Mulia.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:08:30]

Bapak per (...)

619. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:31]

Di depan forum pada saat kami rapat, Yang Mulia.

620. KETUA: SALDI ISRA [01:08:35]

Bapak percaya enggak dijawab dengan jawaban itu? Ini ndak mengadu domba, ini, Pak. Enggak ada pula saya mau mengadu, Bapak berdua, enggak.

621. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:45]

Wallahualam, Yang Mulia.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:08:46]

Ya, ya (...)

623. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:48]

Karena semua ... semuanya (...)

624. KETUA: SALDI ISRA [01:08:49]

Oke, eh (...)

625. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:49]

Tentu (...)

626. KETUA: SALDI ISRA [01:08:50]

Anda diam (...)

627. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:50]

Tentu kembali kepada ... tentu kembali kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan yang ... namanya yang ada (...)

628. KETUA: SALDI ISRA [01:08:55]

Ya.

629. BAWASLU: IHSAN JAYA [01:08:58]

Dan apapun hasil yang disampaikan oleh yang bersangkutan, ya mungkin itulah yang benar dan adanya, Yang Mulia.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:09:03]

Oke, cukup, ya?

631. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:04]

Izin menambahkan sedikit, Yang Mulia. Terkait (...)

632. KETUA: SALDI ISRA [01:09:05]

Ini masih yang apa tadi?

633. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:07]

Terkait yang terakhir.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:09:07]

Ya.

635. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:13]

Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Yang Mulia.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:09:14]

Ya.

637. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:16]

Memang prinsip saya, tolak ukur suksesnya suatu pemilu itu, memang bukan hanya dari berjalan sukses, berjalan lancar dan kondusif. Namun adanya kepercayaan publik terhadap hasil suatu pelaksanaan pemilu ini, ya (...)

638. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]

Ya.

639. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:26]

Seandainya saya melakukan hal itu, ya sama saja saya menginjak demokrasi di Belitung Timur. Ya artinya, dari 192 pengawas TP[sic!] itu sangat mudah dicek, kalau itu terjadi, ya. Intinya kami selalu mengingatkan mengedepankan integritas, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:09:43]

Oke.

641. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:45]

Demi kepercayaan publik. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:09:45]

Nanti kita cek, Pak.

643. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:46]

Ya.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:09:47]

Cukup, ya?

645. BAWASLU: DANNY SUGARA [01:09:48]

Siap.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:09:49]

Terima kasih, Bawaslu Belitung Timur.
Kita lanjut sekarang ke Nomor 111 Kabupaten Rote Ndao, silakan.
Silakan!

647. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:10:35]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namu buddhaya. Salam Kebajikan.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi (...)

648. KETUA: SALDI ISRA [01:10:51]

Ya.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:10:54]

Republik Indonesia. Mohon izin kami menyampaikan jawaban Termohon kom ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, terhadap Permohonan dengan Nomor Perkara 111 PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggalai pada Pemilihan Tahun 2024 Nomor Urut 2.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:11:31]

Ya, lanjut.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:11:36]

Siap, untuk ... kami masuk kepada Eksepsi, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:11:47]

Ya.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:11:48]

Untuk ek ... untuk Eksepsi ini, prinsipnya ada terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:11:56]

Ya.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:11:57]

Jadi, prinsipnya memang Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk memutus, memeriksa, dan memutus terkait dengan penetapan hasil perolehan, namun mohon izin di sini Mahkamah untuk

mempertimbangkan terkait ... di sini kami menolak terkait adanya dalil yang bersangkutan terkait adanya TSM. Seperti itu, Yang Mulia.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:12:19]

Oke.

657. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:12:19]

Seperti itu, Yang Mulia.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:12:22]

Oke.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:12:22]

Berikutnya terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bahwa di sini Pemohon telah melewati ambang batas, Yang Mulia.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:12:29]

Oke.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:12:39]

Nah, yang kedua (...)

662. KETUA: SALDI ISRA [01:12:40]

(Ucapan tidak terdengar jelas) legal standing?

663. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:12:40]

Siap. Yang kedua, memang di sini kami menemukan peraturan yang dipakai adalah sudah kedaluwarsa, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:12:50]

Peraturan apa itu, Pak?

665. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:12:51]

Nomor 6 Tahun 2020, PMK Nomor 6 Tahun 2020.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:12:56]

Oke, oke.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:12:57]

Yang berikutnya, terkait tenggang waktu (...)

668. KETUA: SALDI ISRA [01:13:05]

Ya.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:13:07]

Di sini bahwa meskipun Pemohon mengajukan pada masa tenggang waktu, namun dalil-dalil Pemohon gugur demi hukum karena mendasari pada ketentuan yang sudah kedaluwarsa atau telah dicobut[sic!] oleh ketentuan per ... peraturan yang lebih baru.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:13:25]

Ini penetapannya kapan Bapak tetapkan, Pak? Pukul berapa? Tanggal 3 Desember, ya?

671. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:13:30]

Tanggal 3 Desember tahun 2024, pukul 23.59 WITA.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:13:36]

Tipis banget ini, Pak. Coba, Pak, bayangkan orang cuma tinggal 1 menit saja satu hari itu. Nah, itu.

Tapi, ya semua ... semua pihak hadir ketika ditetapkan?

673. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:13:48]

Hadir, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:13:51]

Pasangan calon tiga-tiganya hadir?

675. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:13:54]

Lewat saksi-saksi.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:13:54]

Saksi-saksinya hadir? Ketika ditetapkan, ya?

677. KETUA: SALDI ISRA [01:13:58]

Bapak pelit banget! Kenapa enggak geser sedikit saja begitu? Kan 1 menit 2 menit lagi, sampai di hari berikutnya, ya kan? Padahal kita sudah bilang Pak Afif itu, Pak Ketua KPU. Kalau tipis-tipis mau mendekati pergantian hari, sabar sedikit deh, duduk 5-6 menit minum kopi, pindahkan ke jadwal berikut. Tapi secara faktual, memang pada tanggal 3 Desember, pukul 23.59, ya ?

678. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:14:21]

Siap, Yang Mulia (...)

679. KETUA: SALDI ISRA [01:14:23]

Ketuk palunya itu?

680. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:14:23]

Benar, Yang Mulia.

681. KETUA: SALDI ISRA [01:14:25]

Ketuk palunya itu?

Nah karena sudah disepakati, ketuk palu, sekaligus pengumuman?

682. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:14:30]

Benar, Ya Mulia.

683. KETUA: SALDI ISRA [01:14:31]

Oke. Nah itu satu.

Yang kedua, yang perlu Bapak jelaskan ke kami itu adalah soal persyaratan calon ini yang atas nama Apremoi Dudelusy Dethan itu. Itu, itu yang didalilkan, coba bapak jelaskan.

684. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:14:48]

Baik, Yang Mulia, terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana disebutkan tadi (...)

685. KETUA: SALDI ISRA [01:14:57]

Ya.

686. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:14:57]

Bahwa prinsipnya, Termohon telah melakukan proses tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan[sic!] (...)

687. KETUA: SALDI ISRA [01:15:00]

Kalau begitu, begini, Pak, pertanyaan saya biar cepat. Bagaimana Bapak memverifikasi ijazah Apremoi ini?

688. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:15:16]

Nah, ini pada ... mohon izin (...)

689. KETUA: SALDI ISRA [01:15:18]

Ya.

690. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:15:18]

Bahwa telah dilakukan terkait dengan klarifikasi pertama, langkah-langkah yang telah ... apa ... tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon, telah melakukan klarifikasi Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (...)

691. KETUA: SALDI ISRA [01:15:36]

Ini ijazahnya Paket C, Pak, ya?

692. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:15:38]

Paket C.

693. KETUA: SALDI ISRA [01:15:38]

Oke.

694. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:15:41]

Paket C (...)

695. KETUA: SALDI ISRA [01:15:41]

Ya.

696. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:15:41]

Ini telah dilakukan klarifikasi kepada dinas (...)

697. KETUA: SALDI ISRA [01:15:46]

Oke.

698. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:15:47]

Yang diwakili oleh Kepala Bidang dan Pengajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Rote Ndao, Periode 2024, Rote Ndao, Periode 2024, Bapak Jeremias[sic!] Pande, S.Pd., NIP, dan seterusnya.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:16:02]

Ya.

700. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:16:02]

Itu disebutkan bahwa didapatkan fakta adalah benar ijazah paket C atas nama Apremoi Dudelusy Dethan, dengan nomor seri ijazah DN-24/PC/008718 dilampiri Alat Bukti T-9, diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao, dilanjutkan menyatakan benar ijazah Paket C tersebut dikeluarkan sesuai dengan nomor peserta ujian yang tertera di ijazah tersebut, dilanjutkan menyatakan mempertegas kembali ijazah Paket C ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao untuk Saudari Apremoi Dudelusy Dethan, serta (...)

701. KETUA: SALDI ISRA [01:16:56]

Itu tahun berapa dikeluarkan, Pak?

702. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:16:57]

Siap.

703. KETUA: SALDI ISRA [01:16:58]

Tahun berapa diterbitkan ijazahnya?

704. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:02]

20 September 2014.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:17:07]

Wah, berarti kan 10 tahun, ya?

706. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:09]

Siap.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:17:09]

Sebelum penyelenggaraan ini.

708. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:12]

Jadi, mohon, izin, Yang Mulia.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:17:13]

Ya.

710. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:13]

Jadi, klarifikasi ini ada 4 kali yang dilakukan oleh Termohon.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:17:19]

Ya.

712. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:19]

Pertama, tadi kepada kepala ... kepada Dinas Pendidikan.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:17:24]

Ya.

714. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:24]

Yang kedua, selanjutnya klarifikasi berikutnya diperkuat oleh Ketua PKBM Oenggae.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:17:29]

Ketua PK, apa?

716. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:33]

Pusat Kelompok Belajar Masyarakat bernama Oenggae, Oenggae Belajar tahun 2024 bernama Jefri Pena. Ini Jefri Pena adalah ketuanya.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:17:43]

Oke.

718. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:17:43]

Yang dilaksanakan oleh KPU ini didapatkan hasilnya, ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024, Yang Mulia, dilampiri Bukti T-10. Dijelaskan di situ oleh Ketua PKBM tersebut, PKBM Oenggae ... Oenggae Belajar dibentuk tahun 2013 sesuai dengan akta pendirian dengan Akta Notaris Nomor 3, tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Albert Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kupang dengan nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat de ... Oenggae Belajar, dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao, Nomor 420/443/PPO.II/2014, tanggal 23 Mei 2012 ... 2014 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM Oenggae Belajar, ini kami (...)

719. KETUA: SALDI ISRA [01:18:58]

Oke. Sebentar!

720. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:18:58]

Lampiri juga Bukti T-12.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:18:59]

Tadi, kalau begitu ijazah ... apanya itu ... penyetaraannya itu tanggal berapa tadi? 20?

722. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:19:05]

20 September.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:19:06]

Tahun? 2000?

724. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:19:06]

2014.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:19:08]

14. PKBM itu berdiri tahun berapa?

726. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:19:11]

Mei.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:19:13]

2014.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:19:15]

2014.

729. KETUA: SALDI ISRA [01:19:19]

Mei 2014.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:19:20]

Nah, kalau ... maaf itu, sesungguhnya sudah berdiri tahun 2013 dengan akta notarisnya itu dengan izin dari Kepala Dinas tanggal 23 Mei 2014.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:19:32]

Izin apanya?

732. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:19:34]

Izin operasional penyelenggaraan PKBM.

733. KETUA: SALDI ISRA [01:19:37]

Oke. Itu baru 2 tempat. Ketiga apa, Pak?

734. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:19:39]

Yang ketiga, ini diklarifikasi sendiri kepada Apremoi Dudelusy Dethan dan Dudelusy Dethan menyampaikan bahwa ... oh, maaf, ini melanjutkan tadi keterangan dari ... dari Kepala Ketua PKBM tadi.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:20:00]

Ya.

736. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:20:01]

Bahwa Apremoi Dethan adalah benar warga belajar pada PKBM Ongge Belajar sesuai dengan tercantum di dalam Ijazah Paket C dengan Nomor DN-24PC0008 ... 0008718, tanggal 20 September 2024.

737. KETUA: SALDI ISRA [01:20:24]

Oke.

738. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:20:24]

Yang berikutnya, nama bersangkutan tercantum dalam daftar usulan peserta Ujian Nasional Paket C dengan Nomor Peserta 15-012-044-5, tanggal 11 Agustus 2014. Ini kami lampirkan juga alat Buktinya T-13.

739. KETUA: SALDI ISRA [01:20:47]

Oke.

740. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:20:48]

Nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hasil Ujian Nasional Paket C dengan Nomor Peserta Ujian C-14-24-15.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:20:59]

Oke. Selesai, Pak. Sudah 2 tempat. Yang ke-3, Bapak datang ke Apremoi.

742. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:04]

Ya. Yang (...)

743. KETUA: SALDI ISRA [01:21:05]

Apa?

744. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:05]

Yang ketiga, mohon izin dulu, dengan keterangan Kepala Dinas Pendidikan lagi, Pak.

745. KETUA: SALDI ISRA [01:21:10]

Oh, balik lagi ke Dinas Pendidikan.

746. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:12]

Ya.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:21:12]

Tadi kan ... apa ... pemuda olahraga.

748. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:13]

Dinas. Ya. Ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:21:18]

Ya.

750. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:19]

Namun yang bersangkutan ini, memang sudah selesai menjabat.

751. KETUA: SALDI ISRA [01:21:24]

Oke.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:25]

Yang didatangkan ini.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:21:26]

Ya.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:27]

Beliau sekarang posisinya sebagai sekda.

755. KETUA: SALDI ISRA [01:21:30]

Oke.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:30]

Jadi diambil keterangan pada posisinya beliau, itu adalah Kepala Dinas Periode 2024 ... 2014 yang lalu.

757. KETUA: SALDI ISRA [01:21:40]

Oke. Apa keterangannya? Benar? Membenarkan juga?

758. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:41]

Nah keterangannya ... Ya, keterangan beliau, menyebutkan bahwa ... menerangkan di sit. Pertama, menyatakan (...)

759. KETUA: SALDI ISRA [01:21:50]

Pak, intinya saja, Pak. Beliau membenarkan?

760. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:53]

Membenarkan, Yang Mulia.

761. KETUA: SALDI ISRA [01:21:54]

Oke. Yang ke-4?

762. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:55]

Menandatangani ... Yang keempat kepada Apremoi sendiri.

763. KETUA: SALDI ISRA [01:21:59]

Oke.

764. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:59]

Nah, Apremoi sendiri ini menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui itu ijazahnya, Yang Mulia.

765. KETUA: SALDI ISRA [01:22:07]

Oke. Cukup 4.

Terakhir ini. Ketika proses ini, ada keberatan dari Pemohon, ndak terkait dengan ini?

766. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:21:15]

Tidak ada, Yang Mulia.

767. KETUA: SALDI ISRA [01:22:16]

Bawaslu? Ada enggak keberatan Pemohon?

768. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:22:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

769. KETUA: SALDI ISRA [01:22:19]

Tidak ada, ya. Ada laporan ke Bawaslu berkait ini?

770. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:22:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

771. KETUA: SALDI ISRA [01:22:24]

Sampai terakhir?

772. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:22:25]

Sampai terakhir.

773. KETUA: SALDI ISRA [01:22:26]

Kapan Bapak ketahui, soal ijazah ini?

774. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:22:30]

Baik, terima kasih.

775. KETUA: SALDI ISRA [01:22:30]

Enggak. Enggak, Bapak jawab saja. Nanti enggak ... ada giliran juga, ini pertanyaan cepat saja.

776. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:22:34]

Itu di tanggal 20 September. Sebelumnya tanggal 19 September kita menyampaikan kaitan tenggang waktu untuk melakukan klarifikasi apabila ada tanggapan masyarakat. Dan di tanggal 20, KPU menyampaikan surat kepada Bawaslu, yang pada intinya bahwa teda ... telah melakukan klarifikasi terkait keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1.

777. KETUA: SALDI ISRA [01:23:00]

Jadi enggak ada keberatan ke Bawaslu, ya?

778. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:23:03]

Enggak ada.

779. KETUA: SALDI ISRA [01:23:04]

Oke.
Lanjut, Pak KPU.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:23:07]

Siap, Yang Mulia.

781. KETUA: SALDI ISRA [01:23:08]

Oke.

782. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:23:10]

Sudah disampaikan.

783. KETUA: SALDI ISRA [01:23:11]

Itu selesai.

784. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:23:12]

Selesai.

785. KETUA: SALDI ISRA [01:23:12]

Yang kita menilai.

Ini soal pelanggaran politik uang dari Pasangan Calon Nomor Urut
1. Coba Bapak jelaskan.

786. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:23:22]

Nah.

787. KETUA: SALDI ISRA [01:23:22]

Nanti jangan Bapak jawab "ini bukan kewenangan kami, tanya ke
Bawaslu" begitu.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:23:28]

Baik, Yang Mulia. Bahwa Terkait dengan politik uang.

789. KETUA: SALDI ISRA [01:23:31]

Ya.

790. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [01:23:31]

Itu tidak ... tidak ada mempengaruhi ... tidak terjadi, Yang Mulia.

Yang kedua, tidak ada mempengaruhi terkait hasil dan juga tidak disebutkan terkait dengan locus, tempus, siapa yang melakukan, dan seterusnya. Begitu, Yang Mulia.

791. KETUA: SALDI ISRA [01:23:50]

Oke. Itu ketetapan Bapak nomor berapa, ya? Untuk menetapkan suara hasil ini? KPU? Bapak jawab saja, Pak. Nah, gitu. Supaya dapat jatah juga Bapak sedikit.

792. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:03]

Keputusan 1185 tanggal 3 Desember 2024, Yang Mulia.

793. KETUA: SALDI ISRA [01:24:10]

Berapa, 1185, ya?

794. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:13]

1185, Yang Mulia.

795. KETUA: SALDI ISRA [01:24:14]

Ini yang dimohonkan nomor berapa oleh Pemohon?

796. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:17]

Yang dimohonkan justru Berita Acaranya.

797. KETUA: SALDI ISRA [01:24:19]

Oke, 11[sic!] ya?

798. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:21]

Berita Acara 1132.

799. KETUA: SALDI ISRA [01:24:23]

1132.

800. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:25]

Ya.

801. KETUA: SALDI ISRA [01:24:25]

Mana yang benar nanti kami akan menilai. Yang penting faktanya dikemukakan. Cukup, ya? Langsung ke Petitum, Pak.

802. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:31]

Siap.

803. KETUA: SALDI ISRA [01:24:32]

Ya.

804. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:31]

Untuk Petitum kami sampai ... untuk ke Ketua saja.

805. KETUA: SALDI ISRA [01:24:35]

Silakan, Pak Ketua. Ketua KPU atau Ketua KPU ... apa ... Rote Ndao.

806. TERMOHON: AGABUS LAU [01:24:39]

KPU Rote Ndao.

807. KETUA: SALDI ISRA [01:24:47]

Lanjut, silakan Pak Ketua KPU. Bacakan Petitum saja, Pak. Ya. Mik-nya, mik.

808. TERMOHON: AGABUS LAU [01:25:03]

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Termohon diterima seluruhnya.
2. Pemohon Permohonan Pemohon tidak diterima dan menyatakan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. Beserta lampiran, telah melalui Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten dengan perolehan suara sebagai berikut.
Pasangan Calon Nomor Urut 1 (...)

809. KETUA: SALDI ISRA [01:26:07]

Enggak usah dibacakan itunya, Pak, perolehan suaranya enggak usah, Pak. Lanjut.

810. TERMOHON: AGABUS LAU [01:26:12]

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan KPU Nomor 753 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024.
4. Menyatakan bahwa tidak terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan selama pelaksanaan Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Rote Ndao, sehingga dengan demikian tidak perlu dilakukan PSU untuk seluruh TPS di Kabupaten Rote Ndao.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Yang Mulia, Hormat Kami Kuasa Hukum Tanda Tangan.

811. KETUA: SALDI ISRA [01:26:57]

Terima kasih.

Pihak Terkait, apa yang lain yang mau, Bapak, terangkan diluar yang sudah disampaikan KPU tadi, ada enggak?

812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:07]

Ada, Yang Mulia.

813. KETUA: SALDI ISRA [01:27:08]

Apa?

814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:10]

Perkenankan, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum dari pada Paulus Henuk dan (...)

815. KETUA: SALDI ISRA [01:27:15]

Ya.

816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:10]

Apremoi Dudelusy Dethan. Saya sendiri adalah Prof. Yafet Rissy dan rekan saya Daniel Henukh. Menyampaikan beberapa hal yang penting karena sebagian sudah disampaikan oleh Termohon. Terkait dengan eksepsi dalam (...)

817. KETUA: SALDI ISRA [01:27:33]

Eksepsinya dianggap dibacakan semuanya, Pak, biar kita yang baca nanti.

818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Cuma saya ingin sedikit saja, Yang Mulia.

819. KETUA: SALDI ISRA [01:27:44]

Ya.

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:45]

Terkait dengan supaya (...)

821. KETUA: SALDI ISRA [01:27:44]

Apa sedikitnya itu, Pak?

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:48]

Terkait dengan Legal Standing.

823. KETUA: SALDI ISRA [01:27:50]

Ya.

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:50]

Supaya menjadi lebih jelas.

825. KETUA: SALDI ISRA [01:27:53]

Bapak, sebutkan saja, Pak.

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:27:55]

Ya, ini kan selisihnya itu mencapai (...)

827. KETUA: SALDI ISRA [01:27:58]

Oh itu sudah, Pak, nanti biar kami yang nilai.

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:28:01]

Baik. Sekarang kita ... izinkan saya masuk kepada ... langsung pada Pokok Permohonannya.

829. KETUA: SALDI ISRA [01:28:08]

Ya.

830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:28:11]

Sebetulnya, Yang Mulia, kalau kita membaca Permohonan Pemohon, yang dipersoalkan itu adalah mengenai penggunaan yang di ijazah Paket C, yang diduga palsu.

831. KETUA: SALDI ISRA [01:28:22]

Ya.

832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:28:23]

Tertulis dalam Permohonan itu, terindikasi atau diduga palsu. Nah, ini yang membuat kami merasa bahwa kata *dugaan* dan *indikasi* itu samar-samar, itu ilusional karena harusnya mereka membawa bukti putusan pengadilan pidana yang menyatakan bahwa ini memang terbukti sah sebagai sebuah tindak pidana pemalsuan. Nah, sampai saat ini tidak ada laporan-laporan itu, baik di kepolisian, maupun tidak ada proses pidana yang terkait dengan penggunaan ijazah palsu yang ditudukan kepada Calon Wakil Bupati Apremoi Dudelusi Dethan.

Terkait dengan tuduhan ijazah Paket C yang palsu, Yang Mulia, izinkan kami menerangkan tambahan. Bahwa berdasarkan ijazah SD asli, ijazah SMP asli, ijazah Paket C yang asli, dan maupun surat keterangan hasil Ujian Nasional yang asli, yang kami bawa semuanya, Yang Mulia, di sini, bisa dilihat kalau Yang Mulia berkenan.

833. KETUA: SALDI ISRA [01:29:23]

Itu dijadikan bukti, kan?

834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:29:25]

Semua dijadikan bukti, Yang Mulia.

835. KETUA: SALDI ISRA [01:29:27]

Tapi foto kopinya?

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:29:28]

Ya, fotokopi.

837. KETUA: SALDI ISRA [01:29:29]

Jangan bawa kasih yang asli, nanti saya pakai untuk jadi calon pula, susah saya nanti.

838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:29:34]

Siap, Yang Mulia, Profesor. Ini saya ... kita membawa supaya karena bukti harus terang benderang. Karena Yang Mulia sendiri ... saya membaca bahwa mengatakan bahwa datang ke MK harus bawa (...)

839. KETUA: SALDI ISRA [01:29:46]

Ya.

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:29:47]

Bukti, bukan opini. Jadi kami membawa bukti aslinya.

841. KETUA: SALDI ISRA [01:29:49]

Ini Profesor kadang-kadang pusing juga kita mendengar. Lanjut, lanjut, Prof!

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:29:55]

Sesama Profesor tidak saling mendahului, tapi saya mohon maaf, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi terkait ijazah palsu ini, juga kami dapat terangkan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Termohon bahwa kepala dinas sendiri sudah menyatakan bahwa ini asli.

843. KETUA: SALDI ISRA [01:30:10]

Ya.

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:30:11]

Lalu, tetapi untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Saudara Apremoi ini benar-benar peserta Ujian Nasional, kami melampirkan lagi tiga bukti autentik. Ini yang saya dalam doktrin disebut sebagai res ipsa loquitur, the thing speaks for itself[sic!].

845. KETUA: SALDI ISRA [01:30:27]

Ya.

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:30:28]

Jadi, tiga bukti itu adalah ini bisa dilihat, Yang Mulia, di Posita 75. Yang pertama itu Daftar Peserta Ujian Seluruh PKBM Kabupaten Rote Ndao Pelajaran 2013-2014 di halaman 13 (vide Bukti PT-11).

847. KETUA: SALDI ISRA [01:30:46]

Oke.

848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:30:47]

Itu ada nama yang dituduhkan menggunakan ijazah palsu itu, padahal yang bersangkutan adalah peserta ujian yang sah.

Yang kedua, daftar nominasi peserta ujian dari PKBM Oenggae Tahun Pelajaran 2013-2014, itu di halaman 1.

849. KETUA: SALDI ISRA [01:31:04]

Oke.

850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:31:05]

Terdaftar di sana juga, itu Bukti PT-12. Lalu Daftar Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, Program Studi IPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, PKBM Oenggae Belajar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, halaman 3, kami juga membawa aslinya.

851. KETUA: SALDI ISRA [01:31:25]

Oke.

852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:31:26]

Di sana tercatat jelas bahwa Apremoi adalah Peserta Ujian Kesetaraan Paket C. Itu terkait dengan persoalan ijazah palsu ini.

853. KETUA: SALDI ISRA [01:31:36]

Ya. Ada yang ditambahkan lagi terkait ijazah, Prof?

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:31:39]

Saya kira, Prof, sudah ... Yang Mulia, cukup.

855. KETUA: SALDI ISRA [01:31:41]

Oke.

856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:31:42]

Satu lagi keterangan tambahan terkait tuduhan Pemohon pelanggaran etika politik terkait dengan politik uang.

857. KETUA: SALDI ISRA [01:31:49]

Oke.

858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:31:50]

Kami sudah melakukan inzage, Yang Mulia, Prof Saldi.

859. KETUA: SALDI ISRA [01:31:53]

Ya.

860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:31:54]

Di situ kami tidak melihat satu bukti pun. Jadi Pemohon sama sekali tidak memahami dasar hukum dan praktik politik uang yang harus dibuktikan. Seharusnya Pemohon membuktikan politik uang itu dilakukan oleh tim pemenangan yang mana? Siapa orangnya? Apakah orang-orang tersebut masuk dalam tim pemenangan yang ditetapkan oleh surat resmi dari pasangan calon? Berapa uang yang dibagikan? Siapa penerimanya? Di mana dan kapan? Di mana video atau bukti lainnya mengenai money politics tersebut? Atau di mana bukti adanya praktik uang tersebut? Pemohon sama sekali tidak membawa bukti, hanya membawa opini.

861. KETUA: SALDI ISRA [01:32:30]

Oke.

862. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:32:32]

Saya langsung pada Petitem, Yang Mulia.

863. KETUA: SALDI ISRA [01:32:30]

Ya.

864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:32:31]

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

865. KETUA: SALDI ISRA [01:32:39]

Oke.

866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:32:41]

Satu, Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, niet ontvankelijke verklaard atau NO.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ndao Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 23.59 WITA.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk menetapkan Pihak Terkait, yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, Nomor Urut 1 atas nama Paulus Henuk dan Apremoi Dudelusy Dethan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bupati Rote Ndao Tahun 2024.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Rote Ndao untuk melanjutkan tahapan Pembelian Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 hingga ke tahap pelantikan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo at bono.

Tertanda, atas nama Kuasa Hukum, Prof. Yafet Rissy dan Daniel Henuk.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya kami kembalikan kepada Majelis yang Terhormat.

867. KETUA: SALDI ISRA [01:34:34]

Terima kasih. Ini paket C ini paket cepat, Pak.

868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:34:35]

Siap, Yang Mulia.

869. KETUA: SALDI ISRA [01:34:37]

Kadang-kadang juga disebut paket cerdas.

Ini kan ... apa namanya ... bagaimana negara memfasilitasi warganya untuk mengejar pendidikan, begitu. Tapi kalau tidak ada buktinya, tetap juga tidak bisa. Namanya soal bukti. Nanti semua itu diserahkan, Pak, ya? Yang kopiannya. Sudah disampaikan, ya?

870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:34:52]

Sudah disampaikan semuanya, Prof. Terima kasih.

871. KETUA: SALDI ISRA [01:34:53]

Oke, terima kasih.

Berikut Bawaslu, silakan! Dua poin itu saja yang paling penting, Pak. Satu soal ijazah, yang kedua soal politik uang tadi.

872. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:35:02]

Baik.

873. KETUA: SALDI ISRA [01:35:03]

Apa ada tambahan baru terkait ijazah itu? Silakan!

874. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:35:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

875. KETUA: SALDI ISRA [01:35:14]

Walaikumsalam.

876. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:35:16]

Saya Hasan dan rekan saya Pak Patje Tari, akan memberikan keterangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

877. KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Ya.

878. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:35:19]

Terhadap Perkara Nomor 111 dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

879. KETUA: SALDI ISRA [01:35:37]

Ya.

880. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:35:39]

Baik, Yang Mulia. Langsung saja.

Yang pertama dalil kaitan dengan perolehan suara bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 1359 dan seterusnya, tertanggal 3 Desember 2024. Bukti terlampir. Sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang termuat dalam Formulir Model D.Hasil, tanggal 3 Desember 2024 bahwa pada pengawasan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Rote Ndao tidak ditemukan adanya permasalahan hukum dan/atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil pengawasan tersebut.

881. KETUA: SALDI ISRA [01:36:22]

Oke. Perolehan suara selesai.

882. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:36:25]

Siap.

883. KETUA: SALDI ISRA [01:36:25]

Sekarang masuk keabsahan syarat, Pak.

884. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:36:30]

Baik, ini ada kejadian khusus dalam waktu rekapitulasi.

885. KETUA: SALDI ISRA [01:36:33]

Apa kejadian khususnya, Pak?

886. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:36:34]

Baik. Ini saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

887. KETUA: SALDI ISRA [01:36:40]

Ya.

888. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:36:41]

Abia Julius Fanggidae, dan pasangan Calon Nomor Urut 3.

889. KETUA: SALDI ISRA [01:36:44]

Ya.

890. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:36:45]

Daniel Lazarus Timo yang tidak menandatangani Formulir Model D dengan alasan bahwa hasil daripada Pleno masih ada berkaitan dengan proses hukum yang sementara berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait keabsahan ijazah dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Apremoi Dudelusy Dethan. Akan tetapi, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir D. Hasil.

891. KETUA: SALDI ISRA [01:37:16]

Sudah ada enggak, hasil ... apanya ... di Kupang ini? Belum?

892. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:37:19]

Belum ada.

893. KETUA: SALDI ISRA [01:37:20]

Oke. Silakan, Pak, dilanjutkan. Apa lagi, Pak?

894. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:37:24]

Baik.

895. KETUA: SALDI ISRA [01:37:25]

Ini, sudah saya tandai dengan baik di sini.

896. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:37:28]

Terima kasih.

Untuk ... berkaitan dengan syarat calon, dalam hal ini keabsahan ijazah. Bahwa pada tanggal ... bahwa dalam rangka pencegahan terjadi dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao, no (...)

897. KETUA: SALDI ISRA [01:37:53]

Itu, enggak usah, Pak. Intinya saja, Pak.

898. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:37:55]

Siap.

899. KETUA: SALDI ISRA [01:37:55]

Apa yang Bapak ketahui terkait dengan pencalonan ini? Tadi sudah saya tanya. Ada laporan? Tidak, ya?

900. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:01]

Tidak ada. Siap. Jadi (...)

901. KETUA: SALDI ISRA [01:38:02]

Kemudian ada komunikasi dengan KPU, soal ini?

902. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:05]

Ada komunikasi pimpinan.

903. KETUA: SALDI ISRA [01:38:06]

Nah, apa?

904. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:07]

Yang Mulia, maaf.

905. KETUA: SALDI ISRA [01:38:07]

Enggak apa-apa juga, Pak.

906. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:13]

Ada, Yang Mulia.

907. KETUA: SALDI ISRA [01:38:14]

Apa komunikasinya?

908. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:16]

Jadi, kita menyampaikan surat kaitan dari masa pencalon[sic!], kita selalu berkoordinasi kaitan keabsahan syarat calon.

909. KETUA: SALDI ISRA [01:38:25]

Ya.

910. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:26]

Jadi, tertanggal 19 September itu, kita menyampaikan ... imbaukan kepada KPU untuk memperhatikan apabila ada masukan atau tanggapan permasya ... masyarakat, maka itu segera dilakukan klarifikasi dan ditangga (...)

911. KETUA: SALDI ISRA [01:38:41]

Menurut Bawaslu, ada enggak tanggapan masyarakat terkait dengan ijazah ini?

912. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:45]

Untuk ... sampai ... dari informasi dari teman-teman KPU, ada.

913. KETUA: SALDI ISRA [01:38:50]

Ada?

914. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:50]

Ada.

915. KETUA: SALDI ISRA [01:38:51]

Oke.

916. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:52]

Yang kemudian (...)

917. KETUA: SALDI ISRA [01:38:53]

Yang ke Bawaslu, enggak ada?

918. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:38:55]

Tidak ada.

919. KETUA: SALDI ISRA [01:38:55]

Oke. Apa lagi, Pak? Politik uang pasangan calon itu, bagaimana Bapak menjelaskannya?

920. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:39:02]

Baik. Untuk politik uang, tidak ada laporan dari Pemohon.

921. KETUA: SALDI ISRA [01:38:07]

Ya.

922. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:39:08]

Tapi ada laporan dari masyarakat.

923. KETUA: SALDI ISRA [01:39:13]

Apa tindakan Bawaslu?

924. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:39:14]

Baik. Bahwa pada ... bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan

Nomor 2 dan seterusnya, tertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 17 September 2024, pelapor atas nama Endang Sidin, mengetahui terdapat postingan di akun Facebook atas nama Hendrik Gely, Alfredo Silvawan[sic!] Mesah, dan Sobat Paulus Henuk di Grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi berupa "Ita Esa Menyenggarakan Sayembara Tangkap Pelaku Politik Uang" dengan hadiah Rp10.000.000,00.

925. KETUA: SALDI ISRA [01:39:55]

Ada enggak yang dapat hadiahnya, Pak?

926. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:39:57]

Enggak ada.

927. KETUA: SALDI ISRA [01:39:57]

Oh, enggak ada. Berarti enggak ada politik uang, ya?

928. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:39:59]

Ya, siap.

929. KETUA: SALDI ISRA [01:40:00]

Kan itu kesimpulanya.

930. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:40:01]

Jadi ... siap. Dari hasil kajian kita bahwa tidak ada ... tidak terpenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pemiluan ... pemilihan dan laporan ini telah melewati syarat formal itu telah melewati 7 hari sejak diketahui.

931. KETUA: SALDI ISRA [01:40:18]

Kapan diketahui ini, Pak?

932. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:40:19]

Itu dilapor ... diketahui tanggal 17 September.

933. KETUA: SALDI ISRA [01:40:23]

17 September (...)

934. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:40:24]

Dilaporkan di tanggal 25.

935. KETUA: SALDI ISRA [01:40:27]

25 September?

936. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:40:28]

Siap.

937. KETUA: SALDI ISRA [01:40:28]

Berarti kan cuman 8 hari, lebih-lebih sedikit, Bapak toleransi saja.
Lanjut.

938. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:40:33]

Jadi, kemudian hasil pembahasan kami itu kemudian dihentikan dan tidak diregistrasi. Terima kasih.

939. KETUA: SALDI ISRA [01:40:41]

Oke. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan, tambahkan?

940. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:40:45]

Pas.

941. KETUA: SALDI ISRA [01:40:47]

kalau pas itu, Pak, kalau orang main domino pas itu ... apa ... tidak turun, Pak. Tuh kalo orang main gapple ya, Pak, ya. Pas katanya kan, padahal kalau pas itu kan lewat, ini pas malahan tidak lewat. Cukup, ya Bawaslu, ya?

942. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:41:04]

Ya, baik (...)

943. KETUA: SALDI ISRA [01:41:05]

Terima kasih.

944. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:41:05]

Terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

945. KETUA: SALDI ISRA [01:41:08]

Walaikumsalam. wr.wb.

Ini kalau suasana tegang semua, enggak jadi-jadi selesai kita. Hidup ini akan berat sekali. Jadi, kalau kita gagal tahun periode dari sekarang, ulang lagi periode depan. Nah, kayak Donald Trump kan, gagal ulang berhasil. Enggak apa-apa, yang namanya tahun politik kan ada tahun naik, tahun turun begitu. Nah, tapi karena ada forum untuk mempertanyakan keraguan kita, datang ke sini, nanti diselesaikan. Nanti kan semuanya ini ketemu lagi, salaman-salaman begitu dan segala macamnya, selesai masalah itu. Nah, itu hebatnya orang kita. enggak kayak Donald Trump, dia kalah 2020, masih dia anggap dia menang sampai Pemilu 2024. Nah, kalau orang kita enggak, ya kalah-kalah, nanti diulang lagi begitu. Kalah, diulang lagi begitu.

Berikut Tulang Bawang. Silakan KPU.

946. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:42:57]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

947. KETUA: SALDI ISRA [01:43:02]

Walaikumsalam.

948. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:43:02]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Rozali Umar (...)

949. KETUA: SALDI ISRA [01:43:10]

Ya.

950. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:43:10]

Kuasa Hukum KPU Tulang Bawang. Saya hadir bersama Prinsipal Ketua KPU setempat, Bung Perwira. Kalau di tengah, saya (...)

951. KETUA: SALDI ISRA [01:43:20]

Perwira menengah, Perwira tinggi?

952. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:43:22]

Udah pensiun kayaknya Perwira. Makanya jadi Komesioner, Yang Mulia. Kalau yang tengah enggak perlu saya perkenalkan, Yang Mulia. se-Indonesia sudah kenal, Yang Mulia.

953. KETUA: SALDI ISRA [01:43:31]

Ya.

954. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:43:31]

Bercanda, Yang Mulia.

955. KETUA: SALDI ISRA [01:43:32]

Salah Bapak kalau memperkenalkan ke saya. Lanjut, Pak.

956. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:43:35]

Baik, Yang Mulia.

Dalam jawaban kami Perkara 48, kami hanya akan membacakan atau menarasikan hal-hal yang paling terpenting.

957. KETUA: SALDI ISRA [01:43:48]

Ya.

958. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:43:48]

Dalam jawaban ini juga kami menghadirkan Bukti T-1 sampai dengan T-30 (...)

959. KETUA: SALDI ISRA [01:43:55]

Oke.

960. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:43:55]

Untuk memperkuat dalil kami.

961. KETUA: SALDI ISRA [01:43:56]

Apa hal-hal (...)

962. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:43:56]

Untuk eksepsi (...)

963. KETUA: SALDI ISRA [01:43:57]

Yang penting yang mau Bapak sampaikan (...)

964. BAWASLU: HASAN SUWARI SELOLONG [01:43:58]

Ya.

965. KETUA: SALDI ISRA [01:43:59]

Eksepsinya dianggap dibacakan, Pak, ya.

966. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:44:00]

Ya, tapi khusus untuk yang Kedudukan Pemohon, kami hanya ingin menegaskan tentang ... di halaman 7, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [01:44:09]

Ya.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:44:09]

Bahwa itu melebihi ambang batas suara, karena sesungguhnya selisih suara Pemohon dengan suara tidak sah itu 22,04%.

969. KETUA: SALDI ISRA [01:44:17]

Ya.

970. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:44:17]

Jadi lebih dari 1,5%.

971. KETUA: SALDI ISRA [01:44:20]

Ini selisihannya berapa, Pak?

972. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:44:21]

Di halaman 7 jawaban kami, selisihnya 22,04%, lebih dari 1,5%, Yang Mulia.

973. KETUA: SALDI ISRA [01:44:28]

Oke lanjut, Pak.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:44:29]

Ya. Di obscur libel, kami menegaskan, Pemohon menganggap dirugikan karena undangan pemilih telah dibagikan, tapi tidak dijelaskan detail, apa yang ... ha ... dia rugi ... fakta-fakta yang dia bentuk nyata kerugian Pemohon itu. Juga mendalilkan tentang TSM, tetapi tidak menguraikan detail di mana, kapan, dan seterusnya, Yang Mulia.

975. KETUA: SALDI ISRA [01:44:54]

Oke.

976. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:44:55]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Izin kami dari halaman ... maaf, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [01:45:04]

Ya.

978. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:45:05]

Dari halaman 8 sampai halaman 14 itu, menguraikan tentang tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU dan puncaknya adalah rekapitulasi suara.

Dan di halaman 14 poin 15 itu, ada kejadian khusus, Yang Mulia, tapi tidak tentang perolehan suara, melainkan terjadi salah penulisan di 3 kecamatan ... maaf, di 4 kecamatan. Dan (...)

979. KETUA: SALDI ISRA [01:45:35]

Ya.

980. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:45:36]

Yang kejadian kelimanya adalah Paslon ... Saksi Paslon Nomor Urut 3 Pemohon dalam perkara ini, itu tidak bersedia menandatangani dengan alasan dilarang oleh Paslon.

981. KETUA: SALDI ISRA [01:45:51]

Oke.

982. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:45:52]

Cuma itu.

983. KETUA: SALDI ISRA [01:45:53]

Apa lagi, Pak? Itu ditulis enggak di ... apanya ... surat keberatannya?

984. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:46:57]

Ada, Yang Mulia, kami lampirkan (...)

985. KETUA: SALDI ISRA [01:46:59]

Yang ... yang menyebut bahwa dilarang itu?

986. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:00]

Di Bukti T-23. Ada, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [01:47:01]

Itu disebut?

988. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:02]

Ditulis, ya, di dalam keja ... di Bukti T-23, ada, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [01:47:07]

Oke.

990. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:07]

Kemudian di ... kami langsung ... terhadap kejadian khusus itu, langsung segera ditindaklanjuti hari itu juga, Mulia, direnvoi yang salah tulis, salah tulis itu.

991. KETUA: SALDI ISRA [01:47:18]

Direnvoinya di tingkat?

992. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:20]

Ya, karena itu di tingkat keca ... kabupaten ada kesalahan penulisan, langsung pada hari itu juga.

993. KETUA: SALDI ISRA [01:47:26]

Sudah direnvoi?

994. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:27]

Sudah.

995. KETUA: SALDI ISRA [01:47:28]

Diketahui semua saksi?

996. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:29]

Ya.

997. KETUA: SALDI ISRA [01:47:30]

Saksi menerima?

998. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:31]

Ya, kecuali yang 02, ya ... ya ...yang Pemohon, Yang Mulia.

999. KETUA: SALDI ISRA [01:47:35]

Kecuali Pemohon?

1000. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:35]

Ya.

1001. KETUA: SALDI ISRA [01:47:36]

Kalau di kecamatan, berapa Kecamatan Tulang Bawang, Pak?

1002. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:38]

15 kecamatan, Yang Mulia.

1003. KETUA: SALDI ISRA [01:47:40]

Dari 15 kecamatan, berapa yang tidak ditandatangani oleh kua ...
kuasa apa ... Saksi Pemohon?

1004. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:45]

Semua menandatangani, Yang Mulia.

1005. KETUA: SALDI ISRA [01:47:46]

Dari 15 kecamatan, ya?

1006. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:48]

Ya. Di Tingkat keca ... TPS[sic!], semua menandatangani, Yang
Mulia.

1007. KETUA: SALDI ISRA [01:47:52]

Berapa jumlah TPS-nya, Pak?

1008. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:47:54]

300 ... maaf, 669 TPS reguler dan 1 TPS khusus di Lapas
Menggala.

1009. KETUA: SALDI ISRA [01:87:03]

Jadi, 60?

1010. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:04]

669 TPS reguler.

1011. KETUA: SALDI ISRA [01:48:07]

670 totalnya, Pak, ya?

1012. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:09]

Ya, Yang Mulia.

1013. KETUA: SALDI ISRA [01:48:09]

Semua saksi tanda tangan, ya?

1014. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:11]

Ya. Ya.

1015. KETUA: SALDI ISRA [01:48:13]

Ya. Betul, KPU?

1016. TERMOHON: PERWIRA [01:48:14]

Betul, Ketua.

1017. KETUA: SALDI ISRA [01:48:15]

Oke, lanjut. Apa yang mau Bapak sampaikan lagi ke kita?

1018. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:17]

Terkait TPS itu, kami jadikan di Bukti T-12, Yang Mulia.

1019. KETUA: SALDI ISRA [01:48:04] [01:48:21]

Oke. Sekarang ini yang keterlibatan pejabat bupati itu.

1020. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:27]

Ya, baik, Yang Mulia. Kami memban .. menanggapi beberapa hal yang menurut kami paling urgent dan terkait dengan Tupoksi KPU.

1021. KETUA: SALDI ISRA [01:48:36]

Ya.

1022. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:36]

Di halaman 15, Yang Mulia.

1023. KETUA: SALDI ISRA [01:48:38]

Ya.

1024. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:39]

Poin 19, bantahan dan tanggapan terhadap dugaan TSM, kami menegaskan, pertama, di rekapitulasi suara, Pemohon tidak menyampaikan hal kejadian khusus atau keberatan yang berkaitan dengan pelanggan TSM. Tadi sudah kami jelaskan kejadian khusus di tingkat kabupaten itu.

Kemudian kedua, yang kami ketahui harus koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu tidak ada laporan dari Pemohon terkait dugaan TSM tersebut.

1025. KETUA: SALDI ISRA [01:48:06]

Oke.

1026. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:06]

Kemudian, bantahan masih ... di poin 20, bantahan mengenai keterlambat pembagian undangan Pemilih. Kami jelaskan bahwa sudah maksimal, itu hanya persoalan teknis, tidak terdistribusikan, dan Pemohon tentunya ingat bahwa membawa KTP pun boleh untuk memilih.

Dan ini kami dalilkan, Yang Mulia, di halaman 16 dan 17.

1027. KETUA: SALDI ISRA [01:48:32]

Oke.

1028. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:48:32]

Beserta buktinya. Kemudian, Yang Mulia, di halaman 18, di poin 24, kami membantah tentang indikasi kertas suara telah tercablos karena fakta sebenarnya, Yang Mulia, saat itu terjadi proses pengepakan

di gudang logistik yang berada di Aula Pemkab Tulang Bawang. Kemudian, atas imbauan lisan dari Bawaslu, KPU mengikuti untuk dipindahkan ke yang lebih representatif di Aula KPU, dan itu disaksikan bersama, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [01:49:04]

Oke.

1030. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:49:06]

Gitu. Dan Termohon juga, kami sudah menyurati ke Bawaslu tentang bahwa imbauan di sana itu sudah ditindaklanjuti. dan itu kami jadikan bukti, Yang Mulia, di Bukti T-28 dan T-29.

Di halaman 19, Yang Mulia, kami ... ini tentang indikasi Ketua KPU Tulang Bawang mendukung Paslon Nomor Urut 2. Saya jelaskan dulu, Yang Mulia.

1031. KETUA: SALDI ISRA [01:49:29]

Siapa ketuanya, Bapak?

1032. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:49:30]

Yang dimaksud (...)

1033. KETUA: SALDI ISRA [01:49:30]

Ketuanya mana?

1034. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:49:31]

Yang dimaksud bukan Perwira, Yang Mulia.

1035. KETUA: SALDI ISRA [01:49:33]

Ya.

1036. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:49:31]

Tapi Ketua KPU yang periode sebelumnya, 2024, maaf ... 2019-2024, atas nama Feriyanto.

1037. KETUA: SALDI ISRA [01:49:43]

Tapi itu memang mendukung pasangan calon, ya?

1038. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:49:45]

Ya, jadi bukan Perwira yang pensiun ini.

1039. KETUA: SALDI ISRA [01:49:48]

Oke.

1040. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:49:48]

Ya, Jadi intinya kami sudah melakukan inzage, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [01:49:52]

Ya.

1042. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:49:52]

Bukti itu menurut kami tidak berdasar secara hukum, karena hanya berupa screenshot WhatsApp yang tidak jelas.

1043. KETUA: SALDI ISRA [01:50:02]

Oke.

1044. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:50:02]

Dan Feriyanto pun sudah kami konfirmasi dan dia membuat pernyataan bahwa tidak benar dia mendukung Paslon 02 ataupun paslon lain (...)

1045. KETUA: SALDI ISRA [01:50:11]

Ini Feriyanto ketua yang sebelumnya?

1046. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:50:13]

Ya, yang sudah 2 periode tidak terpilih lagi, Yang Mulia.

1047. KETUA: SALDI ISRA [01:50:17]

Ya, 2 periode sudah cukup, Pak.

1048. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:50:19]

Cukup ya, Yang Mulia.

1049. KETUA: SALDI ISRA [01:50:20]

Lanjut!

1050. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:50:21]

Baik, Yang Mulia.

Di poin 20, kami membuat kesimpulan dari dalil kami itu, intinya adalah Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Dalil Pemohon (...)

1051. KETUA: SALDI ISRA [01:50:31]

Enggak usah kesimpulan. Langsung ke Petitum, Pak!

1052. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [01:50:33]

Baik, untuk Petitum, karena Perwira hadir.

1053. KETUA: SALDI ISRA [01:50:36]

Ya. Silakan!

1054. TERMOHON: PERWIRA [01:50:38]

Siap, izin, Yang Mulia.

1055. KETUA: SALDI ISRA [01:50:40]

Ya.

1056. TERMOHON: PERWIRA [01:50:40]

Membaca Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 100[*sic!*]355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tulang Bawang Tahun 2024 pada tanggal 3 Desember tahun 2024.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemili ... pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 yang benar adalah ... sudah dianggap dibacakan.

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian jawaban Termohon disampaikan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

1057. KETUA: SALDI ISRA [01:51:41]

Terima kasih.
Pihak Terkait.

1058. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:51:44]

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Pihak Terkait memberi keterangan sebagai berikut. Untuk Eksepsi.

Untuk Kewenangan, dianggap dibacakan.

1059. KETUA: SALDI ISRA [01:52:04]

Ya.

1060. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:52:06]

Untuk Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

Untuk Permohonan Pemohon yang tidak jelas, kami sampaikan.

1061. KETUA: SALDI ISRA [01:52:12]

Ya.

1062. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:52:13]

Bahwa alasan Permohon[sic!] yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sedangkan

berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Acara ber ... Beracara Persidangan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memuat uraian yang jelas mengenai hal tersebut.

Yang kedua, bahwa salah satu hal yang dimohonkan Petitem Pemohon adalah pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini berarti telah terjadi hal-hal yang dapat dijadikan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara ulang di Kabupaten Tulang Bawang. Namun dalam dalil Pemohon, hanya menyebutkan TPS 6 dan TPS 12 di kese ... di Kelurahan Menggala Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan TPS 5 Kabupaten[sic!] Ringin Sari, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

Yang ketiga, bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan keterlibatan Pasangan Dr ... Drs. Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Pihak Terkait dalam pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, melainkan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh individu secara pribadi dan tidak terkait secara struktur kepada Pihak Terkait maupun tim pemenangannya, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Dan individu ... individu yang melakukan pelanggaran tersebut telah diproses lembaga berwenang dan dinyatakan tidak terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya laporan atau putusan di lembaga manapun yang menyatakan pasangan calon Pihak Terkait telah melanggar pemilihan umum kepa ... kepala daerah.

Yang keempat, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Selanjutnya Pokok Permohonan.

1063. KETUA: SALDI ISRA [01:54:13]

Ya.

1064. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:52:16]

Yang pertama adalah bahwa adapun pelanggaran dalil Pemohon ... Pemohon yang menyebutkan keterlibatan ASN dilakukan oleh perorangan pribadi dan laporan yang didalihkan, tidak ada panggilan kepada Pihak Terkait atas laporan-laporan tersebut.

Terus, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, bukanlah keberatan terkait pelanggaran struktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang didalikan pada angka 5 Dalil Pokok Permohonannya,

melainkan hanyalah peristiwa tidak bersedianya Saksi Pemohon menandatangani berita acara serti ... sertifikat rekapulasi hasil perhitungan suara, dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dida ...dalam Form Kejadian Khusus dan Keberatan Model.D Kejadian Khusus, tanpa menyebutkan alasan secara jelas, itu di Bukti P-5.

1065. KETUA: SALDI ISRA [01:55:02]

Oke.

1066. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:55:03]

Lanjut, untuk struktur.

Yang kelima, bahwa keterangan Pihak Terkait tentang dalil Pemohon mengenai pelanggaran struktur, sistematis, dan masif.

Yang pertama adalah terkait dengan terstruktur, bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan ASN (ucapan tidak terdengar jelas) calon, baik sebagai tim pemenangan, tim kampanye, relawan atau pelaksana kampanye, dan Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan keuntungan, (Bukti P ... PT-6).

Selanjutnya, bahwa masa jabatan Pihak Terkait sebagai Pejabat Bupati Tulang Bawang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pemilihan kepala daerah, itu terjadi sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dimulai, dan sepenuhnya berada dalam ranah administrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, tidak ada ... oleh karena itu, masa jabatan beliau sebagai pejabat (ucapan tidak terdengar jelas) tidak dapat dijadikan dasar untuk atau pelaksanaan proses Pilkada Tahun 2024. Selanjutnya, berkaitan dengan pelantikan Pj bupati.

1067. KETUA: SALDI ISRA [01:56:11]

Lanjut! Pak, enggak usah hidupin HP di ruangan, Pak, ya. Lanjut!

1068. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:56:19]

Ya. Untuk pelantikan Pj bupati setelah Pihak Terkait mengundurkan diri, yaitu melalui ... yang dikeluarkan oleh menteri adalah murni kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri tidak terkait dengan proses pencalonan Pihak Terkait sebagai calon bupati karena adanya kekosongan, maka dilantiknya Ir. Ferry[sic!] jadi Pj bupati.

Dalam hal ini tidak ada keuntungan dalam peraturan menghubungkan antara pencalonan kepala daerah dan pengangkatan Pj bupati. Oleh karena itu, dalil Pemohon mencoba mengaitkan pelantikan Pj bupati dengan konstitusi politik Pihak Terkait adalah tidak dasar dan tidak relevan dengan pokok perkara. Terus selanjutnya tentang pengangkatan sekerta ... Pj ... Pj ... Pj sekda.

1069. KETUA: SALDI ISRA [01:57:06]

Ya.

1070. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:07]

Bahwa tidak ada keterkaitan dengan proses berkaitan penunjukkan ini sebagai pejabat sekretaris daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintah daerah bukan dalam rangka pencalonan (...)

1071. KETUA: SALDI ISRA [01:57:15]

Ada hubungan family enggak, dengan (...)

1072. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:18]

Ada. Ada, Yang Mulia.

1073. KETUA: SALDI ISRA [01:57:19]

Apa hubungannya?

1074. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:21]

Adik kandung dari wakil.

1075. KETUA: SALDI ISRA [01:57:23]

Oh, adik kandung dari wakil, itu yang dijadikan sekda?

1076. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:27]

Ya, sekda.

1077. KETUA: SALDI ISRA [01:57:28]

Yang angkatnya siapa?

**1078. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:30]**

Yang angkatnya Pj bupati yang baru Firli[sic!].

1079. KETUA: SALDI ISRA [01:57:33]

Kalau Pj bupati itu pejabat dari mana?

**1080. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:36]**

Pj bupati?

1081. KETUA: SALDI ISRA [01:57:37]

Ya.

**1082. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:39]**

Dari pemerintah.

1083. KETUA: SALDI ISRA [01:57:40]

Ya, pemerintah saya tahu. Apa jabatannya sebelumnya, sebelum jadi (...)

**1084. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:44]**

Sekda, sekda sebelumnya.

1085. KETUA: SALDI ISRA [01:57:46]

Berarti ini masih di tulang bawang, ya?

1086. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:47]

Ya.

1087. KETUA: SALDI ISRA [01:57:49]

Itu sekiranya itu yang jadi Pj itu sebelumnya adalah sekja[sic!]
(...)

1088. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:52]

Sekda.

1089. KETUA: SALDI ISRA [01:57:53]

Sekda dari ... apa ...

1090. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:55]

Pak Qodrotul[sic!] Ikhwan.

1091. KETUA: SALDI ISRA [01:57:56]

Ya, yang sekarang jadi Pihak Terkait?

1092. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:57:59]

Pihak Terkait.

1093. KETUA: SALDI ISRA [01:58:00]

Oke, lanjut. Kalau dihubung-hubungkan ada hubungannya, masa enggak ada hubungannya. Jangan dibantah semua, enggak ada hubungan sama sekali itu ndak masuk akal juga, ya. Tapi awal-awal itu dia bekerja untuk pemenangan, nah itu yang harus dijelaskan.

1094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:58:23]

Ya.

1095. KETUA: SALDI ISRA [01:58:24]

Apa lagi yang mau disampaikan?

1096. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:58:25]

Selanjutnya mengenai honorer.

1097. KETUA: SALDI ISRA [01:58:26]

Ya.

1098. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:58:27]

Honorer itu bukan dari, beliau bukan termasuk tim pemenang, dan juga bukan terkait dengan ASN karena dia honorer, maka itu perbuatan itu adalah perbuatan pribadi, Yang Mulia.

1099. KETUA: SALDI ISRA [01:58:40]

Ya.

1100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:58:41]

Bukan termasuk tim pemenang.

1101. KETUA: SALDI ISRA [01:58:44]

Apa lagi yang mau dijelaskan?

1102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:58:46]

Terus berkait dengan (...)

1103. KETUA: SALDI ISRA [01:58:55]

Langsung Petitem, ya.

1104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:58:57]

Ya, Petitem.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 103[sic!] ... 1355 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 00.00 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait, ditandatangani.

1105. KETUA: SALDI ISRA [01:59:39]

Oke, terima kasih. Cukup, dimatikan mik-nya.
Bawaslu Tulang Bawang, silakan.

1106. BAWASLU: DESI TRYANA [01:59:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

1107. KETUA: SALDI ISRA [01:59:53]

Walaikumsalam.

1108. BAWASLU: DESI TRYANA [01:59:55]

Saya Desi dan rekan saya akan memberikan keterangan Kabupaten Tulang Bawang, terhadap Perkara Nomor 48, dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3, Hendriwansyah dan Danial Anwar.

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:00:14]

Ya.

1110. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:00:14]

Izin menyampaikan, Yang Mulia.

Dalil yang pertama, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap perolehan hasil suara Pemohon, angka 1 sampai 4, halaman 10. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:00:33]

Apa inti keberatannya, Bu? Enggak usah dibacakan.

1112. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:00:40]

Tidak ada (...)

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:00:40]

Tidak mau tanda tangan?

1114. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:00:43]

Ya.

1115. KETUA: SALDI ISRA [02:00:45]

Di tingkat kabupaten? Karena apa?

1116. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:00:46]

Pada saat Pleno, Saksi dari Pasangan Calon Nomor 3, tidak mau tanda tangan dikarenakan ada instruksi dari Pasangan Calon Nomor 3, Yang Mulia.

1117. KETUA: SALDI ISRA [02:00:59]

Oke, poin kedua apa, Bu?

1118. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:00:59]

Dalil yang kedua, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan ASN Kabupaten Tulang Bawang, mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui postingan media sosial, angka 6 huruf a, angka 1, angka 8 sampai 9 huruf ... halaman 12, angka 12

sampai dengan 13 halaman 14, dan seterusnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1119. KETUA: SALDI ISRA [02:01:33]

Oke, memang ada laporan, Bu? Yang terkait dengan ini, ada laporan atau tidak?

1120. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:01:42]

Ada pelimpahan informasi dari Bawaslu Provinsi Lampung kepada Bawaslu (...)

1121. KETUA: SALDI ISRA [02:01:45]

Pelimpahan (...)

1122. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:01:45]

Kabupaten Tulang Bawang.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:01:47]

Berapa jumlah pelimpahannya, Bu?

1124. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:01:53]

Satu, Pak ... satu, Yang Mulia.

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:01:55]

Satu. Kemudian setelah itu (...)

1126. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:01:57]

Ini terkait ketidaknetralan Pj Sekda Kabupaten Tulang Bawang.

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:01:55]

Apa hasilnya, Bu, setelah Ibu lakukan pendalaman?

1128. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:02:03]

Hasilnya, statusnya itu laporan Formulir Model A-17 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan dihentikan. Ada vide Bukti PK-85-5[sic!], Yang Mulia. Sudah (...)

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:02:15]

Oke.

1130. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:02:18]

Kami sampaikan.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:02:22]

Tidak terbukti, ya?

1132. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:02:23]

Ya, Yang Mulia.

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:02:25]

Apa lagi, Bu?

1134. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:02:24]

Dalil yang ketiga, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang dan program yang dilakukan oleh Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa pemilihan.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:02:59]

Jadi ini tidak ada laporan yang berkenaan dengan ini, ya?

1136. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:02:58]

Ya, Yang Mulia.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:03:01]

Termasuk dari Pemohon sendiri?

1138. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:03:02]

Ya, Yang Mulia.

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:03:05]

Oke, lanjut!

1140. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:03:08]

Dalil yang keempat, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan ASN Kabupaten Tulang Bawang, mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, itu ada di angka 12 sampai 14, halaman 14 (...)

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:03:22]

Ya.

1142. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:03:25]

Angka 14, dan seterusnya.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pelapor atas nama Alip Basuki, melaporkan atas nama Riduansyah, terkait dugaan Aparatur Sipil Negara. Ini ada di vide (...)

1143. KETUA: SALDI ISRA [02:03:51]

Riduansyah ini siapa, Bu?

1144. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:03:52]

Ya, Yang Mulia?

1145. KETUA: SALDI ISRA [02:03:54]

Riduansyah ini siapa?

1146. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:03:55]

Riduansyah ini ASN, Yang Mulia.

1147. KETUA: SALDI ISRA [02:03:55]

ASN, apa jabatannya?

1148. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:03:56]

Jabatannya itu, beliau ini ada di (...)

1149. KETUA: SALDI ISRA [02:04:04]

Kepala dinas, kepala badan (...)

1150. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:04:06]

UPT.

1151. KETUA: SALDI ISRA [02:04:08]

UPT apa, Bu?

1152. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:04:10]

Dinas Pekerjaan Umum di Dente Teladas, Yang Mulia, Kecamatan Dente Teladas.

1153. KETUA: SALDI ISRA [02:04:15]

Oke, pegawai biasa atau kepalanya?

1154. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:04:17]

Biasa, Yang Mulia.

1155. KETUA: SALDI ISRA [02:04:18]

Oke.

1156. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:04:19]

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi Nomor 119 dianggap dibacakan (...)

1157. KETUA: SALDI ISRA [02:04:27]

Ya.

1158. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:04:27]

Tanggal 21 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokok dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Riduansyah, untuk ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada di vide PK-8513[sic!], Yang Mulia (...)

1159. KETUA: SALDI ISRA [02:04:51]

Riduansyah ini, memang terbukti di ... oleh Bawaslu bahwa tidak netral?

1160. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:04:56]

Ya, Yang Mulia.

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:04:57]

Oke.

1162. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:04:57]

Selanjutnya, selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Bupati Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor B-557 dianggap dibacakan, pada tanggal 3 Desember 2024 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Riduansyah, S.P., M.M., (vide Bukti ada di PK-8.5-14), Yang Mulia.

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:05:32]

Oke. Terus berikutnya, Bu!

1164. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:05:35]

Siap, Yang Mulia.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:05:34]

Halaman sebelas itu?

1166. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:05:37]

Dalil yang kelima (...)

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:05:39]

Ya.

1168. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:05:40]

Bah ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan temuan Bawaslu terhadap keterlibatan kepala kampung mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, di angka 53, halaman 30 (...)

1169. KETUA: SALDI ISRA [02:05:55]

Ya.

1170. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:05:55]

Itu tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, menemukan dugaan pelanggaran tanggal 7 Oktober 2024, dugaan ketidaknetralan Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, selanjutnya diteruskan kepada Pj Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada di vid ... vide Bukti PK-8.5-21, Yang Mulia.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:06:31]

Apa tindak lanjut Pj Bupati, Bu?

1172. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:06:34]

Gimana, Yang Mulia?

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:06:34]

Tindak lanjut Pj Bupati (...)

1174. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:06:35]

Ya, siap.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:06:35]

Penanganannya apa?

1176. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:06:36]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut yang pada pokoknya Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Nomor B-548 dianggap dibacakan (...)

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:06:56]

Ya.

1178. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:06:57]

Tanggal 19 November 2024, menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung atas nama Tobing Aprizal, S.H., (vide Bukti PK-8.5-22), Yang Mulia.

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:07:19]

Oke, setelah diberi peringatan lisan, si Tobing ini masih melakukan pelanggaran, enggak?

1180. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:25]

Tidak, Yang Mulia.

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:07:26]

Oke, Ibu bisa pastikan?

1182. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:29]

Tidak ada laporan ataupun (...)

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:07:28]

Ah, oke (...)

1184. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:28]

Temuan yang kami (...)

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:07:28]

Tidak ada (...)

1186. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:28]

Terima, Yang Mulia.

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:07:33]

Jadi, kalau tidak ada laporan berarti tidak ada masalah lagi, ya?

1188. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:35]

Siap, Yang Mulia.

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:07:36]

Oke, lanjut, Bu.

1190. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:37]

Izin, Yang Mulia.

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:07:37]

Ya.

1192. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:37]

Untuk selanjutnya agar dibacakan oleh rekan saya (...)

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:07:41]

Ya.

1194. BAWASLU: DESI TRIYANA [02:07:41]

Pak Inda Fiska.

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:07:43]

Pak Inda, silakan!

1196. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:07:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:07:48]

Ya.

1198. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:07:49]

Izin melanjutkan.

Dalil 6. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi politik uang yang digunakan sebagai salah satu strategi untuk memperoleh suara.

1199. KETUA: SALDI ISRA [02:08:00]

Ya.

1200. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:01]

Tertuang pada 26, halaman 21 sampai pada dua puluh ... halaman 24. Terhadap ... terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

1201. KETUA: SALDI ISRA [02:08:12]

Ada laporannya? Berkenaan dengan ini?

1202. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:14]

Siap, Yang Mulia.

1203. KETUA: SALDI ISRA [02:08:15]

Ada laporan?

1204. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:16]

Ada. 1 temuan, 3 laporan, Yang Mulia.

1205. KETUA: SALDI ISRA [02:08:19]

Apa hasilnya?

1206. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:20]

Hasilnya, keseluruhan dihentikan pada proses Gakkumdu, Yang Mulia.

1207. KETUA: SALDI ISRA [02:08:28]

1 temuan, 3 laporan.

1208. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:29]

Ya.

1209. KETUA: SALDI ISRA [02:08:30]

Dihentikan karena apa? Tidak cukup bukti.

1210. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:33]

02. Dihentikan, ada yang pada bahwa ... temuan untuk Nomor nol ...
Selanjutnya.

1211. KETUA: SALDI ISRA [02:08:44]

Ya.

1212. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:44]

Tanggal 29 November 2024, pada pokoknya terhadap ... terdapat pembagian amplop putih berisi uang sejumlah pecahan Rp50.000,00.

1213. KETUA: SALDI ISRA [02:08:57]

Ya.

1214. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:58]

Yang dilakukan oleh ... atas nama Sunardi dan Suwandi.

1215. KETUA: SALDI ISRA [02:09:02]

Ya.

1216. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:09:03]

Untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Qudratul Ikhwan BY, M.M., dan seterusnya.

1217. KETUA: SALDI ISRA [02:0:12]

Ya.

1218. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:09:12]

Itu ada di vide Bukti PK-28.

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Tulang Bawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A-17, tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya laporan Nomor 02 seterusnya, tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Sehingga status laporan dihentikan, vide Bukti PK-29.

1219. KETUA: SALDI ISRA [02:09:40]

Walaupun ada duit Rp50.000,00 dalam amplop putih tadi, ya?

1220. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:09:44]

Ya, Yang Mulia.

1221. KETUA: SALDI ISRA [02:08:46]

Oke. Kenapa itu dikatakan, tidak pelanggaran?

1222. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:09:50]

Materiil pada pembahasan pertama.

1223. KETUA: SALDI ISRA [02:09:55]

Ya.

1224. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:08:57]

Bahwa, menurut dari pembahasan Gakkumdu, penyidik Polres dan Jaksa, menyatakan tidak terbuktinya perbuatan materiil yang secara langsung dilakukan oleh yang terlapor.

1225. KETUA: SALDI ISRA [02:10:18]

Bawaslu, ikut saja?

1226. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:10:21]

Siap, Yang Mulia.

1227. KETUA: SALDI ISRA [02:10:22]

Sekali-sekali debat tuh, jaksa, polisi itu. Ini kan sudah ketangkap ini, "masa enggak ada?" Bilang. Kan ada sudah ditangkap tadi, kan? Yang Rp50.000,00 tadi, itu?

1228. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:10:36]

Izin, Yang Mulia. Menjelaskan.

1229. KETUA: SALDI ISRA [02:10:37]

Ya.

1230. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:10:37]

Bahwa pada peristiwa 02 tersebut.

1231. KETUA: SALDI ISRA [02:10:43]

Ya.

1232. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:10:44]

Bukan tertangkap tangan.

1233. KETUA: SALDI ISRA [02:120:46]

Ya.

1234. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:10:46]

Namun atas dasar laporan.

1235. KETUA: SALDI ISRA [02:10:49]

Oke.

1236. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:10:50]

Yang tidak ingin dilaporkan oleh pelapor, tetapi kami jadikan sebagai informasi awal.

1237. KETUA: SALDI ISRA [02:10:57]

Oke.

1238. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:10:57]

Bahwa ada pengakuan amplop Rp50.000,00 tersebut.

1239. KETUA: SALDI ISRA [02:11:04]

Berapa banyak amplopnya?

1240. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:07]

Ada 5, Yang Mulia.

1241. KETUA: SALDI ISRA [02:11:10]

5 amplop.

1242. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:11]

5 amplop.

1243. KETUA: SALDI ISRA [02:11:11]

Berarti Rp250.000,00?

1244. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:13]

Ya, Yang Mulia.

1245. KETUA: SALDI ISRA [02:11:13]

Untuk dibagikan ke 5 orang?

1246. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:16]

Sisa, Yang Mulia.

1247. KETUA: SALDI ISRA [02:11:17]

Oh, sisanya.

1248. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:17]

Menurut dari hasil (...)

1249. KETUA: SALDI ISRA [02:11:19]

Se ... berapa, dia pegang amplop? Anda tanya?

1250. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:21]

17 amplop.

1251. KETUA: SALDI ISRA [02:11:22]

17 amplop, berarti sudah dibagikan 12?

1252. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:25]

Ya, Yang Mulia.

1253. KETUA: SALDI ISRA [02:11:26]

Oke. Anda ndak jelaskan itu di Gakkumdu?

1254. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:31]

Sudah, bersama-sama, Yang Mulia, kami melakukan klarifikasi bersama-sama di Gakkumdu.

1255. KETUA: SALDI ISRA [02:11:38]

Oke. Itu orang yang tadi ... apa itu ... yang melaporkan ... yang tidak ingin melaporkan itu, dibawa enggak ke sana?

1256. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:45]

Menjadi (...)

1257. KETUA: SALDI ISRA [02:11:46]

Saksi?

1258. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:46]

Saksi, Yang Mulia.

1259. KETUA: SALDI ISRA [02:11:47]

Ada datang?

1260. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:48]

Ada.

1261. KETUA: SALDI ISRA [02:11:49]

Lalu, dikatakan apa? Dikatakan (...)

1262. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:51]

Tidak bisa juga menjelaskan, Yang Mulia, pada proses perbuatannya.

1263. KETUA: SALDI ISRA [02:08:55]

Oke.

1264. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:11:55]

Bahwa dia tidak menyaksikan secara langsung pada saat membagikan mendistribusikan, atau mempengaruhi pemilih yang pada saat disampaikan amplop tersebut, Yang Mulia.

1265. KETUA: SALDI ISRA [02:12:06]

Oke, lanjut ke poin 7, halaman 32.

Indikasi kesengajaan keterlambatan pemberian undangan pemungutan suara oleh KPU. Nah itu, apa yang bisa dijelaskan?

1266. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:12:23]

Sudah kami lakukan pengawasan, Yang Mulia. Bahwa sudah terdistribusi dan hasil pengawasan bahwa terhadap pendistribusian tersebut, ada beberapa yang tidak terdistribusi dengan catatan ada yang tidak ketemu, meninggal, dan sudah pindah.

1267. KETUA: SALDI ISRA [02:12:42]

Tapi sudah didistribusikan, ya?

1268. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:12:44]

Sudah.

1269. KETUA: SALDI ISRA [02:12:45]

Lalu laporan itu ditolak?

1270. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:12:50]

Tidak ada laporan, Yang Mulia.

1271. KETUA: SALDI ISRA [02:12:51]

Temuan?

1272. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:12:52]

Tidak juga ada temuan, Yang Mulia. Artiannya, hanya hasil pengawasan.

1273. KETUA: SALDI ISRA [02:12:57]

Oke.

1274. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:12:57]

Yang terdistribusi berapa, yang tidak terdistribusi berapa dengan alasan apa saja.

1275. KETUA: SALDI ISRA [02:13:03]

Nah ini, yang pencoblosan.

1276. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:13:05]

Baik, Yang Mulia.

1277. KETUA: SALDI ISRA [02:13:06]

(ucapan tidak terdengar dengan jelas) kertas suara telah dicoblos dengan coblosan di Pasangan Nomor 02. Apa yang bisa dijelaskan? Tidak ada laporan juga?

1278. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:13:15]

Baik, Yang Mulia. Pada pokok dalil tersebut tidak ada laporan secara resmi kepada kami.

1279. KETUA: SALDI ISRA [02:13:22]

Ya.

1280. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:13:23]

Bahwa ditemukan has ... pada tanggal 27 November terjadi pada salah coblos satu di TPS 12 dan TPS 6. Kemudian, ada di TPS 5 yang di 2 kecamatan, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Banjar Margo, Yang Mulia. Bahwa sudah ditindaklanjuti dengan mengganti dan sudah dicatat di dalam C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK. Begitu, Yang Mulia.

1281. KETUA: SALDI ISRA [02:13:57]

Oke. Memang ditemukan, ya? Yang sudah tercoblos, ya?

1282. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:14:03]

Salah coblos, Yang Mulia, izin meluruskan.

1283. KETUA: SALDI ISRA [02:14:05]

Oh salah coblos.

1284. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:14:05]

Salah coblos. Pada peristiwa, fakta yang terjadi adalah salah coblos.

1285. KETUA: SALDI ISRA [02:14:11]

Oke, apa lagi? Cukup?

1286. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:14:12]

Izin menjelaskan bahwa untuk yang telah tercoblos, Yang Mulia.

1287. KETUA: SALDI ISRA [02:14:17]

Ya.

1288. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:14:17]

Bahwa tidak ada fakta ditemukan telah tercoblos ataupun laporan yang secara resmi disampaikan kepada kami. Demikian, Yang Mulia.

1289. KETUA: SALDI ISRA [02:14:27]

Cukup, ya?

1290. BAWASLU: INDA FISKA MAHENDRO [02:14:27]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih hormat kami Bawaslu Tulang Bawang. Wassalamualaikum wr.wb.

1291. KETUA: SALDI ISRA [02:14:34]

Walaikumsalam wr.wb.

1292. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [02:14:36]

Yang Mulia, izin menambahkan.

1293. KETUA: SALDI ISRA [02:14:39]

Jatahnya, Bapak, sudah habis, Pak.

1294. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [02:14:42]

Enggak.

1295. KETUA: SALDI ISRA [02:14:44]

Enggak. Enggak boleh lagi, Pak.

1296. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [02:14:43]

Hanya menginformasikan poin 21.

1297. KETUA: SALDI ISRA [02:14:45]

Cukup, cukup.

1298. KUASA HUKUM TERMOHON: ROZALI [02:14:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

1299. KETUA: SALDI ISRA [02:14:46]

Ya. Tadi Bapak sudah dikasih waktu.
Sungai Penuh. Silakan! Ini sungainya penuh terus dan tidak pernah banjir di sini. Oke, silakan.
KPU Sungai Penuh.

1300. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:15:28]

Bismillah. KPU Sungai Penuh, Yang Mulia.

1301. KETUA: SALDI ISRA [02:15:51]

Silakan.

1302. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:15:51]

Izin. Bismillahirrahmaanirrahiim.
Perkenalkanlah saya Mohamad Ulin Nuha, Yang Mulia, dari Kuasa Hukum Hicon, bertindak untuk atas nama KPU Sungai Penuh, dalam hal ini saya didampingi oleh Kadiv Hukum Bapak Even.
Izin membacakan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 71. Berkaitan dengan Eksepsi, ada beberapa Eksepsi yang kita ajukan terkait Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1303. KETUA: SALDI ISRA [02:16:25]

Ya.

1304. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:16:26]

Langsung ke Pokok Perkara.
Termohon menjawab Permohonan awal, sebagaimana yang dibacakan pada Pemeriksaan Pendahuluan.

1305. KETUA: SALDI ISRA [02:16:35]

Ya.

1306. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:16:35]

Ada 2 isu yang dibacakan kemarin oleh Pemohon. Yang pertama adalah larangan kampanye di kecamatan Kumun Debai.

1307. KETUA: SALDI ISRA [02:16:43]

Ya, itu kenapa itu halnya?

1308. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:16:44]

Siap, izin (...)

1309. KETUA: SALDI ISRA [02:16:45]

Kampanye ... dilarang orang kampanye di Kecamatan Kumun Debai, itu.

1310. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:16:50]

Siap, izin, Yang Mulia.

1311. KETUA: SALDI ISRA [02:16:51]

Ya.

1312. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:16:51]

Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, tentang Kampanye, Termohon sudah memfasilitasi seluruh pasangan calon untuk kampanye

dalam bentuk rapat umum masing-masing 1 kali, sebagaimana dalam di halaman 12 poin d, Yang Mulia.

Terus kemudian, Termohon juga sudah memfasilitasi para pasangan calon kampanye dalam bentuk bahan kampanye, baik berupa selebgram, brosur, pamflet, dan poster masing-masing 500 eksemplar, yang mana dapat diperbanyak oleh pasangan calon sebanyak maksimal 100%.

Kemudian, Termohon juga sudah memfasilitasi kampanye dalam bentuk alat peraga kampanye. Kepada masing-masing calon diberikan reklame 2 buah, spanduk 1 buah per desa, umbul-umbul 4 buah per kecamatan, yang mana dapat diperbanyak oleh pasangan calon sebanyak maksimal 200%.

Selain itu, Termohon juga sudah memfasilitasi terkait rapat koordinasi berkaitan dengan massmedia, kampanye dalam bentuk massmedia. Selain itu, terdapat kampanye yang berupa pertemuan terbatas maupun pertemuan tatap muka atau dialog, yang mana kedua kampanye tersebut membutuhkan pemberitahuan kepada kepolisian dan tembusan kepada Termohon.

Namun, di Kecamatan Kumbun Debai, Termohon mendapatkan tembusan terkait kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sehingga tidak benar dalil Pemohon terkait adanya larangan kampanye di Kecamatan Kumun Debai.

1313. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:58]

Oke, cukup. Lanjut ke yang soal pelanggaran kampanye yang di Masjid Raya Rawang, oke.

1314. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:19:05]

Siap, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Sungai Penuh terkait dugaan pelanggaran kampanye tersebut, Yang Mulia.

1315. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:15]

Oke, lanjut. F tentang intimidasi saksi, benar?

1316. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:19:20]

Dalil Pemohon terkait intimidasi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk meminta sisa surat suara untuk dicoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 17 TPS, Kecamatan Kumun Debai, tidak benar, Yang Mulia. Karena Termohon sudah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS di

17 TPS tersebut, menyatakan tidak pernah ada intimidasi, pemaksaan maupun permintaan sisa surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 1.

1317. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:52]

Ini yang Buktinya T-6 sampai T-22, ya (...)

1318. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:19:56]

T-6 sampai T-22, Yang Mulia.

1319. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:57]

Oke.

1320. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:19:58]

Dari 17 TPS tersebut, Saksi Pemohon tanda tangan di 14 TPS, sementara 3 TPS lainnya, Saksi Pemohon pulang sebelum penghitungan surat suara dilakukan, Yang Mulia.

1321. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:14]

Jadi bukan keberatan, bukan ini, tapi pulang?

1322. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:20:17]

Pulang.

1323. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:18]

Oke.

1324. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:20:18]

Di 17 tersebut tidak pernah ada kejadian khusus maupun keberatan dari para saksi, Yang Mulia.

1325. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:25]

Oke, lanjut!
g. Dugaan intimidasi dan pengusiran saksi.

1326. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:20:35]

Ya, siap. Jadi, di rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 2 Desember 2024 Saksi Pemohon meminta dibukanya kotak suara dan mempertanyakan Model C.Daftar Hadir di setiap TPS, Yang Mulia, namun disanggah oleh pimpinan rekapitulasi.

1327. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:59]

Eenggak, ini minta dibuka kotak suara itu gimana ceritanya?

1328. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:21:01]

Tanpa adanya bukti, Yang Mulia, adanya mereka mendalilkan untuk membuka seluruh C.Daftar Hadir di tiap TPS, Yang Mulia.

1329. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:10]

Oke.

1330. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:21:11]

Namun, pada dasarnya berdasarkan PKPU 18 Tahun 2024 bahwasanya rekapitulasi tingkat kecamatan adalah penyandingan data dari saksi pasangan calon dan panwas kecamatan, Yang Mulia.

1331. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:22]

Oke.

1332. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:21:23]

Sehingga menurut rekomendasi dari panwascam, proses dilanjutkan untuk rekapitulasi. Namun, karena dari Saksi Pemohon terus menerus meminta dibuka Model C.Daftar Hadir (...)

1333. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:35]

Ya.

1334. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:21:35]

Oleh pimpinan rapat, sak ... salah satu saksi diminta keluar.

1335. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:41]

Ya.

1336. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:21:41]

Namun, saksi satunya masih mengikuti proses hanya untuk mengisi D.hasil (...)

1337. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:45]

Tanda tangan enggak, kemudian?

1338. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:21:46]

Hanya mengisi D.Kejadian Khusus, namun tidak tanda tangan, Yang Mulia.

1339. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:51]

Oh, tidak tanda tangan? Oke, lanjut yang rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (...)

1340. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:21:59]

Di tingkat (...)

1341. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:59]

Ini kan, mereka diklaim tidak mendapat keadilan?

1342. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:22:02]

Ya, di rekapitulasi tingkat kota, saksi Pemohon juga sama, masih ingin membuka C.Daftar Hadir, Yang Mulia.

1343. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:10]

Oke.

1344. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:22:11]

Namun kemudian tidak ditanggapi, hanya ditunjukkan saja lewat ... apa namanya ... monitor. Di situ kita ambil sampling, di TPS 2 Air Teluh.

1345. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:25]

Ya.

1346. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:22:25]

Memang benar ada tanda tangan Saksi Pemohon, Yang Mulia.

1347. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:29]

Ya.

1348. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:22:29]

Dan di tingkat kota tersebut Pasangan Calon Nomor 1, 3, 4, 5 tanda tangan kecuali Pasangan Calon Nomor 2 hanya mengisi kejadian khusus, Yang Mulia.

1349. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:41]

Oke, ya, terus? Cukup? Ada yang mau ditambahkan?

1350. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:22:47]

Cukup, Yang Mulia.

1351. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:48]

Cukup? Silakan, Petitem bacakan!

1352. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:22:47]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemohonan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wali Kota[*sic!*] Sungai Penuh Tahun 2024, mohon dianggap dibacakan.

1353. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:23]

Tabel, dibaca ... ya, dianggap dibacakan, ya.

1354. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:23:25]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Termohon beserta para Kuasa Hukumnya, ditandatangani, Yang Mulia. Terima kasih.

1355. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:35]

Terima kasih, Termohon, cukup, ya?

1356. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ULIN NUHA [02:23:38]

Cukup.

1357. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:39]

Baik. Kami kembalikan dulu ... lanjut? Kalau lanjut nanti perkara ini honorinya dibagi lho, ya.

Baik, Pihak Terkait, silakan!

1358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:23:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan Saya Adithiya Diar bersama rekan saya Pahrendi, izinkan untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 71.

Izin, Yang Mulia. Terhadap Eksepsi.

1359. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:04]

Ya.

1360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:24:05]

Baik itu tentang Kewenangan Mahkamah maupun Kedudukan Hukum ataupun gugatan kabur atau obscur libel, mohon telah dianggap telah dibacakan.

1361. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:14]

Baik.

1362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:24:15]

Terhadap Pokok Perkara, Yang Mulia.

Bahwa dalil dari Pemohon, selain apa yang dijawab oleh Termohon tadi, maka juga terdapat dalil TSM, Yang Mulia.

Izin untuk menyampaikan, dalil ini tidak tepat untuk ditujukan ke Pihak Terkait, Yang Mulia, karena menurut hikmat Pihak Terkait, Pihak Terkait bukanlah sebagai incumbent atau petahana dalam proses pemilu ... pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024. Sehingga (...)

1363. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:44]

Emang kalau TSM, hanya bisa dilakukan oleh petahana saja, ya?

1364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:24:48]

Ya, karena terhubung dengan aparat struktural dengan aparat pemilihan, Yang Mulia.

1365. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:52]

Kalau saudaranya petahana atau yang dijagoi petahana ... petahana, emang enggak boleh?

1366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:24:57]

Gimana, Yang Mulia? Izin.

1367. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:58]

Kalau yang ternyata calonnya adalah Pihak Terkait ini ... anu ya, ini ya, itu saudaranya petahana, keluarganya petahana ya atau yang dijagoi petahana, emang tidak mungkin terjadi TSM?

1368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:25:14]

Mungkin untuk terjadi hal itu, Yang Mulia.

1369. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:16]

Oh, oke. Tapi di sini enggak terjadi ya, menurut Pihak Terkait.

1370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:25:19]

Ndak terjadi, Yang Mulia.

1371. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:20]

Oke.

1372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:25:20]

Karena Paslon Nomor Urut 2 atau Pemohon itu merupakan petahana atau incumbent dalam Perkara a quo, Yang Mulia, yang petahana itu.

Di sisi lain, Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan bahwasannya ada keterlibatan ASN di dalam memenangkan Paslon Nomor Urut 2 atau Pemohon, Yang Mulia.

1373. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:36]

Ya.

1374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:25:36]

Yang telah kami laporkan ke pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh. Setidaknya ada dua, yang kemudian Bawaslu Kota Sungai Penuh telah merekomendasikan ke BKN, Yang Mulia.

1375. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:47]

Ya.

1376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:25:48]

Di sisi lain, selain adanya laporan dari Pihak Terkait, ada juga laporan dari paslon yang lainnya, Yang Mulia, karena ada empat paslon, ada paslon yang lainnya juga melaporkan jabatan Aparat Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam keterlibatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Yang pertama ada Pak Kaedirman[sic!], Dedi Gusrizal[sic!] dan lain-lain, Yang Mulia. Bahwasanya terhadap laporan tersebut BKN telah mengeluarkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang menguntungkan dari Pihak Pemohon atau Paslon Nomor Urut 2, Yang Mulia. Namun, rekomendasi tersebut hingga sekarang juga belum dise ... dieksekusi atau ditindaklanjuti oleh Wali Kota Sungai Penuh. Sehingga unsur masif di dalam atau unsur sistematis di dalam pemilihan ini menjadi sangat nyata, hanya dilakukan oleh Pemohon bukan oleh Pihak Terkait, Yang Mulia.

1377. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:42]

Oke.

1378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:26:44]

Terus, Yang Mulia. Kita lanjutkan untuk perolehan manipulasi yang diawali dari tahapan kampanye, Yang Mulia. Ada di dalam angka 4 dan angka 6 dari Permohonan Pemohon.

Bahwa Dalil Pemohon sangat berlebihan dengan merupakan dramatisasi dari kekalahan yang di dapat sehingga argumentasi yang dibangun oleh Pemohon menjadi tidak berdasar.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyuruh, meminta atau memberikan arahan kepada simpatisan, pendukung, tim pemenangan ataupun masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kumun Debai untuk melarang bagi pasangan calon yang berkompetisi pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh melaksanakan kampanye di Kecamatan Kumun Debai. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4: Saudara Fikar Azami dan Asma Ismail, di Desa Debai dan Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai.

Sehingga apa yang didalilkan Pemohon, yang adanya larangan di Kecamatan Kumun Debai adalah tidak terbukti atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.

1379. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:50]

Oke. Apa lagi? Yang belum disinggung oleh Termohon?

1380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:27:57]

Untuk selebih ... dan selebihnya mungkin bisa...

1381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:28:01]

Cukup, Yang Mulia.

1382. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:02]

Cukup?

1383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:28:01]

Cukup (...)

1384. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:02]

Silakan, Petitem (...)

1385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ADITHIYA DIAR [02:28:03]

Kita langsung ke Petitem yang akan disampaikan oleh rekan saya Pahrendi, Yang Mulia.

1386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PAHRENDI AHMAD [02:28:01]

Izin, Yang Mulia.

1387. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:11]

Silakan.

1388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PAHRENDI AHMAD [02:28:13]

Untuk membaca ke Petitum.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia in casu, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1389. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:40]

Cukup?

1390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PAHRENDI AHMAD [02:28:46]

Dalam Pokok Perkara.

1391. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:49]

Oh, belum.

1392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PAHRENDI AHMAD [02:28:51]

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono[sic!] aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, tertanda tangan. billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum wr.wb.

1393. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:42]

Waalaikumsalam, wr. wb.

Ini Pak Ketua KPU, ini penutupnya macam-macam, ada yang NU, Wallahul Muwaffiq, ada Nashrun Minallah, ini kayaknya perti[sic!] ini. Gitu, ya. Terima kasih, Saudara Pihak Terkait.

Sekarang Bawaslu, Bawaslu boleh pakai iftitah pembukaan maupun penutup aliran mana saja, yang jelas jangan aliran sesat.

1394. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:30:08]

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua.

Perkenalkan saya Dianda Kurniawan, Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, didampingi oleh Pimpinan Provinsi ... Bawaslu Provinsi Jambi, ada rekan saya Iin Rudiansyah dan M. Hasyim melalui daring.

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan keterangan dari Bawaslu Kota Sungai Penuh terhadap Perkara Nomor 71 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024 oleh Nomor Urut 2. Yang tidak dibacakan mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1395. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:53]

Baik. Pokok-pokoknya saja, Pak. Terutama (...)

1396. BAWASLU 71: DIANDA KURNIAWAN [02:30:54]

Terhadap (...)

1397. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:54]

Yang apa ... temuan dan hasil ... apa ... pengawasan dan juga laporan.

1398. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:30:55]

Terhadap penetapan perolehan suara tidak ada laporan ataupun temuan, Yang Mulia, sesuai dengan laporan hasil pengawasan kami Nomor 35 dan seterusnya pada tanggal 4 Desember 2024 (PK Bukti 10.11-2), Yang Mulia.

Kemudian terhadap Pemohon yang mendalilkan ditolaknya semua pasangan lain untuk berkempanye di Kecamatan Kumun Debai, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan alasan tidak ada STTP, angka 4 halaman 12.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh, berkenaan dengan hal tersebut tidak ada laporan ataupun temuan.

1399. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:43]

He eh.

1400. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:31:44]

Kemudian Bawaslu Kota Sungai Penuh, sudah melakukan imbauan pada tanggal 23 September 2024 sesuai dengan PK Bukti 10.11-3.

Kemudian hasil pengawasan pengawas di Kecamatan Kecamatan Kumun Debai yang pada pokoknya menarangkan bahwa terdapat Paslon Wali Kota Nomor Urut 4, melaksanakan kampanye di Kecamatan Kumun Debai, sesuai dengan vide Bukti PK-10.11-5, keterangan Bawaslu halaman 3 sampai dengan 4, Yang Mulia.

1401. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:12]

Ya.

1402. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:32:13]

Kemudian, terkait dengan Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Nomor Urut 1 melakukan kampanye di Masjid Raya Rawang, angka 5 halaman 12 sampai dengan 13 (...)

1403. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:24]

Ya.

1404. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:32:25]

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06 dan seterusnya, pada tanggal 30 Oktober 2024, sesuai dengan vide Bukti PK-10.11-6.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan[sic] status laporan, tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan, laporan dihentikan berdasarkan pe ... pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Sungai Penuh. Karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau pelanggaran

tindak pidana pemilihan dengan alasan Paslon 1 dan Tim hanya melaksanakan shalat Zuhur sewaktu melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang dan tidak terdapat kegiatan kampanye pada saat paslon berada di Masjid Raya Rawang.

1405. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:19]

Oke.

1406. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:33:21]

Hal tersebut juga didasari dengan hasil dari pengawasan Pengawas Kecamatan Hamparan Rawang Nomor 202 dan seterusnya, tanggal 24 Oktober 2024 (vide Bukti PK-10.11-8). Keterangan Bawaslu halaman 4 sampai dengan 5, Yang Mulia.

1407. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:41]

Ya.

1408. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:33:43]

Kemudian ... bahwa ... kami lanjut ke intimidasi saksi, Yang Mulia.

1409. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:52]

Ya.

1410. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:33:52]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat intimidasi saksi ... mohon maaf, Yang Mulia, ini pada halaman 11 sampai dengan 12.

1411. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:58]

Ya, ya.

1412. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:33:58]

Keterangan Bawaslu.

Bahwa pada ... Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat intimidasi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Desa Air Teluh, saya ingat tidak mengikuti proses selanjutnya.

Angka 1 halaman 13, angka 7 halaman 13, terhadap dalil Pemohon. Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Nomor 22 dan seterusnya, pada vide Bukti PK-10.11-13.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024, sesuai dengan vide Bukti PK-10.11-14, Yang Mulia.

1413. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:42]

Oke.

1414. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:34:43]

Karena pelapor tidak memperbaiki laporan setelah diberi kesempatan 2 hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini laporan tidak diregis, Yang Mulia.

1415. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:51]

Oke.

1416. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:34:50]

Karena (...)

1417. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:51]

Cukup ... cukup.

1418. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:34:51]

Oke.

1419. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:51]

Itu lanjut yang Desa Sandaran Galeh, ada beberapa desa. Intinya saja dijadikan satu. Ini kan ada Desa Sandaran Galeh (...)

1420. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:03]

Ya, Yang Mulia.

1421. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:08]

Ada ada Renah Kayu (...)

1422. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:08]

Ya, Yang Mulia.

1423. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:08]

Mana lagi (...)

1424. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:09]

Ini, Yang Mulia, saya (...)

1425. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:09]

Ya.

1426. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:09]

Sampaikan, Yang Mulia.
Terhadap Dalil Pemohon yang semua TPS di Kecamatan Kumun
Debai, itu memang ada 2 laporan, Yang Mulia, terhadap intimidasi saksi.

1427. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:18]

Ya.

1428. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:18]

Semuanya tidak diregis karena tidak ... tidak lengkap secara mate
(...)

1429. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:25]

Tidak dipenuhi secara formilnya?

1430. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:27]

Formilnya, Yang Mulia.

1431. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:27]

Ya.

1432. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:27]

Yang pertama tidak ada ide ... identitas pelapor.

1433. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:30]

Ya.

1434. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:32]

Terlapornya tidak ada, kemudian tidak ada bukti yang disampaikan oleh pelapor, Yang Mulia.

1435. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:35]

Oke.

1436. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:35]

Sehingga itu tidak bisa diregistrasi.

1437. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:40]

Oke, apa lagi? Itu sudah semua, saya kira ini kan cukup detail, ya?

1438. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:42]

Ya, Yang Mulia.

1439. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:44]

Apa lagi yang mau disampaikan, selain soal intimidasi saksi, soal posting di akun Facebook?

1440. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:51]

Oh, oke, Yang Mulia.

1441. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:52]

Ya.

1442. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:35:52]

Terait ... terkait dengan ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan setelah Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selesai, salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh atas nama Nadia Vila memposting di akun Facebook-nya, foto bersama dengan istri Alfin yang merupakan Calon Wali Kota Nomor Urut 1, angka 16 halaman 15. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 27 dan seterusnya (vide Bukti PK-10.11-48).

1443. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:30]

Ya.

1444. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:36:30]

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil karena pelapor tidak memperbaiki laporan setelah diberi kesempatan (...)

1445. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:50]

Oke.

1446. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:36:50]

Dua hari sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku (vide Bukti PK-10.1149[sic!]).

1447. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:54]

Ya.

1448. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:36:00]

Ini, Yang Mulia, pelapor tidak menyantumkan alamat terlapor (...)

1449. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:01]

Oke.

1450. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:37:01]

Kemudian, waktu dan tempat peristiwa, Yang Mulia.

1451. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:05]

Ya. Oke, yang penting sudah direspons, tapi ... dan sudah diberi kesempatan untuk memenuhi syarat formil (...)

1452. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:37:14]

Kemudian, dari informasi ... itu kami jadikan informasi awal, Yang Mulia.

1453. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:18]

Ya.

1454. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:37:18]

Karena ingin melakukan penelusuran, kami koordinasi dengan KPU, ternyata KPU sudah menangani secara internalnya mereka.

1455. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:3]

Oke, ya. Ini memang, Pak Afif, kita harus hati-hati. Yang paling menakutkan ketemu, terus di kawinan, minta foto bareng kita (...)

1456. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:37:36]

Mungkin (...)

1457. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:36]

Tapi, ya jangan di posting, ya.

1458. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:37:39]

Mungkin itu keterangan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

1459. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:42]

Ya.

1460. BAWASLU: DIANDA KURNIAWAN [02:37:42]

Assalamualaikum wr.wb.

1461. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:43]

Terima kasih, Bawaslu. Cukup, ya? Cukup.
Baik, kami kembalikan kepada Pak Ketua Panel Yang Mulia.

1462. KETUA: SALDI ISRA [02:37:]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Ini Sungai Penuh. Terakhir di sesi pagi ini Kota Tarakan, ini calon tunggal. Silakan, KPU Tarakan, Bawaslu. Pemohonnya datang? Tarakan hadir, ya? Ya, datang saja dua-dua, Pak. Nanti di Putusan kita selesaikan masalah Bapak ini. Silakan. Ini akan dipimpin Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan!

1463. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:38:46]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Baik, kita lanjutkan ini dari Tarakan. Silakan KPU Tarakan dan Kuasanya untuk menyampaikan jawaban Termohon.

1464. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:39:02]

Baik. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1465. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:06]

Walaikumsalam.

1466. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:39:06]

Kami akan membacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh pemantau pemilihan pada Pilkada Tahun 2024 Kota Tarakan dari Lembaga Analisis HAM Indonesia yang diwakili oleh Ambo Tuo.

Terkait Eksepsi mungkin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1467. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:30]

Ya.

1468. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:39:30]

Terkecuali untuk Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Untuk itu menurut Termohon, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam hal ini sebagai pemantau pemilihan Forum Lembaga Analisis HAM Indonesia diwakili oleh Ambo Tuo tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pemantau pemilihan yang teregistrasi sebagai Pemohon dengan alasan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 319 Tahun 2024 tentang penetapan pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Tarakan Tahun 2024 yang pada diktumnya memutuskan dan menetapkan daftar lembaga pemantau pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024, yang mana pada Lampiran 1 Nomor 1 dijelaskan adalah Lembaga Analisis HAM Indonesia.

Terus, bahwa pada Lampiran SK ... KPU Kota Tarakan Nomor 319 Tahun 2024, pada daftar nama pemantau pemilihan Wakil ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan pada Nomor 1 dengan nama pemantau Lembaga Analisis HAM Indonesia, yang dimana secara ... secara jelas menetapkan nama pemantau Lembaga Analisis HAM Indonesia yang berada di pusat. Karena pada nomenklatur penunjukkan nama pemantauan pada lembaga tersebut, tidak menunjuk dan menetapkan Lembaga Analisis HAM Indonesia, DPW Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang Nomor Sertifikat Akreditasi Nomor 1/HAM.03.2-KT/6571/4/2024 yang disahkan oleh KPU Kota Tarakan tidak sebagaimana nomenklatur pada nama pemantau yang lain pada daftar pemantau pemilihan, yaitu.

2. Lembaga Bantuan Hukum Civil and Criminal Law Republik Kota Tarakan.
3. LSM Lumbung Informasi Rakyat Provinsi Kalimantan Utara.
4. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan.

Kemudian yang ketiga. Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Analisis HAM Indonesia tentang Pemberitahuan Surat Pemberhentian sebagai Ketua DPD atau DPW Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 17 Desember 2024 (Bukti T-5) yang suratnya ditembuskan dan diterima oleh KPU Kota Tarakan menjelaskan tentang, yaitu ... pada intinya, dengan ini diberitahukan jika sejak tanggal 15 Desember 2024, Saudara Ambo Tuo sudah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Lembaga Analisis HAM Indonesia.

1469. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:42:06]

Ya, cukup. Ini Saudara sudah menyatakan di sini, ya.

**1470. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[02:42:09]**

Baik. Yang keem (...)

1471. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:42:10]

Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan. Lanjut.

**1472. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[02:42:14]**

Baik.

1473. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:42:14]

Jangan dibaca semua, pokok-pokoknya saja.

**1474. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[02:42:17]**

Oh, langsung ke Pokok Permohonan?

1475. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:42:18]

Ya. Pokok Permohonan, langsung.

**1476. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[02:42:20]**

Baik. Untuk Pokok Permohonan.
Menurut Termohon, permohonan tidak jelas ... eh (...)

1477. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:42:36]

Langsung ini yang dalil (ucapan tidak terdengar jelas)

**1478. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[02:42:38]**

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penulisan yang keliru, menurut Termohon adalah bahwa data yang berbeda yang didalilkan oleh Pemohon pada Model D.Kecamatan, Model D.Kota Tarakan, dan

Model D.Gubernur di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Utara dengan data Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, pada Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota terlampir Bukti T-12 telah dilakukan pem ... perbaikan data yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pemantau pemilihan beserta Bawaslu Kota Tarakan.

Kemudian yang kedua, bahwa terhadap perbedaan yang telah dilakukan perbaikan tersebut di atas, telah dimuat ke dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ... suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, dan tidak ada keberatan baik dari saksi, pemantau, dan Bawaslu pada perbaikan tersebut.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang kesalahan pada Form Model D.Kecamatan pada TPS 07 Karang Balik, kecamatan Tarakan.

1479. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:15]

Ya, lanjut.

1480. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:44:16]

Barang (...)

1481. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:16]

Yang c ini, mengenai Model C-6-KWK itu yang c.

1482. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:44:22]

Bahwa pada Model C.Hasil KWK Wali Kota halaman 2 pada TPS 07 Kelurahan Karang Balik terdapat ... Tarakan Barat, Kota Tarakan, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 sebanyak 133 suara. Pada Model C.Hasil Salinan-KWK Wali Kota halaman 2, pada TPS 007, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 sebanyak 113 suara.

Pada lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, Wali Kota Tarakan Barat, halaman 2, lembar 1, perolehan suara Paslon Nomor Urut

01, TPS 007 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sebanyak 133 suara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang adanya perbedaan pencatatan hasil perolehan suara pada C.Hasil-KWK Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan telah dilakukan pembetulan angka yang sah dicatatkan tanpa adanya kebaratan dari saksi pemantau pemilihan yang sah dicatatkan dan Bawaslu pada rekapu ... rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, Wali Kota Tarakan Barat, halaman 2, lembar 1 sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024.

Kemudian untuk ... bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang adanya pemantau se-Kota Tarakan yang memantau banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan atau Model C-6 KWK, sehingga banyak warga yang tidak memilih, bahkan ada warga yang sengaja tidak memilih karena dijelaskan, apabila tidak ke TPS itu termasuk memilih kolom tidak bergambar tersebut, Pemohon keliru dan tidak terdapat bukti yang cukup yang dapat menjelaskan tentang adanya penjelasan kepada warga, tentang apabila dia tidak ke TPS itu termasuk memilih kolom tidak bergambar.

1483. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:46:27]

Ya. Coba yang e ini, nih. Apa ini, banyaknya pemantau yang kalang kabut ini oleh Temohon[sic!]. Apa ini jawaban Saudara, coba yang e.

1484. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:46:37]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Pokok Permohonan poin e.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang banyaknya pemantau yang kalang kabut karena Termohon melakukan perubahan tempat pemantauan dari SK yang diusulkan oleh pihak pemantau ... yang diusulkan oleh pihak pemantau ke SK yang diberikan Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024, tertanggal 22 November 2024 tersebut tidak benar.

Karena pada dasarnya tempat atau lokasi penempatan pemantauan pemilihan di setiap TPS merupakan usulan daftar tempat pemantauan yang diberikan oleh pemantau pemilihan kepada KPU Kota Tarakan, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024.

1485. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:47:36]

Ya, ini Bukti T-4, ya? yang f lanjut.

1486. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:47:42]

Baik untuk Pokok Permohonannya selanjutnya (...)

1487. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:47:45]

Ya, sosialisasi yang tidak dilakukan, benar ndak ini? Coba.

1488. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:47:49]

Bahwa terhadap dalil Permohonan pada Permohonan tentang KPU Kota Tarakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang surat suara kolom kosong tidak bergambar adalah keliru dan tidak benar. Karena dalam beberapa kesempatan, KPU Kota Tarakan telah melakukan banyak sosialisasi pendidikan pemilih, sosialisasi nomor urut, dan kolom kosong yang tidak bergambar sebanyak 44 kegiatan sosialisasi, terlampir Bukti T-18. Dan 5 di antaranya sebagai berikut.

Yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih basis kelurahan pada Kelurahan Sebengkok dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tempat di Kelurahan Sebengkok, asal peserta masyarakat dan berjumlah 43 orang.

1489. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:34]

Ada buktinya itu, ya? Sudah dilakukan (...)

1490. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:48:38]

Izin.

1491. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:38]

Pengumuman, sosialisasi.

1492. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:48:40]

Untuk bukti ada screenshot-an di Instagram.

1493. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:44]

Ada

1494. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:48:45]

Ada di Facebook.

1495. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:47]

Ya.

1496. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:48:45]

Izin, Yang Mulia.

1497. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:47]

Lanjut langsung ke Petitem, Termohon.

1498. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:48:49]

Baik. Saya akan bacakan Petitemnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 02.21 WITA.

Untuk poin tiga, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1499. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:43]

Ya.

1500. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [02:49:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1501. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:45]

Baik, terima kasih.
Selanjutnya Pihak Terkait, silakan.

1502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:49:50]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

1503. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:54]

Walaikumsalam wr. wb.

1504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:49:55]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 146 dan seterusnya, dimoho ... yang dimohonkan oleh Pemantau Pemilihan Lembaga Analisis HAM Indonesia Kota Tarakan.

Dalam Eksepsi.

Kami hanya membaca di soal Legal Standing Pemohon, Yang Mulia. Bahwa (...)

1505. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:19]

Singkat[sic!] saja, ya.

1506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:50:20]

Ya. Yang mengajukan Permohonan ini adalah Ketua DPW Lembaga Analisis HAM Provinsi Kalimantan Utara dan ternyata statusnya sebagai ketua sudah diberhentikan pada tanggal 17 Desember Tahun

2024. Dan saat ini ketua semen ... ketua sementara merangkap Sekretaris DPW Kalimantan Utara itu adalah Saudara Tri Indra Iswandi (Bukti PT-10), Yang Mulia.

1507. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:57]

Ya, lanjut.

1508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:50:58]

Kemudian di Bukti kami PT-11, itu pemberhentian Saudara Ambo Tuo. Di PT ... Bukti PT-12, itu surat pencabutan kuasa tertanggal 6 Desember yang telah diberikan kepada Mukhlis Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Dan kemudian di Bukti PT-13 kami bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia melakukan penarikan berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Kota Tarakan Tahun 2024 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Bukti PT-13).

Dan selanjutnya, tanggal 23 Sep ... Desember 2024, Mahkamah sudah mengeluarkan tanda terima surat masuk melalui Kepaniteraan di Bukti PT-14, Yang Mulia.

1509. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:48]

Ya, lanjut.

1510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:51:49]

Dengan demikian, kami menganggap bahwa permohonan yang saat ini diadili oleh Mahkamah, sudah dinyatakan dicabut.

Kemudian Legal Standing soal siapa yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Di per ... halaman 8, Yang Mulia.

1511. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:11]

Ya, lanjut!

1512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:52:12]

Angka 31.

Bahwa berdasarkan angka 5 Surat Tugas Khusus kepada seluruh Ketua DPW Provinsi Lembaga Analisis HAM Indonesia dan seterusnya.

Bahwa jika dianggap memenuhi unsur, maka Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga jadi pengurus pusat yang bukan pengurus DPD atau DPW, hanya Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM yang dapat melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu untuk Legal Standing, Yang Mulia.

1513. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:41]

Ya.

1514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:52:42]

Kemudian untuk oskor (...)

1515. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:43]

Obscur.

1516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:52:44]

Libel.

1517. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:45]

Ya.

1518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:52:45]

Itu ada berapa hal soal Legal Standing juga, Yang Mulia. Ada kekeliruan soal menempatkan persentase karena penduduk kaliman ... Kota Tarakan itu 275 ... 275.915.000[sic!] jiwa itu persentasenya adalah 1,5%, bukan 2% yang seperti didadilkan oleh Pemohon. Jadi 275.115 jiwa.

1519. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:18]

Ya.

1520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:52:19]

Mohon maaf, Yang Mulia.

1521. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:53:20]

Jangan salah, nanti (...)

**1522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:52:21]**

Ya.

1523. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:53:22]

Ya. Karena kan Saudara di sini akan menyatakan (...)

**1524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:52:23]**

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

1525. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:53:24]

Permohonannya itu.

**1526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:53:25]**

Kemudian juga demikian dalam permohonannya, Pemohon menyatakan Termohon melakukan pelanggaran TSM, ternyata dalam dalil-dalilnya kita tidak menemukan hal yang dimaksud.

Bahwa Permohonan Pemohon dalam menyusun permohonannya juga tidak sesuai Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

1527. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:53:40]

Ya, lanjut dalam Pokok Permohonan.

**1528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:53:41]**

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan yang kami tanggapi yang di poin 3, Yang Mulia, soal pergantian ASN.

Menurut Pemohon bahwa Pihak Terkait yang adalah petahana ini dianggap melanggar karena telah melakukan pergantian ASN, pada tanggal 2 November sebelum enam bulan sebelum pendaftaran, padahal seharusnya (...)

1529. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:05]

75, ya. ASN-nya, ya?

1530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:54:06]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1531. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:07]

75 orang. Ya, lanjut. Bagaimana penjelasannya?

1532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:54:09]

Penjelasannya adalah bahwa yang dilarang dalam undang-undang itu adalah enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, bukan enam bulan sebelum pendaftaran. Lagi pula bahwa Pihak Terkait itu masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 1 Maret 2024. Jadi, tidak mungkin lagi melakukan pergantian pejabat sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon. Di halaman 12 di poin terakhir itu, Yang Mulia.

1533. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:38]

Ya, lanjut!

1534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:54:40]

Kemudian, soal dalil money (...)

1535. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:43]

Money politics.

1536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:54:44]

Politics.

1537. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:45]

Ya, lanjut.

1538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:54:46]

Ini tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu dan tidak ada. Bawaslu dan tidak ada bukti dalam Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Kemudian, soal (...)

1539. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:51]

Di berapa TPS ini? Banyak ini.

1540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:54:54]

Ya, Yang Mulia.

1541. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:55]

Ada di 8 ... apa ... 10 TPS, ya?

1542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:54:58]

Ya, betul, Yang Mulia.

1543. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:59]

Ya, terus lanjut.

1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:55:01]

Yang kemudian soal keterlibatan lurah kemudian Direktur PDAM, itu kami sudah buktikan bahwa pihak yang disebut namanya tersebut adalah bukan relawan kampanye pemilihan wali kota, bertanggal 29 Juli[sic!] di Bukti PT-15, Yang Mulia.

1545. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:55:19]

Ya.

1546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:55:20]

Itu tidak ada nama Mashuri dan tidak ada nama Iwan Setiawan yang merupakan Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan.

1547. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:55:29]

Ya, lanjut. Ini lagi nih, yang i saja, nih. Kenapa ini? Banyak yang tidak mengetahui. Apa tidak diberi tahu? Tidak dsosialisasikan ini? Tempat Pemungutan Suara TPS ini banyak yang tidak diketahui. Apa penjelasannya?

1548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:55:45]

Baik, Yang Mulia. Kalau yang banyak tidak mengetahui bahwa yang mendapat undangan Model C.Pemberitahuan itu, itu kan sudah lengkap dengan lokasi tempat dan TPS-nya, Yang Mulia, dan juga dari Pihak Terkait, itu memantau bahwa dalam hal ini, pendukung Pihak Terkait ini tidak ada yang keberatan atau tidak ada yang melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan. Dalam Permohonannya Pemohon juga tidak menyebut, berapa banyak yang tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan, Yang Mulia.

1549. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:56:26]

Ya. Tidak dapat mengakses TPS melalui cek DPT online.

1550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR[02:56:32]

Kalau Pihak Terkait, mensosialisasikan pada pendukungnya yang tidak mendapat C itu bisa secara online bisa mengakses, Yang Mulia, dicek DPT online kpu.go.id.

1551. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:56:43]

Ya, baik. Lanjut.

1552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR[02:56:46]

Selanjutnya, ada laporan soal money politics yang dilaporkan ke Bawaslu yang dilaporkan Pihak Terkait. Bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Tarakan, itu dinyatakan tidak terbukti adanya terjadinya money politics, Yang Mulia.

Selanjutnya[sic!], soal adanya perbedaan suara yang didalilkan oleh Pemohon di halaman 16, Yang Mulia.

1553. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:17]

Ya.

1554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR[02:57:18]

Mulai tabel 3, tabel 4, tabel 5. Dan tabel (ucapan tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan.

1555. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:20]

Ya. Lanjut saja. Itu nanti kami baca itu.

1556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR[02:57:24]

Ya, itu. Dan berdasarkan bukti sampai Bukti PT-19 yang kami punya, Yang Mulia, itu tidak ada perbedaan, Yang Mulia.

1557. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:33]

Ya.

1558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR[02:57:33]

Jadi, hasil rekapitulasi itu, mulai dari TPS sampai kecamatan, tingkat kota sama, Yang Mulia.

1559. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:39]

Baik. Nanti angka-angka kita pelajari.
Petitum.

1560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:57:43]

Ya. Untuk Petitum, diserahkan ke kawan yang lain.

1561. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:46]

Silakan.

1562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUNIRAHAYU [02:57:48]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1563. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:49]

Ya.

1564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUNIRAHAYU [02:57:48]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21 WITA.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

1565. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:53]

Ya, terima kasih.

Bawaslu, silakan. Yang berikan keterangannya, pokok-pokoknya saja, tidak usah dibacakan, ya.

1566. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [02:59:00]

Baik, Yang Mulia.

1567. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:01]

Ya.

1568. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [02:59:02]

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Izin, untuk menyampaikan resume keterangan kami, Bawaslu Kota Tarakan, terhadap Perkara 16 ... 146 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pemantau pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

Izin menyampaikan Pokok-Pokok.

Yang pertama, Yang Mulia, berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) (...)

1569. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:30]

Ya.

1570. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [02:59:30]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak terdapat laporan temuan berkaitan dengan permohonan tersebut, Yang Mulia. Sedangkan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan kepada Pj Wali Kota Tarakan, yang sudah kami lampirkan dalam Bukti PK-3, mohon dianggap dibacakan.

1571. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:51]

Ya.

1572. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [02:59:52]

Kemudian, terkait dengan dalil permohonan dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan oleh RT di wilayahnya untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak terdapat laporan, temuan, serta permohonan sengketa proses yang berkaitan dengan Pokok Permohonan tersebut, Yang Mulia. Sedangkan yang berkaitan dengan Pokok Permohonannya, Bawaslu Kota Tarakan telah menge ... melakukan pencegahan, melakukan pengawasan pada tahap dan juga melakukan pengawasan pada tahapan kampanye dan masa tenang, serta pemungutan suara di TPS. Yang uraiannya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1573. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:24]

Ya, lanjut.

1574. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:00:28]

Kemudian berkaitan dengan dalil Lurah Karang Anyar, Tarakan Barat, menjadi tim relawan pasangan calon, tidak terdapat laporan, temuan, serta permohonan sengketa berkaitan dengan ... berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Kemudian Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan tiga imbauan yang berkaitan dengan netralitas ASN, BUMD, dan BUMN, dan juga membentuk kelompok kerja yang uraiannya mohon dianggap dibacakan sebagaimana pada Bukti PK-15 sampai dengan PK-18.

1575. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:59]

Ya.

1576. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:00:59]

Kemudian berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 301 dan seterusnya, pada tanggal 27 September, tidak ditemukan pelibatan ASN, BUMN, dan BUMD pada daftar nama tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Demikian juga dengan dalil mengenai Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Yang Mulia, tidak terdapat laporan, temuan, serta permohonan sengketa proses berkenaan dengan me ... permohonan tersebut.

Dan juga Bawaslu Kota Tarakan melakukan pencegahan dengan mengeluarkan imbauan dan juga melakukan pengawasan sebagaimana tad ... kami tuangkan pada Bukti PK-19 dan PK-20. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1577. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:44]

Ya.

1578. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:01:45]

Bahwa Pemohon mendalilkan petugas KPPS tidak memberikan C.Pemberitahuan KWK. C.Pemberitahuan-KWK dibagikan H-1 sebelum pemungutan suara dan ketua RT ditugaskan membagikan

C.Pemberitahuan-KWK Keterangan Bawaslu Kota Tarakan. Tidak terdapat laporan, temuan, serta permohonan sengketa proses yang berkenaan dengan permohonan.

Sedangkan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan pencegahan dan juga pengawasan pada saat pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana kami sampaikan dalam keterangan kami. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1579. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:02:22]

Ya.

1580. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:02:22]

Sebagaimana pada Bukti PK-21 dan 22.

Kemudian Pemohon mendalilkan perbedaan perolehan suara sah di setiap kecamatan dan selisih perolehan suara sah dengan tidak sah pada Pemilihan Tahun 2024.

Tidak terdapat laporan, temuan, serta permohonan sengketa yang berkenaan dengan permohonan. Sedangkan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kota Tarakan, pada tanggal 29 November, pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dan juga laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan, tanggal 5 Desember, pada saat rekapitulasi tingkat kota, sebagaimana kami uraikan pada tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6. Mohon dianggap dibacakan.

1581. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:03:08]

Ya, lanjut.

1582. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:03:13]

Kemudian Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Calon Wali Kota Tarakan atas nama Khairul, nomor ... Pasangan Nomor Urut 1. Terdapat laporan, berkenaan dengan dalil Permohonan tersebut, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor 04 dan seterusnya, tanggal 21 Oktober 2024 dan dilakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut.

Bawaslu Kota Tarakan telah membuat kajian awal dugaan pelanggaran dengan kesimpulan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti prosesnya dengan ... proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bersama Sentra Gakkumdu.

Kemudian, Bawaslu Kota Tarakan melakukan proses penanganan pelanggaran, pembahasan pertama, pembahasan kedua, kemudian dituangkan ke dalam kajian dugaan pelanggaran, yang pada pokoknya dugaan tindak pidana pemilihan politik uang yang dilakukan terlapor tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang, sebagaimana Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, sehingga proses penanganan dugaan pelanggaran politik uang dihentikan.

Bawaslu Kota Tarakan mengeluarkan pemberitahuan status laporan kepada pelapor dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1583. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:04:00]

Ini coba ini yang mengenai dalil perbedaan jumlah DPT ini yang diberikan kepada pemantau Pemilu dengan Pemilu[sic!] C (...)

1584. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:04:39]

Ya.

1585. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:04:00]

Ini di halaman 19 ini, coba Saudara jelaskan apa yang diterangkan oleh Bawaslu.

1586. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:04:45]

Baik, Yang Mulia.

Terhadap dalil Permohonan pada TPS 7 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat terdapat perbedaan antara Formulir D.Kecamatan dan C.Salinan.

1587. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:04:59]

Ya.

1588. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:04:59]

Itu tidak terdapat laporan dan juga temuan, Yang Mulia, yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan juga Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan upaya pencegahan dan juga pengawasan pada saat pemungutan dan rekapitulasi.

1589. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:15]

Enggak ada ditindaklanjuti, ya?

1590. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:05:18]

Ya, Yang Mulia.

1591. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:18]

Baik, lanjut. Masih ada?

1592. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:21]

Kemudian berkaitan dengan dalil adanya Ketua RT yang (...)

1593. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:26]

Ya.

1594. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:04:00]

Ketua RT 016, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, menjelaskan tidak dapat mencoblos pasangan ... kalau tidak mencoblos Pasangan Nomor Urut 1, maka tidak diberikan C.Pemberitahuan-KWK.

Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat laporan, temuan, ataupun pengajuan Permohonan Sengketa, Yang Mulia. Dan berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS kami, di TPS 10, tidak ada ... tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada TPS tersebut, Yang Mulia.

1595. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:57]

Ya, cukup?

1596. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:06:00]

Kemudian masih ada lagi, Yang Mulia (...)

1597. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:02]

Ini langsung (...)

1598. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:06:02]

Berkaitan dengan (...)

1599. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:06:03]

7 ini saja langsung, 7 terakhir, mengenai Formulir C, halaman 27.

1600. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:04:00]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mendalikan adanya perbedaan jumlah DPT yang diberikan pemantau pemilih ... pemantau ... kepada pemantau pemilihan dengan Formulir C.Salinan-KWK. Bahwa tidak terdapat laporan temuan maupun pengajuan sengketa proses pemilihan berkenaan dengan Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan dan saran perbaikan dan juga pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkaitan dengan daftar pemilih. Demikian, Yang Mulia.

1601. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:50]

Baik. Cukup, ya?

1602. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:51]

Siap, Yang Mulia.

1603. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:51]

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

1604. KETUA: SALDI ISRA [03:06:56]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

KPU, ini satu, ya. Ini saya mau tanya, ini Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air itu betul-betul terdaftar sebagai pemantau KPU?

1605. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [03:07:10]

Izin, Yang Mulia. Untuk yang terdaftar atau terakreditasi, yaitu Lembaga (ucapan tidak terdengar jelas) Indonesia.

1606. KETUA: SALDI ISRA [03:07:17]

Oke, oke nanti kita cek. Yang mendaftarkannya atas nama siapa?

1607. TERMOHON: MAWARDI [03:07:25]

Izin, Yang Mulia, yang mendaftarkan atas nama Ambo Tuo sesuai (...)

1608. KETUA: SALDI ISRA [03:07:30]

Oke. Terima kasih. Cukup?
Kita lanjutkan sekarang untuk pengesahan bukti (...)

1609. NAMA PEMBICARA: [03:07:40]

Instruksi, Yang Mulia. Boleh kami berbicara?

1610. KETUA: SALDI ISRA [03:07:43]

Sebentar dulu.

1611. NAMA PEMBICARA: [03:07:43]

Dari (...)

1612. KETUA: SALDI ISRA [03:07:44]

Sabar dulu, ya. kita selesaikan ini dulu. Nanti kalau ada sesi, saya kasih untuk kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Kan tadi sudah diingatkan, ini giliran mereka.

Untuk Perkara Nomor 41, Pemohon menyampaikan tambahan Bukti P-38, P-48, P-50, P-50.1 sampai dengan P-50.6, P-51, P-53.1, P-64. Betul, Pemohon?

1613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [03:08:21]

Benar, Yang Mulia. Benar (...)

1614. KETUA: SALDI ISRA [03:08:23]

Benar, ya. Disahkan (...)

1615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [03:08:23]

Izin, Yang Mulia, sebelum disahkan.

1616. KETUA: SALDI ISRA [03:08:25]

Ya.

1617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [03:08:26]

Kami ada bermohon, mungkin itu yang di ... untuk P-38.

1618. KETUA: SALDI ISRA [03:08:30]

Ya.

1619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [03:08:30]

Itu nama alat buktinya mau kita renvoi, Yang Mulia. Jadi (...)

1620. KETUA: SALDI ISRA [03:08:34]

Oke, namanya (...)

1621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [03:08:35]

Surat pernyataan.

1622. KETUA: SALDI ISRA [03:08:36]

Di daftar alat bukti nanti, ya?

1623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [03:08:36]

Ya.

1624. KETUA: SALDI ISRA [03:08:37]

Oke.

1625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [03:08:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

1626. KETUA: SALDI ISRA [03:08:39]

Oke.

KETUK PALU 1X

Termohon untuk Kota Bima, T-1 sampai dengan T-166? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-40. Pihak Terkait? Ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-19.10 sam ... -1 sampai PK19.10-104? Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Disahkan.
Kabupaten Belitung Timur, Permohon menambahkan Bukti P-43?
Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-20?

1627. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:09:29]

Betul, Yang Mulia.

1628. KETUA: SALDI ISRA [03:09:30]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-30. Betul?
Pihak Terkait. Tapi ini catatan, PT-25 sampai PT-28, bukti fisik tidak ada.
Oke, disahkan yang ada, yang lengkap.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan PK-11.6-1 sampai dengan PK11.6-40.
Benar, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kabupaten Rote Ndao, Pemohon menambahkan Bukti P-1 sampai dengan P-23.

1629. KUASA HUKUM PEMOHON: [03:10:08]

Benar, Yang Mulia.

1630. KETUA: SALDI ISRA [03:10:09]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-17.
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak terkait PT-1 sampai dengan PT-22.

1631. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:10:19]

Siap, Yang Mulia.

1632. KETUA: SALDI ISRA [03:10:20]

Ini ada catatan Bukti PT-22 yang aslinya tidak dileges.

1633. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:10:25]

Mohon Izin, Yang Mulia. Karena baru dibawa Prinsipal pagi tadi, sehingga mohon izin nanti akan segera dileges dan dimasukkan.

1634. KETUA: SALDI ISRA [03:10:32]

Oke, disahkan ya.

KETUK PALU 1X

1635. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:10:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

1636. KETUA: SALDI ISRA [03:10:35]

Bawaslu PK-20.15-1 sampai PK-20.15-18.
Disahkan.

KETUK PALU 1

Tulang Bawang, Pemohon menambahkan Bukti PB-6 sampai dengan PB-17C?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-30?

1637. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:11:04]

Betul, Yang Mulia.

1638. KETUA: SALDI ISRA [03:11:04]

KETUK PALU 1X

Disahkan.
Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6?

1639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [03:11:09]

Benar , Yang Mulia.

1640. KETUA: SALDI ISRA [03:11:10]

KETUK PALU 1X

Disahkan.
Bawaslu PK-8.5-1 sampai dengan PK-8.5-68[sic!]?

1641. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:11:18]

Benar, Yang Mulia.

1642. KETUA: SALDI ISRA [03:11:20]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini softcopy daftar alat bukti Pemohon harap diserahkan setelah persidangan, ya? Softcopy DAB untuk Tulang Bawang, Pemohon. Sungai Penuh, menambahkan Bukti P-31 sampai dengan P-88?

1643. NAMA PEMBICARA: [03:11:52]

Benar, Yang Mulia.

1644. KETUA: SALDI ISRA [03:11:52]

Benar. Ini ada catatan, P-32, P-34 sampai 37, P-42, P-54 sampai dengan 58, P-62, P-74, P-75, P-80 sampai dengan P-88, tidak ada. Kapan itu?

1645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:12:17]

Jadi, di dalam ... apa ... tambahan bukti kita itu, ada softcopy dalam flashdisk.

1646. KETUA: SALDI ISRA [03:12:22]

Ya.

1647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:12:22]

Dan hardcopy juga kita lampirkan. Makanya kita tadi kasih nomor (...)

1648. KETUA: SALDI ISRA [03:12:25]

Kapan diserahkan?

1649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:12:26]

Siap, Yang Mulia?

1650. KETUA: SALDI ISRA [03:12:27]

Kapan diserahkan?

1651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:12:28]

Pagi tadi, Yang Mulia.

1652. KETUA: SALDI ISRA [03:12:50]

Diserahkan di mana? Tadi?

1653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:12:52]

Ya. Dari pas pendaftaran kami serahkan.

1654. KETUA: SALDI ISRA [03:12:56]

Di bawah? Di (...)

1655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:12:57]

Enggak. Di ... di dep ... di meja pendaftaran, di depan tadi, Yang Mulia. Kan kemarin kita sudah daf ... serahkan alat bukti, jadi katanya diserahkan sebelum sidang. Nah, kami serahkan tadi.

1656. KETUA: SALDI ISRA [03:13:07]

Oke. Coba di cek lagi.

1657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:13:09]

Bahkan fotokopinya pun, kita lampirkan.

1658. KETUA: SALDI ISRA [03:13:12]

Ya.

1659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:13:13]

Rangkap dua.

1660. KETUA: SALDI ISRA [03:13:14]

Oke. Nanti ya, biar ditelusuri.

1661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:13:16]

Siap, Yang Mulia.

1662. KETUA: SALDI ISRA [03:13:16]

Yang untuk Pemohon, ini uraian DAB tidak sesuai dengan bukti fisik, untuk P-52, P-63, P-72, P-73, P-74, ya. Nanti diperbaiki kalau itu, ya.

1663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:13:27]

Siap, Yang Mulia.

1664. KETUA: SALDI ISRA [03:13:29]

Jangan lihatnya marah ke saya, Pak, agak senyum sedikit.

1665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:13:32]

Siap. Kurang tidur, Yang Mulia.

1666. KETUA: SALDI ISRA [03:13:34]

Ya.
Termohon T-1 sampai dengan T-25?
Benar, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-65?

1667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PAHRENDI AHMAD [03:13:46]

Benar, Yang Mulia.

1668. KETUA: SALDI ISRA [03:13:48]

Benar.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-10.11-1 sampai PK-10.11-50?
Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Sungai Penuh ini masih menunggu nih ... yang apa ... yang tadi.
Oke, sabar. Karena sungainya sudah penuh, enggak bisa ditambah lagi,
ini susah.

Kota Tarakan, Pemohon, bukti yang disahkan P-1 sampai dengan
P-70?

1669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:14:18]

Benar, Yang Mulia.

1670. KETUA: SALDI ISRA [03:14:19]

Benar, ya.

1671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:14:19]

Mau saya sedikit tambahkan, Yang Mulia.

1672. KETUA: SALDI ISRA [03:14:21]

Sa ... sabar dulu.

1673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:14:22]

Siap, Yang Mulia.

1674. KETUA: SALDI ISRA [03:14:23]

Anda ... Anda ini enggak sabar, nanti saya suruh keluar lagi.

1675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:14:25]

Siap, Yang Mulia.

1676. KETUA: SALDI ISRA [03:14:28]

Ini Anda dengar. Catatan, bukti Pemohon belum melampirkan softcopy DAB, tambahan Bukti 51 sampai dengan ... P-51 sampai P-70 yang diserahkan pada tanggal 5 Januari ... 21 Januari 2025. Jadi, ini bukti ... apanya ... softcopy DAB-nya belum, ya. Nanti diserahkan, ya?

1677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:14:52]

Siap, Yang Mulia.

1678. KETUA: SALDI ISRA [03:14:53]

Jadi disahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Temohon, Bukti T-1 sampai T-25.

1679. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA [03:15:00]

Betul, Yang Mulia.

1680. KETUA: SALDI ISRA [03:15:02]

Ini ada Surat Kuasa Khusus yang dilampirkan, terdapat indikasi tanda tangan tidak asli atau berupa fotokopi atau scan. Ada yang di-scan, ya? Termohon?

**1681. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[03:15:14]**

Kami ganti yang asli kalau memang menurut Majelis scan-an.

1682. KETUA: SALDI ISRA [03:15:18]

Jangan "kalau memang perlu." Anda yang berkepentingan dengan ini. Ganti yang semua yang di-scan itu.

**1683. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[03:15:24]**

Baik, Yang Mulia.

1684. KETUA: SALDI ISRA [03:15:25]

Ya.

**1685. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[03:15:25]**

Karena untuk (...)

1686. KETUA: SALDI ISRA [03:15:26]

Jangan merasa kepentingan kami, kepentingan Anda itu.

**1687. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[03:15:28]**

Baik, Yang Mulia.

1688. KETUA: SALDI ISRA [03:15:29]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

**1689. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. TAUFAN TRI UTAMA
[03:15:30]**

Siap, Yang Mulia.

1690. KETUA: SALDI ISRA [03:15:33]

Bawaslu, PK-25.501 sampai dengan PK-25.53?

1691. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [03:15:40]

Betul, Yang Mulia.

1692. KETUA: SALDI ISRA [03:15:40]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai Bukti PT-21?

1693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [03:15:47]

Benar, Yang Mulia.

1694. KETUA: SALDI ISRA [03:15:48]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Sedang diperiksa ya yang ini, biar di sini saja dulu, yang tadi Sungai Penuh.

Silakan, Pemohon. Apa yang mau disampaikan?

1695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Angga Busra Lesmana. Jadi, kami hanya menambahkan sedikit, Yang Mulia. Bahwa kami Lembaga Analisis HAM Indonesia sudah mempunyai en ... SK Menkumham yang baru, Yang Mulia. Bahwa (...)

1696. KETUA: SALDI ISRA [03:16:21]

Itu tanggalnya berapa?

1697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:22]

Ambo Dodding, ya.

1698. KETUA: SALDI ISRA [03:16:23]

Kapan tanggalnya?

1699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:24]

Tidak menjadi ketua lagi.

1700. KETUA: SALDI ISRA [03:16:26]

Kapan tanggalnya?

1701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:27]

Tanggalnya tanggal 13 Januari, Yang Mulia.

1702. KETUA: SALDI ISRA [03:16:30]

13 Januari.

1703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:31]

12 ... 2025.

1704. KETUA: SALDI ISRA [03:16:33]

Siapa ketuanya?

1705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:34]

Ketuanya adalah Bapak Ince Rifai[sic!].

1706. KETUA: SALDI ISRA [03:16:39]

Oke.

1707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:40]

Dan kami juga sudah (...)

1708. KETUA: SALDI ISRA [03:16:41]

Nanti semuanya Anda serahkan, semuanya kami pertimbangkan.

1709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:44]

Betul. Dan kami juga melampirkan foto bahwa ada Ambo Dodding bersama dengan Dr. Khairul di sini.

1710. KETUA: SALDI ISRA [03:16:51]

Ngapain itu bersamanya?

1711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:52]

Mereka sedang ngopi-ngopi, Yang Mulia.

1712. KETUA: SALDI ISRA [03:16:54]

Ngopi-ngopi boleh, masa enggak boleh ngopi-ngopi.

1713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANGGA BUSRA LESMANA [03:16:57]

Ya, silakan ditafsirkan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1714. KETUA: SALDI ISRA [03:16:59]

Oke, terima kasih.
Ada lagi yang lain?

1715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:17:02]

Ada, Yang Mulia.

1716. KETUA: SALDI ISRA [03:17:03]

Ini dari mana, Pak, di belakang? Sungai Penuh, sabar, ya. (ucapan tidak terdengar jelas) masih ada masalahnya[sic!]. Silakan.

1717. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMBO DODDING [03:17:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

1718. KETUA: SALDI ISRA [03:17:17]

Ya.

1719. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMBO DODDING [03:17:17]

Jadi saya atas nama Ambo Dodding yang masih sah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Yang Mulia, dia enggak tidak sah. Siapa yang menerbitkan dari Kementrian Hukum dan HAM.

1720. KETUA: SALDI ISRA [03:17:29]

Oke.

1721. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMBO DODDING [03:17:29]

Ini aslinya ada sama saya.

1722. KETUA: SALDI ISRA [03:17:31]

Oke.

1723. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AMBO DODDING [03:17:32]

Akte notaris, akta pendirian, ada sama saya.

1724. KETUA: SALDI ISRA [03:17:35]

Oke.

**1725. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
AMBO DODDING [03:17:36]**

Jadi kalau pe ... ada yang bilang, ada yang tidak sah, mohon maaf. Jadi saya ... seperti apa yang digambarkan oleh dari Pihak Terkait, saya sangat berterima kasih sekali dari KPU, dari Bawaslu karena ini yang mengajukan permohonan ini sudah melanggar kode etik kelembagaan, kenapa (...)

1726. KETUA: SALDI ISRA [03:17:57]

Pak, sudah, Pak. Sudah.

**1727. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
AMBO DODDING [03:17:58]**

Oke.

1728. KETUA: SALDI ISRA [03:17:58]

Berhenti. Duduk.

**1729. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
AMBO DODDING [03:18:00]**

Terima kasih banyak. Ya.

1730. KETUA: SALDI ISRA [03:18:02]

Saya sudah katakan persoalan, Bapak, akan diselesaikan dalam putusan. Ada yang lain? Anda ini para pemantau sudah dikasih ruang oleh Mahkamah Konstitusi bikin gaduh lagi. Padahal ini kita mau pemilunya baik-baik lho.

Di sini, Sungai Penuh apa yang mau ditanyakan? Silakan.

**1731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-
XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:18:26]**

Baik, Pak. Ada pertanyaan[sic!], Yang Mulia, tanyakan kepada kami Pemohon, dan Termohon belum dijawab.

1732. KETUA: SALDI ISRA [03:18:34]

Apa itu?

1733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:18:35]

Terkait dengan jumlah hasil di Kecamatan Kumun Debai kalau memang ... apa ... kita sampaikan, Yang Mulia, kalau memang perlu harus kami sampaikan.

1734. KETUA: SALDI ISRA [03:18:44]

Apa hasilnya?

1735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:18:46]

Jadi, untuk Paslon Nomor 1 itu hasil suaranya=6.274.

1736. KETUA: SALDI ISRA [03:18:51]

Oke.

1737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:18:51]

Paslon Nomor 2=515.

1738. KETUA: SALDI ISRA [03:18:54]

Sebentar, 500?

1739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:18:56]

15.

KETUA: SALDI ISRA [03:18:57]

15. Terus?

1740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:18:58]

Koreksi, Yang Mulia, 615.

1741. KETUA: SALDI ISRA [03:19:00]

Oke.

1742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:19:01]

Nomor 3=103

1743. KETUA: SALDI ISRA [03:19:04]

103.

1744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:19:05]

Ya. Paslon Nomor 4=246.

1745. KETUA: SALDI ISRA [03:19:07]

Oke.

1746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:19:08]

Paslon Nomor 5=6.

1747. KETUA: SALDI ISRA [03:19:10]

Paslon Nomor 5=6, ya?

1748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:19:11]

Ya.

1749. KETUA: SALDI ISRA [03:19:10]

Oke. Terima kasih

1750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [03:19:11]

Siap, Yang Mulia.

1751. KETUA: SALDI ISRA [03:19:24]

Kita sudah cek yang tadi apa ya ... dari Sungai Penuh. Itu kan video, ya, yang disertakan ya. Kita cek cuma ada video untuk P-31 saja. Nah, tolong nanti apa ... Anda selesaikan, ya. Oke. Jadi, yang ada ini kita sahkan dulu, ya, Sungai Penuh ya.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau tanya depan? Dari mana? Nomor berapa?

1752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMIEFFENDI [03:19:49]

Izin, Yang Mulia, dari Perkara 111, Yang Mulia.

1753. KETUA: SALDI ISRA [03:19:52]

Oke.

1754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMIEFFENDI [03:19:53]

Rote Ndao.

1755. KETUA: SALDI ISRA [03:19:54]

Rote Ndao apa?

1756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMIEFFENDI [03:19:55]

Izin, Yang Mulia, apakah diperkenankan untuk merenvoi daripada perbaikan gugatan, Yang Mulia?

1757. KETUA: SALDI ISRA [03:20:00]

Oh, tidak ada lagi?

1758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMIEFFENDI [03:20:01]

Baik, Yang Mulia.

1759. KETUA: SALDI ISRA [03:20:02]

Sudah diumumkan dari awal.

1760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [03:20:03]

Siap.

1761. KETUA: SALDI ISRA [03:20:04]

Cukup?

1762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [03:20:05]

Cukup, Yang Mulia.

1763. KETUA: SALDI ISRA [03:20:06]

Yang lain? Pas. Nah, kalau pas, tidak turun batunya, Pak. Gaple itu tidak turun kalau pas.

Nah, ini pengumuman. Disampaikan penundaan sidang untuk Perkara 41, 98, 111, 48, 71, 146 PHPU Bupati dan Wali Kota. Diberitahukan pemeriksaan perkara ini, jadi yang ini termasuk juga yang lain yang sudah selesai, itu akan dilaporkan ke RPH untuk menentukan, mana di antara perkara ini yang akan di-dismiss dan mana yang akan lanjut. Jadi kalau yang sebelah sini minta di-dismiss nih, Pak. Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, dismiss saja katanya. Tapi kalau yang di sini dilanjutkan ke pembuktian katanya, kan? Nah, beda-beda. Tergantung mana doanya yang makbul nantinya. Nah, itu artinya apa? Perkembangan lebih lanjut tunggu panggilan dari Mahkamah. Jadi nanti akan dipanggil di putusan dismissal. Itu perkembangannya.

Yang kedua, apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, kalau ada di antara nomor ini dilanjutkan ke pembuktian berikutnya, maka diperkenankan mengajukan saksi atau ahli. Jumlah saksi atau ahli untuk pemilihan gubernur maksimal enam. Jadi mau saksi semua, enam boleh, mau ahli enam-enamnya, boleh. Itu terserah mana yang dipilih. Sementara untuk bupati/wali kota, saksi atau ahli maksimal empat. Itu juga komposisinya. Bagi yang akan mengajukan saksi atau ahli, tolong daftar saksi ahlinya disampaikan. Kemudian keterangan untuk saksi itu apa yang akan diterangkan, pokok-pokoknya. Sehingga nanti Mahkamah akan mendalami sesuai dengan pokok-pokok yang disampaikan itu, itu yang akan didalami. Sementara ahli, tolong nanti keterangan ahlinya diserahkan di Mahkamah, termasuk pokok-pokok keterangan saksi, satu

hari menjelang persidangan. Nah, itu sudah sampai di Mahkamah, satu hari kerja sebelum Sidang Pembuktian. Nah, itu.

Kemudian kalau ada yang mau menambah bukti atau inzage, itu tidak diperkenankan lagi sekarang, kecuali perkaranya lanjut ke pembuktian berikutnya. Setelah dinyatakan lanjut nanti, boleh menambah bukti dan melakukan inzage. Paham semua? Terima kasih.

Terima kasih, Pak Ketua, dan terima kasih untuk kita semua yang sudah melaksanakan, mengikuti acara ini dengan tertib. Walaupun kadang-kadang ada ketawa, ada marah, ada tegang, ya suasana sidanglah. Sebab kalau dibiarkan para lawyer ini berkeliaran Pak Afif, ini susah Hakim jadinya. Makanya kita harus pura-pura marah juga. Pura-pura marah saja sebetulnya, marah betul enggaklah. Kita ini kan profesi kita, profesi hukum semua.

Nah, yang paling penting, disadari apa yang kita lakukan di ruangan ini, ini adalah bagian dari kita mendewasakan proses berdemokrasi kita. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan sikap penyelenggara, ini ruang untuk menyelesaikannya. Begitu diselesaikan, kita terima, apa pun hasilnya. Nah, itu yang paling penting dari proses ini semua. Kalau itu kita bisa lakukan, investasi penting kita untuk berdemokrasi akan kita tuai di waktu-waktu ke depan. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 41, 98, 111, 48, 71, 146 PPU Wali Kota dan Bupati Tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 21 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

